



ACCUUSI

Journal Of Accounting USI

E - ISSN : 2620 - 5815
Volume : Vol 5 Edisi 1 MEI 2023

Pengambilan Keputusan Dalam Penyusunan Strategi Bersaing Usaha Pada UMKM Sate Madura Cak Heri Menggunakan Analisis SWOT <i>Julio Pasaribu, Yolanda Novita Sari, Salsabila, Hasyim</i>	1 - 6
Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Berdasarkan ISAK 35 Pada Gereja GMI Effatha <i>Sahala Purba, Novelita Br Manullang</i>	7 - 13
Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2021 <i>Elfina Okto Posmaida Damanik, Resna Napitu, Dina Valentina Pratiwi</i>	14 - 24
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar <i>Jos Martin Simanjuntak, Eva Sriwiyanti, Wico Jontarudi Tarigan</i>	25 - 45
Analisis Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT XL AXIATA, Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia <i>Vitryani Tarigan, Marintan Saragih, Sri Martina</i>	46 - 53
Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian Kabupaten Simalungun <i>Marintan Saragih, Vitryani Tarigan, Bagudek Tumanggor</i>	54 - 64
Social Media Performance And Evaluation : An Approach To Business Analytics Concept <i>Genesis Sembiring Depari, Adat Muli Peranginangin, Albert Owen, Felix Emmanuel Tanny, Luis Jonatan, Winnie Lauren</i>	65 - 80
Studi Kelayakan Usaha Pembudidayaan Ikan Lele Ditinjau Dari Aspek Keuangan <i>Djuli Sjafel Purba, Rosita Manawari Girsang, Djahetman Purba, Sri Martina, Ratih</i>	81 - 93

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SIMALUNGUN
PEMATANG SIANTAR**



EDITORIAL TEAM
EDITORIAL TEAM

JURNAL ILMIAH ACCUSI

Editor In Chief	Eva Sriwiyanti, SE, Ak, CA, M.Si - Universitas Simalungun
Editor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wico Jontarudi Tarigan SE, M.Si - Universitas Simalungun 2. Adat Muli Peranginangin - STIE Surya Nusantara
Section Editor	Djuli Purba SE, M.Si - Universitas Simalungun
Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elfina O.P Damanik, SE, MM – Universitas Simalungun 2. Vitryani Tarigan SE, M.Si - Universitas Simalungun 3. Marintan Saragih SE, M.Si - Universitas Simalungun 4. Mahaitin Sinaga SE,Ak,MM,M.Si,CA - Universitas Simalungun 5. Arthik Davianti - Universitas Kristen Satya Wacana 6. Sri Imaningati - STIE Bank BPD Jateng 7. Desman Serious Nazara - STIE Pembangunan Nasional 8. Dedi Suhendro - AMIK Tunas Bangsa
Layout Editor	Sri Martina SE, M.Si - Universitas Simalungun

Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi

Universitas Simalungun

Jl. Sisingamangaraja No. 1 P.Siantar

Email : prodiakuntansi.usi@gmail.com

JURNAL Ilmiah AccUsi

E - ISSN 2620 - 5815

VOLUME 5, NO 1 MEI 2023

Pengambilan Keputusan Dalam Penyusunan Strategi Bersaing Usaha Pada UMKM Sate Madura Cak Heri Menggunakan Analisis SWOT	1 – 6
Julio Pasaribu, Yolanda Novita Sari, Salsabila, Hasyim	
Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Berdasarkan ISAK 35 Pada Gereja GMI Effatha	7 - 13
Sahala Purba, Novelita Br Manullang	
Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2021	14 – 24
Elfina Okto Posmaida Damanik, Resna Napitu, Dina Valentina Pratiwi	
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar	25 - 45
Jos Martin Simanjuntak, Eva Sriwiyanti, Wico Jontarudi Tarigan	
Analisis Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT XL AXIATA, Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	46 – 53
Vitryani Tarigan, Marintan Saragih, Sri Martina	
Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian Kabupaten Simalungun	54 - 64
Marintan Saragih, Vitryani Tarigan, Bagudek Tumanggor	
Social Media Performance And Evaluation : An Approach To Business Analytics Concept	65 - 80
Genesis Sembiring Depari, Adat Muli Peranginangin, Albert Owen, Felix Emmanuel Tanny, Luis Jonatan, Winnie Lauren	
Studi Kelayakan Usaha Pembudidayaan Ikan Lele Ditinjau Dari Aspek Keuangan	81 - 93
Djuli Sjafei Purba, Rosita Manawari Girsang, Djahotman Purba, Sri Martina, Ratih	

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENYUSUNAN STRATEGI BERSAING USAHA PADA UMKM SATE MADURA CAK HERI MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT

¹**Julio Pasaribu, Universitas Negeri Medan**

e-mail: juliopasaribu@gmail.com

²**Yolanda Novita Sari, Universitas Negeri Medan**

e-mail: yolandanovitasar0302i@gmail.com

³**Salsabila, Universitas Negeri Medan**

e-mail: salsa.bilaa0702@gmail.com

⁴**Hasyim, Universitas Negeri Medan**

e-mail: hasyimns65@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui fungsi dan tujuan pengambilan keputusan serta merumuskan formulasi strategi kompetitif pada usaha sate Madura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel namun hanya menggunakan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil analisis ditemukan beberapa strategi alternatif yang bisa digunakan untuk menang dalam persaingan di tengah maraknya usaha sate madura di daerah Medan Selayang Kota Medan. Pengambilan keputusan yang tepat dalam menetapkan strategi bersaing berpengaruh pada penghasilan usaha sate. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan.

Kata Kunci : Pengambilan Keputusan, Analisis SWOT, Analisis Alternatif

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the function and purpose of decision making and to formulate a competitive strategy formulation in the Madura satay business. This research is a descriptive research with a qualitative approach, which in this study did not use population and samples but only used informants to obtain the information needed. The data used are primary and secondary data. From the results of the analysis found several alternative strategies that can be used to win in the competition in the midst of the rise of the Madura satay business in the Medan Selayang area, Medan City. Making the right decision in determining a competitive strategy has an effect on the income of the satay business. Wrong One strategy that can be applied is to take advantage of existing opportunities by minimizing weaknesses

Keywords: Decision Making, SWOT Analysis, Alternative Analysis

I. PENDAHULUAN

Persaingan di bidang kuliner saat ini sangat ketat, mulai dari warung pinggir jalan yang sering kita sebut warung, hingga restoran besar yang mewah. Masing-masing menawarkan berbagai hidangan yang enak dan memiliki ciri khas toko atau restoran. Di sisi lain, sebagai akibat dari persepsi orang yang berbeda, sangat sulit untuk menentukan keseragaman noda kualitas makanan secara andal dan akurat. Dalam kondisi tekanan persaingan yang kuat, pengusaha harus mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan strategi yang dapat digunakan untuk mengelola persaingan perusahaan. Pemilik warung juga berurusan dengan kebutuhan untuk menentukan strategi bisnis Warung yang menawarkan harga dan rasa yang menarik semakin banyak muncul, sehingga Ibu Nursari, pemilik pengelola makanan, mendefinisikan persaingan. strategi Keputusan pembelian konsumen mempengaruhi strategi yang digunakan.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemilik usaha mengembangkan strategi berdasarkan analisis SWOT?
2. Apa tugas krusial dalam menentukan strategi bersaing usaha warung makan yang berlokasi di Klampi Ngasem Surabaya?
3. Bagaimana Proses pengambilan keputusan?

Tujuan Penulisan

1. Mengetahui fungsi dan tujuan pengambilan keputusan.
2. Mengetahui cara pemilik laundry menyusun strategi berdasarkan analisa SWOT.
3. Mengetahui proses pengambilan keputusan

II. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pengambilan Keputusan

(Drommond, 1985) berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah upaya untuk menciptakan peristiwa dan membentuk masa depan (peristiwa selama dan setelah pemilu). Pernyataan ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses yang melewati beberapa tahapan evaluasi alternatif untuk mengambil keputusan berdasarkan semua alternatif yang tersedia (Syaruddin, 2004), sebagian dari definisi yang telah dijelaskan di atas. bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses pemecahan masalah dimana suatu pilihan dari beberapa alternatif ditentukan untuk menentukan arah tindakan yang akan diambil untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Pengambilan keputusan yang kreatif dan inovatif. Pengambilan keputusan yang tidak kreatif cenderung membuat keputusan secara emosional. Menggunakan kreativitas mereka, pengambil keputusan dapat menemukan cara untuk memecahkan masalah dan kemudian memilih di antara pilihan yang menguntungkan keberhasilan organisasi. Berkat inovasi, pembuat keputusan dapat membuat keputusan yang baik. Menurut jenis masalahnya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan terprogram, yaitu pengambilan keputusan, dapat dilakukan dengan menggunakan rutinitas standar. Ciri - cirinya adalah : Masalah terstruktur, sederhana, dan informasi tersedia lengkap Masalah dan proses pengambilan keputusan telah terjadi berkali - kali sehingga dapat dihitung dan pengalaman tersedia untuk menyelesaikannya.
2. Pengambilan keputusan tidak terprogram adalah pengambilan keputusan dengan masalah unik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada atau sedikit informasi tentang masalah tersebut, tidak ada aturan, kebijakan, prosedur operasi standar untuk pengambilan keputusan (Wirawan, 2001)

Dampak Pengambilan Keputusan yang Efektif Terhadap Pengembangan Organisasi

Pengambilan keputusan dapat dikatakan sebagai unsur dari manajemen, salah satu tugas pokok dari pimpinan. Seperti yang dijelaskan oleh (Husaini, 2013), keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh cara manajer dalam mengambil keputusan yang baik.

Analisis SWOT

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam memilih strategi inti adalah analisis SWOT. Analisis SWOT dapat digunakan untuk menilai peluang dan tantangan lingkungan bisnis dan lingkungan internal perusahaan (Kuncoro, 2005). (Rangkuti, 2009) menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi secara sistematis terhadap berbagai faktor dengan tujuan merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman. Pengambilan keputusan dengan cara ini selalu terkait dengan pengembangan misi bisnis, tujuan, strategi dan kebijakan. Pada dasarnya analisis SWOT membandingkan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) untuk menentukan formulasi strategi (*strategic planning*) dalam upaya merumuskan strategi jangka panjang. Menurut (David, 2006), peluang dan ancaman eksternal mengacu pada tren dan peristiwa ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, hukum, administrasi, teknologi, dan persaingan yang secara signifikan dapat menguntungkan atau merugikan organisasi di masa depan. .

Untuk memudahkan analisis SWOT, diperlukan matriks SWOT yang tujuannya adalah untuk memudahkan perumusan strategi yang diterapkan oleh berbagai perusahaan. Matriks ini dibuat dengan cara mengelompokkan setiap elemen permasalahan SWOT ke dalam tabel matriks. Karena matriks SWOT ini merupakan alat untuk menyatukan faktor - faktor strategis perusahaan, dimana matriks ini nantinya dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahannya.

Melakukan analisis SWOT ini (Rangkuti, 2009) menyatakan bahwa dapat dibuat sebuah matriks yang semua sel tersebut dapat diisi sesuai dengan petunjuk berikut:

1. Sel Strength (S) terbuat dari 5 - 10 elemen internal. Kekuatan Perusahaan yang dimiliki perusahaan, yaitu. mencari 5 -10 analisis kekuatan, situasi atau keadaan yang menjadi kekuatan perusahaan saat ini. Yang perlu dilakukan dalam analisis ini adalah setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya dibandingkan dengan pesaingnya.
2. Sel kelemahan (W) terdiri dari 5 - 10 kelemahan dalam perusahaan. Dengan kata lain, kami mencari 5 - 10 analisis kelemahan, situasi atau keadaan yang saat ini menjadi kelemahan perusahaan. Ini adalah kesempatan untuk menganalisis kelemahan perusahaan, yang menjadi hambatan serius bagi perkembangan perusahaan.
3. Sel Peluang (O) terdiri dari 5 - 10 kekuatan eksternal yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, mencari analisis 5 - 10 peluang, kondisi yang merupakan peluang dari luar perusahaan dan menawarkan peluang pertumbuhan masa depan bagi perusahaan.
4. Sel ancaman (T) terdiri dari 5 - 10 kelemahan eksternal perusahaan. Ini berarti mencari analisis 5 - 10 ancaman yang harus dihadapi perusahaan atau organisasi untuk menghadapi berbagai faktor lingkungan yang merugikan di perusahaan yang menyebabkan kegagalan.

Definisi Strategi Bersaing

(Hariadi, 2005), strategi bersaing suatu perusahaan adalah langkah strategis yang direncanakan atau tidak direncanakan untuk mencapai keunggulan bersaing sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat posisinya di pasar dan bertahan dari pesaing. tekanan Keunggulan kompetitif di pasar memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan lebih dari pesaing mereka dan memberi mereka kesempatan untuk bertahan lebih lama dalam persaingan. Strategi perusahaan dapat diterapkan dalam penyerangan atau pertahanan atau secara bergantian tergantung kondisi di lapangan. Dalam strategi ini melibatkan berbagai gerakan taktis jangka pendek untuk menipu lawan dan menahan serangan lawan, semuanya ditujukan untuk memenangkan pertempuran dan perang.

Selanjutnya Hariadi memisahkan strategi bersaing dan strategi bisnis. Strategi bisnis tidak hanya tentang bagaimana bersaing dengan lawan atau kekuatan perusahaan di pasar, tetapi juga mencakup strategi dalam aktivitas yang dilakukan perusahaan dan bagaimana manajemen merespon perubahan kondisi industri, yang mencakup banyak hal (tidak hanya persaingan). Pada saat yang sama, strategi bersaing hanya berfokus pada rencana tindakan manajemen untuk bersaing dengan sukses dan memberikan nilai superior kepada konsumen.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Ini merupakan penelitian studi yang lebih bersifat operasional yakni dengan melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal suatu bisnis usaha Sate Madura Cak Hendri melalui penerapan analisis *SWOT* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif Matrik *SWOT*.

Jenis dan Sumber Data

Untuk membantu penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung kepada pengelola (*supervisor*), manajer Sate Madura Cak Hendri di daerah

Medan Selayang yang diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait seputar faktor lingkungan bisnis apa yang dimiliki oleh bisnis usaha tersebut.

- b. Data sekunder, merupakan data - data yang diperoleh dari sumber lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu, literatur, dan data - data dari objek penelitian yang diperlukan dalam penyusunan dalam penyusunan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan pengelola (*supervisor*), manajer, dan konsumen beberapa usaha Sate Madura Cak Hendri di daerah Medan Selayang untuk memperoleh keterangan - keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel - variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka - angka seperti analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode Analisis Deskriptif

Metode Analisis Deskriptif merupakan cara merumuskan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang ada serta daya saing usaha sate madura yang dilihat dari analisis *SWOT*.

- b. Matriks Analisis *SWOT*

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan matrik *SWOT* (Rangkuti, 2009) merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*) pada usaha Sate madura.

Pada bagian ini menggambarkan setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari usaha sate madura ini dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Terdapat suatu kondisi lingkungan yang dihadapi perusahaan yang berasal dari dalam lingkungan bisnis itu sendiri (kekuatan dan kelemahan) maupun dari lingkungan luar bisnis (peluang dan ancaman).

Menurut penelitian yang dilakukan Cabang usaha ini yang beralamat di Jl. Pasar 1 No. 276, Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang yang membuka jam kerjanya mulai dari jam 17.00 WIB sampai dengan pukul 23.00. Harga yang disajikan beragam, untuk harga sate daging ayam Rp.15.000 / porsi dan untuk harga sate daging kambing Rp. 25.000 / porsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik/pelaku UKM, didapatkan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada usaha tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat maka peneliti mengajukan model penerapan informasi UKM dikembangkan berdasarkan pemetaan *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, And Threats)*. Berikut ini adalah hasil *SWOT* yang dikembangkan bersumber dari wawancara dan kuesioner penelitian yang disebar ke para pelaku UKM / pemilik UKM. Adapun hasil analisis *SWOT* disajikan pada Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis SWOT

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weaknesses)
1. Harga bahan terjangkau 2. Bahan baku yang digunakan berkualitas baik 3. Mempunyai cita rasa yang khas	1. Tenaga kerja yang sedikit 2. Kapasitas tempat yang kurang strategis
Peluang (Opportunities)	Tantangan/Hambatan (Threats)
1. Pemilik usaha menggunakan pemasaran secara online untuk melebarkan jangkauan konsumen.	1. Persaingan , dimana adanya penyebaran isu untuk menjelekkkan/merusak nama usaha tersebut agar pembeli berkurang. 2. Karyawan yang tidak jujur, menyertorkan hasil jualan tidak sesuai dengan seharusnya.

Alternatif strategi

Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan - keputusan. Manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan perusahaan, pengembangan kebijakan dan perencanaan mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan perusahaan. Definisi manajemen strategi dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- Alternatif strategi adalah suatu seni dan ilmu dari perumusan (*formulating*), Penerapan (*implementing*), evaluasi (*evaluating*), dari keputusan - keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya di masa yang akan datang.
- Alternatif strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan, demikian juga sifat perusahaan baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Penulis menarik kesimpulan dari kedua definisi alternatif strategi diatas bahwa alternatif strategi adalah suatu berbagai macam cara yang direncanakan untuk bertujuan mencapai suatu tujuan tertentu agar tercapai sesuai dengan tujuan. Tujuan utama perencanaan strategi adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas, fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing. Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan usaha Sate Madura Cak Heri dalam menjalankan struktur manajemen sudah berjalan dengan baik. Dimana pemilik dan manajer berkolaborasi dalam menjalankan usaha ini. Pemilik dan manajer juga mengawasi, mengarahkan, dan mengatur karyawan dengan baik. Begitu juga dengan para karyawan, sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Saran

Usaha Sate Madura ini sudah sangat banyak cabang nya dan harga satenya juga seimbang dengan rasa enak nya. Namun karena lokasinya yang terdapat di beberapa tempat saja membuat orang terkadang malas untuk pergi kesana. Saran kami lebih baik usaha ini bisa dipesan secara online seperti dengan aplikasi gofood, grabfood, shopeefood dan aplikasi online lainnya agar memudahkan pembeli membeli sate madura ini tanpa pergi ke lokasi secara langsung. Kita ketahui bahwa usaha Sate Madura Cak Heri ini memiliki banyak cabang. Karena banyaknya cabang dalam usaha ini, perlunya penambahan karyawan agar penjualan terasa lebih mudah dan cepat. Selain itu, pemilik dan manajer harus tegas menindaklanjuti karyawan yang dapat merugikan usaha ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin, A., & Yoga, H. (2015). Strategi Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pada Usaha Kecil Produk Makanan Ringan Di Surabaya. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1)
- Alimudin, A., & Sukoco, A. (2017). The Leadership Style Model That Builds Work Behavior Through Organizational Culture. *Jurnal Leentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 3(2), 362-375.
- Anzizhan, Syafaruddin 2004. Sistem pengambilan keputusan pendidikan. Ebook
- David, F. R. (2006). *Manajemen Strategis: Konsep*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Didi Wahyu Sudirman. 2003. Pengambilan Keputusan sebagai Langkah Strategis Tugas Manajer. journal.uny.ac.id, 3(2): 93-101.
- Drummond, H. (1993). Pengambilan keputusan yang efektif: petunjuk praktis dan komprehensif untuk manajemen. Gramedia Pustaka Utama.
- Hariadi, B. (2005). *Strategi Manajemen* Jakarta. Bayumedia Publishing.
- Kuncoro, M., & Wisnu Chandra Kristiaji, S. E. (2006). Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?
- Rangkuti Freddy. 1997. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.
- Tarigan, W. J., & Ambarita, I. M. (2021). Penerapan Manajemen Strategi Dalam Menghadapi Persaingan Pasar (Studi Kasus Pada Telkomsel Cabang Pematangsiantar). *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.36985/accusi.v3i1.491>
- Usman, H. (2013). *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*
- Wirawan, D. (2013). *Kepemimpinan: Teori, psikologi, perilaku organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta PT. Rajagrafindo Persada.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NON LABA BERDASARKAN ISAK 35 PADA GEREJA GMI EFFATHA

¹Sahala Purba, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

²Novelita Manullang, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

e - mail : novelita111100@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penyajian keuangan laporan entitas nirlaba. Awalnya, nirlaba entitas menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 yang kemudian diubah menjadi ISAK 35. Satu dari entitas nirlaba yang termasuk dalam gereja, aspek yang paling penting adalah keuangan akuntabilitas. Akuntabilitas yang baik diperoleh dari standar akuntansi yang berlaku umum. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan berdasarkan penerapan ISAK 35. Objek dari makalah ini adalah presentasi laporan keuangan Gereja GMI Effatha. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan observasi. Keuangan pernyataan - pernyataan yang akan dihasilkan adalah pernyataan - pernyataan dari posisi keuangan, laporan komprehensif laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci : Gereja, ISAK 35, Laporan Keuangan

ABSTRACT

This journal discusses the presentation of financial statements of non-profit entities. Initially, non-profit entities presented financial reports based on PSAK 45 which was later changed to ISAK 35. One of the non-profit entities that belong to the church, the most important aspect is financial accountability. Good accountability is obtained from generally accepted accounting standards. This journal aims to determine the presentation of financial statements based on the application of ISAK 35. The object of this paper is the presentation of the financial statements of the GMI Effatha Church. Data was collected through a series of interviews and observations. The financial statements that will be produced are statements of financial position, comprehensive income statements, cash flow statements and notes to financial statements.

Keywords : Church, ISAK 35, Financial Report

I. PENDAHULUAN

Sebuah organisasi yang ukuran utamanya mendukung suatu isu atau topik dengan melibatkan audiens untuk tujuan non - komersial tanpa memperhatikan keuntungan atau keuntungan adalah gagasan dari Nirlaba. Walaupun organisasi nirlaba ini dalam kegiatannya tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan, namun wajib menyusun laporan finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan organisasi nirlaba tersebut. Dana yang dikelola organisasi nirlaba berasal dari donatur atau anggota organisasi. Dalam hibah ini tidak mensyaratkan pengembalian dana yang diberikan, tetapi membuat klaim dalam bentuk laporan finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana nirlaba yang diberikan.

Salah satu entitas yang bergerak di bidang keagamaan yaitu gereja, karena memperoleh sumber daya untuk menjalankan berbagai kegiatannya melalui iuran dari anggota dan sponsor lainnya, yang tidak mengharapkan imbalan apapun, termasuk gereja GMI Effatha. Gereja GMI Effatha merupakan salah satu organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang kerohanian atau pelayanan keagamaan kepada masyarakat dan juga sebuah organisasi nirlaba, yang memberikan informasi

finansial yang tidak hanya diperuntukan untuk administrasi gereja tetapi juga untuk komunitas gereja atau asosiasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumbangan yang telah mereka berikan untuk digunakan sebaik mungkin dan sesuai dengan harapan orang-orang. Penyampaian laporan finansial ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Allah atas pengelolaan kekayaan dan kepemimpinan gereja dan anggotanya yang bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih.

Penyusunan laporan finansial oleh GMI Effatha masih sangat sederhana yaitu berupa penerimaan dan pengeluaran bulanan dan tahunan. Sedangkan menurut ISAK No. 35, laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Begitu pula pungutan, iuran, sumbangan, hasil lelang, sumbangan modal gereja dan non gereja yang diterima gereja, tidak secara khusus menyebutkan pengelolaan keuangan Gereja GMI Effatha. Laporan finansial Gereja harus disusun berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. ISAK No. 35 mengatur pelaporan finansial yang tepat untuk organisasi nirlaba. Gereja sebagai organisasi nirlaba wajib menyajikan laporan finansial sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, namun Gereja GMI Effatha belum menyusun laporan finansial yang menggambarkan kinerja aktual organisasi nirlaba serta laporan finansial ISAK 35.

Berikut ini adalah beberapa organisasi nirlaba yang seharusnya menerapkan ISAK 35 dalam laporan finansialnya adalah, Gereja HKBP KM 55 (Purba et al., 2021), Gereja Protestan Banua Niha Keriso (BNKP) Resor Lolowau 14 Nias (Siringoringo1 & Lombu, 2022), Gereja HKBP Pangaribuan (Isak et al., 2022), GMIM Bethesda Tatele (Joylisti et al., 2022), Jemaat BNKP Jemaat The Lahewa Resort 35 (Keuangan & Nirlaba, 2011), Masjid Baitul Hidayah Puger (Krismontiyah et al., 2021), (Ula et al., 2021), (Isak et al., 2021), Panti Asuhan Gelora Kasih (Purba, Elisabeth, et al., 2022), Panti Asuhan Sendono (Purba, Intan, et al., 2022), Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo (Shoimah et al., 2021), Yayasan Pundi Amal Abadi Indonesia (Setiawan et al., 2021) dan Yayasan An – Nahl (Penerapan & Pengelolaan, 2021) yang menyatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukan pada masing-masing organisasi belum menerapkan penyajian laporan finansial sesuai ISAK 35, namun masih menyajikan laporan finansial laporan penerimaan dan pengeluaran yang dikeluarkan tidak sesuai ISAK 35. Melalui penelitian ini, peneliti akan menyajikan pelaporan dari Gereja GMI Effatha yang sesuai dengan Standar Akuntansi ISAK 35.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat berdasarkan pada format dan bentuk laporan finansial Gereja GMI Effatha untuk menyesuaikan laporan finansial gereja dengan ISAK 35 tentang Penyusunan Laporan finansial Entitas Berorientasi nonlaba. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu:

- a. Tinjauan Literatur
- b. Wawancara
- c. Observasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang dilakukan bahwa pencatatan akuntansi laporan finansial gereja GMI Effatha masih mencatat penerimaan dan pengeluaran, seperti dibawah ini :

Gereja GMI Effatha		
Laporan Kas		
Periode Januari 20XX		
No	Keterangan	Jumlah
1	persembahan kebaktian umum	19.000.000
2	persembahan persepuluhan	20.270.000
3	ucapan syukur	25.001.000

4	persembahan evangelisasi	4.000.000
5	persembahan pembangunan gereja	5.000.000
6	persembahan dana pension	2.000.000
7	persembahan dana misi (sadar 5.000)	1.300.000
	Total Penerimaan	75.571.000
8	kontribusi ke distrik	300.000
9	kontribusi ke pusat	500.000
10	nafkah pimpinan jemaat	10.700.000
11	biaya kebersihan gereja	400.000
12	biaya listrik	367.000
13	biaya fotocopy	200.000
14	biaya sermon	200.000
15	iuran BPJS Kesehatan	200.000
16	iuran BPJS Ketenaga kerjaan	285.000
17	honor sekretaris	200.000
18	pembayaran SMI	38.000
19	diserahkan ucapan syukur untuk pimpinan jemaat	100.000
20	diserahkan persembahan dana misi	127.000
21	pembayaran almanac	800.000
22	pembayaran suara mimbar, komsel, P2MI	500.000
23	kekurangan bayar kalender	300.000
24	sosial sakit I	150.000
25	sosial sakit II	150.000
26	sosial anak lahir	100.000
27	konsumsi rapat majelis	250.000
28	cetak lembar perpuluhan	170.000
29	pembelian rondap	90.000
30	konsumsi tutp buku januari	100.000
31	biaya perbaikan lantai gereja	2.000.000
32	biaya perbaikan atap gereja	1.500.000
	Total Pengeluaran	19.854.000
	Total Saldo Akhir	55.717.000

Pembahasan

Laporan keuangan yang disarankan untuk Gereja GMI Effatha sesuai isak 35 sebagai berikut antara lain :

1. Laporan Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif adalah suatu cara atau metode untuk mengevaluasi tingkat performa atau kinerja perusahaan yang menghasilkan laba dalam kurun periode waktu tertentu..

Tabel 1
Laporan Komprehensif

LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF GEREJA GMI Effatha PER JANUARI 20XX		
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya		
Pendapatan Tanpa Pembatasan		
persembahan kebaktian umum	TP	19.000.000
persembahan persepuluhan	TP	20.270.000
ucapan syukur		25.001.000
persembahan evangelisasi	TP	4.000.000
persembahan dana pension	TP	2.000.000
persembahan dana misi	TP	1.300.000



LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF GEREJA GMI Effatha PER JANUARI 20XX		
Total Pendapatan Tanpa Pembatasan		71.571.000
Beban - Beban		
Beban Tanpa Pembatasan		
kontribusi ke distrik	TP	300.000
kontribusi ke pusat	TP	500.000
nafkah pimpinan jemaat	TP	10.700.000
honor sekretaris	TP	200.000
biaya kebersihan gereja	TP	400.000
biaya listrik	TP	367.000
biaya fotocopy	TP	200.000
biaya sermon	TP	200.000
iuran BPJS Kesehatan	TP	200.000
iuran BPJS Ketenagakerjaan	TP	285.000
pembayaran SMI	TP	38.000
diserahkan ucapan syukur kepada pimpinan jemaat	TTP	100.000
diserahkan persembahan dana misi	TTP	127.000
pembayaran almanac	TP	800.000
pembayaran suara mimbar, P2MI, komsel	TP	500.000
kekurangan bayar kalender	TP	300.000
sosial sakit gita sidabukke	TP	150.000
sosial sakit LS. P. Pasaribu	TP	150.000
sosial anak lahir (L Tarigan / Br Rajagukguk)	TP	100.000
konsumsi rapat majelis	TP	250.000
cetak lembar perpuluhan	TP	170.000
pembelian rondap	TP	90.000
konsumsi tutuup buku januari	TP	100.000
Total Beban Tanpa Pembatasan	TP	16.227.000
Surplus (Defisit) Tanpa Pembatasan		55.344.000
Dengan Pembatasan Dari Sumber Daya		
Pendapatan Dengan Pembatasan		
persembahan pembangunan gereja	DP	5.000.000
Total Pendapatan Dengan Pembatasan	DP	5.000.000
Total Pendapatan		76.571.000
Beban Dengan Pembatasan		
biaya perbaikan lantai gereja	DP	2.000.000
biaya perbaikan atap gereja	DP	1.500.000
Total Beban Dengan Pembatasan	DP	3.500.000
Total Beban	DP	19.727.000
Surplus (Defisit) Dengan Pembatasan	DP	1.500.000
Penghasilan Komperhensif Lain	DP	0
Total Penghasilan Komperhensif	DP	56.844.000

2. Laporan Perubahan Aset Neto

Istilah Laporan Perubahan Aset Neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah Laporan Perubahan Ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset Neto dalam entitas nonlaba diklasifikasikan menjadi 2 yaitu :

1. Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
2. Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Berikut ini contoh format Laporan Perubahan Aset Neto berdasarkan lampiran ISAK 35:

Tabel 2
Laporan Perubahan Aset Neto



Gereja GMI EFFATHA	
LAPORAN PERUBAHAN ASEET BERSIH	
UNTUK PERIODE JANUARI 20XX	
Aset Bersih Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	
Saldo awal	0
Surplus tahun berjalan	55.344.000
Saldo Akhir Aset Bersih Tanpa Pembatasan	55.344.000
Aset Bersih Dengan Pembatasan Dari Sumber Daya	
Saldo awal	0
Surplus (Defisit Tahun Berjalan)	1.500.000
Saldo Akhir Aset Bersih Dengan Pembatasan	1.500.000
Total Aset Neto	56.844.000

3. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) berisi informasi tentang posisi keuangan, yaitu keadaan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas pada suatu tanggal tertentu.

Tabel 3
Laporan Posisi Keuangan

Gereja GMI EFFATHA	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	
UNTUK PERIODE JANUARI 20XX	
Aset / aset lancar	
Kas dan setara kas	56.844.000
Piutang	0
Perlengkapan yayasan	0
Total aset lancar	56.844.000
Aset tidak lancar	
Inventaris	0
Total aset tidak lancar	0
Total aset	0
Liabilitas	
persembahan titipan	3.300.000
Total liabilitas	3.300.000
Aset	
Aset Bersih Tanpa Pembatasan	55.344.000
Aset Bersih Dengan Pembatasan	1.500.000
Total Aset Bersih	56.844.000
Total Liabilitas Dan Aset Bersih	60.144.000

4. Laporan Arus Kas

Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan gereja dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan pengguna arus kas tersebut.

Tabel 4
Laporan Arus Kas

Gereja GMI EFFATHA	
LAPORAN ARUS KAS	

PERIODE JANUARI 2022	
Rekonsiliasi Surplus (Defisit) Menjadi Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi:	
Perubahan Dalam Aset Bersih	60.144.000
Penyesuaian Untuk Rekonsiliasi Untuk Aset Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi :	
kenaikan perlengkapan	0
kenaikan dana titipan	3.300.0000
Arus kas dari aktivitas operasi	
Kas Bersih Yang Diterima Untuk Aktivitas Investasi	0
Kas Bersih Yang Diterima Untuk Aktivitas Pendanaan	0
Kenaikan kas	56.844.000
Kas Dari Awal Kas Pada Awal Bulan	
Kas Dan Awal Kas Pada Akhir Bulan	56.844.000

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penyusunan laporan keuangan Gereja GMI Effatha, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

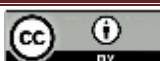
- Pencatatan keuangan yang ada di Gereja GMI Effatha masih sangat sederhana. Pencatatan yang ada di Gereja GMI Effatha hanya mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Hasil penyusunan laporan keuangan Gereja GMI Effatha yang masih disusun secara sederhana dengan mengacu pada pedoman ISAK 35 adalah laporan kegiatan, laporan perubahan asset neto, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Sehingga langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam pencatatan laporan keuangan antara lain: mengumpulkan bukti transaksi, mengkodekan akun, melakukan transaksi, memposting jurnal ke buku besar, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal, dan menyusun laporan keuangan.

Saran

Dengan melakukan penelitian dan penyajian Laporan Keuangan entitas nirlaba menggunakan ISAK No. 35 Peneliti berharap agar entitas nirlaba khususnya di Gereja GMI Effatha dapat menetapkan ISAK No. 35 untuk kedepannya agar pelaporan keuangannya lebih terstruktur dan lebih detail dan dengan penelitian ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya laporan posisi keuangan Gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Krismontiyah, S., Yulinartati, & Martiana, N. (2021). Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No.35. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(2), 124–133. <https://doi.org/10.25047/asersi.v1i2.2951>
- Isak, B., Gereja, D., & Pangaribuan, H. (2022). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. 1(1), 1–9.
- Isak, P., Masjid, P., & Hidayah, B. (2021). Penerapan isak 35 pada masjid baitul hidayah puger jember. 4(2), 152–163.
- Joylisti, G., Ivonne, T., Putong, H., Nugraha, J., Studi, P., Keuangan, A., Akuntansi, J., & Manado, P. N. (2022). Implementasi ISAK No . 35 Atas Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus pada GMIM Bethesda Tatelu). 6(2), 3753–3762.
- Keuangan, L., & Nirlaba, O. (2011). BAB I PENDAHULUAN. 45, 1–44.
- Penerapan, A., & Pengelolaan, A. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi isak 35 pada yayasan an-nahl bintang. 3(2), 24–34.
- Purba, S., Elisabeth, D. M., Tobing, D., & Siagian, L. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Berdasarkan ISAK 35 Pada Panti Asuhan Gelora Kasih Sibolangit. 6(2), 531–539.
- Purba, S., Intan, N., Steven, G., Ratna, V., Sembiring, H., Sinurat, B., Arya, A., & Zebua, J. (2022).



- Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Panti Asuhan Sendoro Medan. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), 284–291.
- Purba, S., Siregar, A., Saragih, M. E., Sinulingga, P. S., & Purba, R. B. (2021). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba Berdasarkan ISAK 35 Pada Gereja HKBP Km 55. 14(2), 308–339.
- Setiawan, D. A., Khaerul, S., Diana, A. L., Yusuf, M., Husen, I. A., Siswanti, R. E., & Tarsono, O. (2021). Pengelolaan Manajemen dan Keuangan Yayasan Yatim Piatu: Yayasan Pundi Amal Abadi Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.36406/progresif.v1i1.409>
- Shoimah, I., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 243–259. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1388>
- Siringoringo1, M. J., & Alvin Diansyah Putra Lumbu2. (2022). Analisis Penerapan ISAK 35 Pada Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Lolowau Ressort 14 NIAS. VIII, 121–133.
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 152–162. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>

**PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2013 - 2021**

¹Elfina Okto Posmaida Damanik, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

²Resna Napitu, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

³Dina Valentina Pratiwi, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

e-mail : elfinaopdse83@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi suatu kondisi terjadinya perkembangan Gross National Product (GNP) potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Inflasi di provinsi Sumatera Utara tingkat inflasi paling tinggi di Sumatera Utara pada tahun 2014 triwulan ke-4 sebesar 2,51 persen angka tersebut menggambarkan bahwa harga barang di pasar telah naik sebesar 2,51 persen, dan terendah di tahun 2019 triwulan ke-3 sebesar -1,81 persen angka tersebut menggambarkan bahwa harga barang di pasar telah turun sebesar 1,81. Inflasi meningkat pertumbuhan ekonomi menurun, ini juga berpengaruh terhadap suku bunga. Karena jika suku bunga naik maka pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara juga menurun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa besar pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh langsung dari objek yang di teliti. Pengolahan datanya menggunakan SPSS 26.0. Analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, yakni : $Y = - 2,423 - 0,529 X_1 - 0,306 X_2 + e$. Dengan koefisien regresi linear hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,529 sedangkan pada variabel suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,306 .

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Suku Bunga

ABSTRACT

Economic growth is a condition for the development of potential Gross National Product (GNP) which reflects the growth in per capita output and increases people's living standards. Inflation in the province of North Sumatra, the highest inflation rate in North Sumatra was in the 4th quarter of 2014 of 2.51 percent. This figure illustrates that the price of goods in the market has increased by 2.51 percent, and the lowest was in the 3rd quarter of 2019 of - 1.81 percent of this figure illustrates that the price of goods on the market has fallen by 1.81. Inflation increases, economic growth decreases, this also affects interest rates. Because if interest rates rise, economic growth in North Sumatra province will also decrease. The purpose of this research is to find out how much influence inflation and interest rates have on economic growth in North Sumatra. The research method used in this research is quantitative method. Types and sources of research data used are secondary data, which are obtained directly from the object under study. Processing the data using SPSS 26.0. Analysis of the data obtained using multiple linear regression analysis, namely: $Y = - 2.423 - 0.529 X_1 - 0.306 X_2 + e$. With the linear regression coefficient, the results show that inflation has a negative and significant effect on economic growth of 0.529, while variable interest rates have a negative effect on economic growth of 0.306.

Keywords : Economic Growth, Inflation and Interest Rates

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan, hal itu dapat dilihat naiknya pendapatan masyarakat, jumlah pengangguran berkurang. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi adanya tingkat inflasi dan suku bunga yang terjadi pada suatu negara. Untuk menjaga tingkat inflasi dan tingkat suku bunga yang stabil agar perekonomian tidak bergejolak perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan cerminan dari naiknya harga barang dan jasa secara terus menerus selama periode waktu tertentu.

Tabel 1
Tingkat Inflasi, Suku Bunga,
dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara
Tahun 2013 - 2021

Tahun	Inflasi Sumut (X1)	Suku Bunga Sumut (X2)	Pertumbuhan Ekonomi Sumut (Y)
2013	0.34	13.44	2.06
	1.28	13.60	-0.25
	0.10	13.61	3.33
	0.02	13.37	0.52
2014	-0.24	13.36	1.61
	0.52	13.24	-0.04
	0.26	13.24	3.30
	2.51	13.63	-0.22
2015	0	13.71	1.76
	0.84	13.74	0.24
	-0.70	13.47	3.20
	1.43	13.50	0.10
2016	0.84	13.14	1.07
	0.77	12.80	1.04
	1.22	12.76	3.00
	0.19	12.59	0.07
2017	-0.19	12.17	0.38
	0.26	11.97	1.63
	0.99	12.11	3.09
	0.73	11.74	0.37
2018	0.56	11.54	-0.41
	0.04	11.52	2.16
	0.07	11.39	3.20
	0.15	11.23	0.30
2019	0.30	11.12	-0.41
	1.63	11.23	2.10
	-1.81	11.27	3.06
	-0.19	10.80	0.40
2020	-0.16	10.75	-0.94
	-0.07	10.58	-4.75
	-0.01	10.48	3.24
	0.75	10.22	0.05
2021	-0.08	10.10	-0.22
	0.03	9.86	1.83
	0.29	9.82	1.98
	0.46	9.45	0.18

Sumber : Bank Indonesia, 2023

Berdasarkan tabel 1 peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2021”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 - 2021.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah inflasi dan suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui apakah inflasi dan suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. 2. untuk mengatasi terjadinya inflasi dan naiknya suku bunga yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di provinsi Sumatera Utara menjadi terlambat.

II. KAJIAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan peningkatan output dan pendapatan riil per kapita memang bukanlah satu - satunya sasaran kebijaksanaan di negara - negara berkembang, namun kebijaksanaan ekonomi menaikkan tingkat pertumbuhan output perlu dilakukan karena : 1. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai syarat yang sangat diperlukan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat; 2. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan lainnya seperti peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat, ataupun penyediaan fasilitas dan sarana sosial lainnya.

Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang secara general yang diakibatkan oleh menurunnya nilai mata uang pada periode tertentu. Inflasi merupakan proses kenaikan harga - harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2012) dan terjadi secara terus - menerus (Prasetyo, 2011). Kenaikan harga - harga yang dimaksud tidak berarti memiliki tingkat peningkatan (persentase) yang sama. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya satu atau dua kali saja dan bersifat sementara, meskipun dalam persentase yang besar, tidak dikategorikan sebagai inflasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan adanya kecenderungan peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus - menerus selama waktu tertentu.

Suku Bunga

Suku bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dalam presentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Suku bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut Teori Klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran dari pada investable fund yang bersumber dari tabungan. Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu

- Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati pasar.
- Suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya, suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan. Sebagaimana rumus dibawah ini:

$$r = i - \mu$$

Dimana:

- r = suku bunga riil
i = suku bunga nominal
 μ = laju inflasi

Terdapat dua pandangan berbeda mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga (Sukirno, 2012) :

- Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, tingkat bunga dipengaruhi oleh permintaan atas tabungan oleh para investor dan penawaran tabungan oleh rumah tangga.



- b) Menurut pandangan Keynes, tingkat bunga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan preferensi liquiditas atau permintaan uang. Preferensi liquiditas adalah permintaan terhadap uang seluruh masyarakat dalam perekonomian.

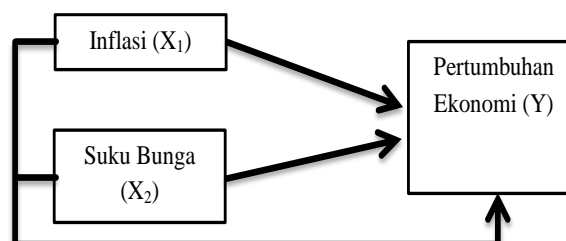
Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku

Menurut (Kasmir, 2010), faktor - faktor yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut.

- a) Kebutuhan Dana
Jika bank sedang kekurangan dana sedangkan permohonan untuk pinjaman meningkat maka bank akan meningkatkan suku bunga simpanan yang bertujuan untuk segera bisa memenuhi dana tersebut. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan ini otomatis akan meningkatkan suku bunga pada pinjaman dan sebaliknya.
- b) Persaingan
Saat dalam persaingan, bank biasanya akan menentukan suku bunga pinjaman di bawah pesaing.
- c) Kebijakan Pemerintah
Dalam menentukan bunga baik simpanan atau pinjaman sudah ada batasan maksimal dan minimanya sehingga bank tidak bisa melebihi batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga bank akan bisa bersaing dengan sehat.
- d) Jangka Waktu
Suku bunga akan semakin tinggi apabila jangka waktu pinjaman semakin lama. Begitu pun sebaliknya jika jangka waktu pinjaman pendek maka suku bunga juga akan semakin rendah.
- e) Kualitas Jaminan
Apabila jaminan yang diberikan semakin mudah untuk dicairkan maka akan semakin rendah bunga kredit yang akan dibebankan.
- f) Reputasi Perusahaan
Untuk bunga pinjaman, reputasi sebuah perusahaan akan menentukan. Dalam hal ini, bonafiditas akan sangat menentukan dimana biasanya jika perusahaan itu bonafide maka resiko kredit macet di akan relative kecil kemungkinannya.
- g) Produk yang Kompetitif
Produk yang kompetitif biasanya suku bunganya rendah karena memiliki tingkat perputaran produk yang tinggi sehingga akan lancar dalam pembayaran nantinya.
- h) Hubungan Baik
Jika nasabah memiliki hubungan baik dengan pihak bank maka penentuan untuk suku bunga akan berbeda dengan nasabah yang lainnya.

Menurut penelitian (Indriyani, 2016) yang berjudul analisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005 - 2015, bahwa inflasi dan suku bunga berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010 - 2015.

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka penelitian

III. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel



Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data pertumbuhan ekonomi selama periode 2013 - 2021. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data time series selama periode 2013 - 2021, yaitu sebanyak 36.

Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).

Variabel Operasional

Dalam penelitian ini ada dua variable bebas (X_1 : Inflasi), (X_2 : Suku Bunga) dan satu variable terikat (Y: Pertumbuhan Ekonomi)

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2018) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Uji yang digunakan yakni : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2017) uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

(Ghozali, 2017) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018).

d. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2016) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya.

Analisa Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya dua atau lebih (X_1 , X_2) terhadap variabel dependen (Y). (Lutfi, 2012).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
A = Konstanta
 β = Koefisien dari Variabel bebas (x)
 X_1 = Inflasi
 X_2 = Suku Bunga

Pengujian Hipotesis

a. Uji F



Uji Fhitung dilakukan untuk mengetahui apakah secara serempak variabel bebas mempunyai pengaruh positif signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Model hipotesis yang digunakan dalam uji Fhitung ini adalah:

- 1) $H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$ artinya diduga tidak ada pengaruh antara inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) $H_0 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$ artinya diduga ada pengaruh antara inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat dikatakan signifikan, yaitu terdapat pengaruh antara variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikatnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2018) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Uji yang digunakan yakni : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2017:) uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang dianggap baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	1.59056044
Most Extreme Differences	Absolute	0.136
	Positive	0.113
	Negative	-0.136
Test Statistic		0.136
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.091 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- a) Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal.
- b) Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian pada table spss di atas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, karena memiliki nilai signifikansi Asymp. Sig. (2 - tailed) sebesar 0,091 yang mana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas



(Ghozali, 2017) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi ini ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai toleransi dan Variance inflation factor (VIF).

Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah :

a) Melihat nilai tolerance: jika nilai Tolerance lebih besar dari $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi

b) Jika nilai tolerance lebih kecil dari $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Melihat nilai VIF (variance Inflation factor) adalah :

a) Jika nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi

b) Jika nilai VIF $> 10,00$ maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Inflasi (X1)	0.929	1.077
	Suku Bunga (X2)	0.929	1.077

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan uji multikolinearitas diketahui nilai tolerance sebesar 0,929 dan nilai tersebut lebih besar dari $> 0,10$, sehingga dapat diartikan $0,929 > 0,10$ sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Diketahui nilai VIF sebesar 1,077, nilai tersebut lebih kecil $< 10,00$ maka dapat diartikan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas adalah :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah dalam uji heterokedastisitas

2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heterokedastisitas.

Tabel 4

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.087	1.588		1.944	0.060
	Inflasi (X1)	-0.022	0.245	-0.016	-0.089	0.930
	Suku Bunga (X2)	-0.156	0.133	-0.206	-1.169	0.251

a. Dependent Variable: RES2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada kolom nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi



Menurut (Ghozali, 2016) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya.

Dasar pengambilan keputusan dalam autokorelasi Durbin Watson :

- $d < d_l$ atau $d > 4 - d_l$ terdapat autokorelasi
- $d_u < d < 4 - d_u$ tidak terdapat autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.291 ^a	0.084	0.029	1.63805	2.303

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflasi

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian Durbin Watson maka penelitian ini dinyatakan tidak terjadi autokorelasi, karena didasari pengambilan keputusan yang telah terpenuhi yakni $d_u < d < 4 - d_u$ atau $1,5872 < 2,303 < 2,4128$.

Analisis Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Tabel 6
Hasil Uji Signifikan Parsial (uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-2.423	2.548		-0.951	0.348
	Inflasi (X1)	-0.529	0.394	-0.232	-1.344	0.188
	Suku Bunga (X2)	0.306	0.214	0.247	1.430	0.162

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Hasil uji signifikan parsial (uji t) berdasarkan tabel 6. Dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = - 2,423 - 0,529 X1 - 0,306 X2 + e$$

Persamaan di atas mengandung makna bahwa :

- Konstanta sebesar 2,423. Artinya pengaruh pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sebesar 2,423 dengan asumsi variabel-variabel lain konstan.
- Koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0,529 artinya setiap ada kenaikan inflasi 1 % akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,529 dengan asumsi variabel - variabel lain konstan.
- Koefisien regresi variabel suku bunga sebesar 0,306 artinya setiap ada kenaikan suku bunga 1 % akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,306 dengan asumsi variabel - variabel lain konstan.

Pengujian Hipotesis



Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan.

Berdasarkan uji statistik t menunjukkan bahwa :

- Berdasarkan hasil penelitian diperoleh besarnya t_{hitung} sebesar $-1,344 < t_{tabel} 2,035$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, H_a ditolak. Artinya secara statistik tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Berdasarkan hasil penelitian diperoleh besarnya t_{hitung} sebesar $1,430 < t_{tabel} 2,035$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, H_a ditolak. Artinya secara statistik tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk membuktikan atau mengetahui pengaruh secara bersama - sama variabel bebas atau inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk membuktikan hipotesis ketiga (H_3) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.162	2	4.081	1.521	0.233 ^b
	Residual	88.546	33	2.683		
	Total	96.708	35			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

b. Predictors: (Constant), Suku Bunga (X_2), Inflasi (X_1)

Berdasarkan hasil Uji - F di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,233 > 0,05$ dan $F_{hitung} 1,521 < F_{tabel} 3,32$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan di antara inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai t_{hitung} inflasi sebesar $-1,344$, Sedangkan t_{tabel} diperoleh sebesar 2.035 , sehingga dapat dikatakan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun inflasi yang terjadi dapat membuat pertumbuhan ekonomi negatif. Penelitian ini didukung oleh teori (Putong, 2003) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki hubungan yang erat terhadap pertumbuhan ekonomi, karena jika inflasi berlangsung secara terus menerus akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi misalkan saja jika tingkat inflasi yang terlalu tinggi ketika harga-harga di pasaran melambung naik maka produsen akan sangat kesulitan untuk memasarkan produksi mereka. Alur perputaran uang dalam masyarakat akan melambat sehingga pendapatan masyarakat akan menurun dan ini menjadi indikasi dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori dari Iskandar Putong yang mengatakan inflasi dapat berakibat buruk sebab kenaikan harga yang terus menerus kemungkinan tidak dapat terjangkau oleh masyarakat. Ketika terjadi inflasi masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan.

Pengaruh Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara



Berdasarkan hasil output SPSS, diketahui bahwa nilai thitung suku bunga sebesar 1,430, Sedangkan t_{tabel} diperoleh sebesar 2,035, Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun suku bunga yang tidak terkendali dapat membuat pertumbuhan ekonomi negatif.

Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil Output menggunakan SPSS, diketahui fhitung sebesar 1,521, dan f_{tabel} sebesar 3,32 dapat di simpulkan bahwa $f_{hitung} < f_{tabel}$, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (inflasi, dan suku bunga) secara bersama - sama tidak secara signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebutkan dengan melihat besarnya koefisien inflasi adalah - 0,529. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.
- Suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebutkan dengan melihat besarnya - 0,306. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa jika suku bunga naik maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.
- Pengujian secara simultan inflasi dan suku bunga melalui uji F dengan nilai signifikan hal ini ditunjukkan dengan perolehan f_{hitung} sebesar 1,521 dan F_{tabel} sebesar 3,32 dimana $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu $1,521 < 3,32$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa inflasi dan suku bunga tidak secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran

- Pemerintah sebaiknya membuat atau mendorong para pengusaha untuk meningkatkan hasil produksinya. Serta melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
- Penelitian ini menjadi bahan masukan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam variabel - variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- Investor diharapkan dapat mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga dalam melakukan investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. G. Pengaruh Pdb, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013–2020 (Bachelor's thesis, Fakultas feb. uin jakarta). Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. sumut.bps.go.id. Diakses tahun 2022.
- Bank Indonesia. www.bi.go.id. Diakses tahun 2022.
- Basriwijaya, K. M. Z., & Maryoni, H. S. (2015). Pengaruh investasi, inflasi, suku bunga dan tingkat upah terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(2), 89-96.
- Boediono, 2000. *Ekonomi Makro*. BPFE UGM Yogyakarta.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (2000).
- Damanik, D., & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 71-81.
- Eliza, G. (2022). *Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tiga Kota di Provinsi Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- International Edition, Singapore. Keempat: Lembaga Penerbit FE UI.
- Kalsum, U. (2017). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 163065.



- Lubis, H. H. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Hutabarat, E. S. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2019.
- Jaya, T. J., & Kholilah, K. (2020). Effect of gross domestic regional bruto, provincial minimum wage, and investment on labor absorption. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 9(3), 236-249.
- Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, 2010. *Economics*. Nineteenth Edition.
- Pawer Darasa Panjaitan, Elidawaty Purba, & Darwin Damanik. (2021). Pengaruh Jumlah Uang Beredar Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 18 – <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.117>
- Pratiwi, Nabila Mardiana Dkk. (2015). “Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar, Terhadap Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2013”. *Jurnal. Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 26 No. 2 September 2015.
- Purba, D. S., & Tarigan, V. (2021). Analisis Tingkat Inflasi Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 1-9
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 62–74. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.336>
- Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala (2008). *Teori Ekonomi Makro*.
- Rahmatullah, M., Amang, B., & Zakaria, J. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Global*, 1(2), 153 - 164.
- Septriani, R. A. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat Pada Periode 2013 - 2020.
- Sriwahyuni, A., Nainggolan, P., & Sinurat, A. (2020). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Sumatera Utara. *Ekuilnomi : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 60–72
- Sukirno, Sadono. (2012). “Makroekonomi Teori Pengantar”. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah. 2013. “Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (Edisi 6)”. Penerbit : UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 135-148

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PEMATANGSIANTAR**

¹Jos Martin Simanjuntak, Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Simalungun

e-mail : josmartin@gmail.com

²Eva Sriwiyanti, Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Simalungun

e-mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³Wico Jontarudi Tarigan, Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Simalungun

e - mail : icol180285@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada penyajian laporan keuangan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kota Pematangsiantar. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data internal, bersifat primer. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan dengan mengarah kepada Standar Akuntansi Pemerintah di pemerintah pusat maupun daerah. Tehnik Analisis Data dengan mengumpulkan data laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Melakukan analisis laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP No 71 Tahun 2010) dengan fakta yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Hasil analisisnya penelitian tentang laporan keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar yang berupa realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang di lakukan oleh Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah namun sementara itu masih ada laporan keuangan yang belum di sajikan di laporan keuangan tahunan seperti laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas karena perlu di tambahkan agar lengkap dan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Akrua, Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Government Accounting Standards (SAP) in the presentation of financial statements at the Public Works and Spatial Planning office in the city of Pematangsiantar. This research method is descriptive qualitative. The data sources used in this study are internal data sources, primary. This type of research data is qualitative data, with the Application of Government Accounting Standards, namely PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards in Indonesia, it is mandatory to submit and compile financial statements by referring to Government Accounting Standards in the central and regional governments. Data Analysis Techniques by collecting financial report data at the Public Works and Spatial Planning Office of Pematangsiantar City. Analyze financial statements in accordance with Government Accounting Standards (PP No. 71 of 2010) with facts in the Public Works and Spatial Planning Office of Pematangsiantar City. The results of the analysis research on the financial statements of the Pematangsiantar City PUPR Office in the form of budget realization, balance sheets, operational reports, reports on changes in equity and notes to financial statements carried out by the Pematangsiantar City PUPR Office are in accordance with PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards but in the meantime there are still financial statements that have



not been presented in the annual financial statements such as the Excess Budget Balance report and Cash Flow Statement because needs to be added to be complete and in accordance with PP No. 71 of 2010.

Keywords: Government Accounting Standards, Accruals, Financial statements

I. PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lingkungan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya SAP juga akan terwujud *good governance*, yang dapat melaksanakan tugas administrasinya sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan sehingga terbentuk sistem yang tepat.

Sektor publik sering dinilai sebagai objek pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu rugi. Beberapa konsep pengelolaan sektor publik yang mempunyai tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam mengukur kinerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dan melaksanakan struktur manajemen pemerintahannya yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang begitu baik. Salah satu cara untuk menilai kinerja akuntabilitas tersebut adalah dengan dilakukannya reformasi anggaran sektor publik. Tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak berhasil dan tidak mempunyai tujuan yang tepat pada kinerja dapat menggagalkan rencana - rencana yang sudah disusun.

Kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi permasalahan yang penting untuk di bicarakan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Banyak penemuan kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi perbincangan yang perlu dikaji lebih dalam. Ini bisa merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya pihak internal, serta kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi yang menjadikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan ini sudah dibuktikan oleh opini *disclaimer* di beberapa instansi di Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* dilakukan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur audit pada beberapa pos yang disediakan. Rendahnya kualitas laporan keuangan itu disebabkan penyusunan laporan keuangannya yang tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah, penyelenggara internal yang belum memadai dan kurangnya kinerja staf akuntansi yang ada.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Pematangsiantar merupakan salah satu instansi di pemerintahan yang harus melakukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Sebagai instansi pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematangsiantar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber dana dalam melakukan kegiatan pemerintah. Maka dari itu untuk membentuk transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematangsiantar juga harus melakukan pelaporan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut berdasarkan aturan yang berlaku yaitu dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010.

Dalam mengatasi hal itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pematangsiantar harus mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada penyajian laporan keuangan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kota Pematangsiantar?” Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan Pemerintah Daerah dan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada penyajian laporan keuangan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Pematangsiantar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah

Perkembangan Tahap Awal

Penerapan akuntansi pemerintah sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Pada *system* pencatatan ini menurut (Halim, 2004) pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Setelah melakukan Reformasi Pemerintah melakukan pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pada Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah yang meliputi laporan realisasi Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selanjutnya ditetapkanlah Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Undang - Undang tersebut disebutkan bahwa Akuntansi Keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar akuntansi Pemerintah yang berlaku baik pada pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai bentuk tanggungjawab pengelolaan keuangan pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkan SAP ini. Oleh karena itu, sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap, mau tak mau pemerintah harus beralih kepada *system* pencatatan *double entry*, pada *system* ini menurut (Halim, 2004) pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali dalam sisi debet dan sisi kredit. Tidak hanya itu saja, pada SAP basis ini pencatatan yang digunakan adalah basis transisi yaitu basis kas menuju akrual yang diistilahkan basis *cash towards accrual*.

Semenjak disusunnya laporan keuangan secara lengkap oleh Pemerintah Daerah yaitu mulai tahun 2006 lalu, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI), berdasarkan laporan audit BPK - RI tersebut, masih sangat sedikit Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini adalah perkembangan opini LKPD dari tahun 2006 - 2008 :

Tabel 1

Perkembangan opini LKPD

LKPD	WTP	WDP	TW	TMP
2006	4	326	28	106
2007	3	283	58	122
2008	8	217	21	47

Sumber : LHPS 1 Tahun 2009, (BPK, 2009) per 31 2009.

WDP = Wajar Dengan Pengecualian
TW = Tidak Wajar
TMP = Tidak Memberikan Pendapat

Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapat opini WTP dari BPK-RI, dan nyata dihadapi banyak instansi pemerintah, baik dipusat maupun di daerah, adalah kelangkaan sumber daya manusia aparatur (kelangkaan sarjana akuntansi) yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan Negara/daerah.

Perkembangan Tahap Kedua



Setelah kurang lebih lima belas tahun sudah berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 oktober 2010 di keluarkan Peraturan Pemerintah NO 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Karena dikeluarkannya peraturan tersebut, dimulailah perkembangan tahap kedua penerapan akuntansi pemerintah. Pada SAP berbasis akrual ini, ada perbedaan komponen laporan keuangan antara PP No24/2005 dengan PP No71/2010.

Tabel 2

Perbedaan Komponen Laporan PP No24/2005 dan PP No71/2010

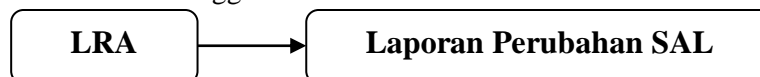
PP No24/2005	PP No 71/2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok :	Komponen Laporan Keuangan Pokok :
1. Neraca	A. Laporan Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Lapooran Arus Kas	2. Laporan Peubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
4. Catatan atas Lapoorann Keuangan	B. Laporan Finansial
Laporan yang bersifat optional:	1. Neraca
a. Laporan Kinerja Keuangan (LKK)	2. Laporan Operasional (LO)
b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	3. Laporan Arus Kas (LAK)
c. Catatan atas Laporan Keuangan.	4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Sumber : PP No.71 tahun 2010

2. Hubungan antar laporan keuangan atas laporan
a. Laporan Finansial



- b. Laporan Pelaksanaan Anggaran



3. Basis Pencatatan yang digunakan pada SAP lama yaitu basis kas menuju akrual, sedangkan SAP baru, basis yang digunakan yaitu basis akrual.
4. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan Neraca dan Laporan Operasional menggunakan basis akrual.

Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara transparan akuntabel. Buku ini mencoba memberikan pemahaman dasar tentang teknik akuntansi pemerintahan daerah khususnya daerah kabupaten dan kota, bagi mahasiswa akuntansi yang mendalami akuntansi pemerintahan dan praktisi akuntansi pemerintahan daerah.

Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (PP No71 Tahun 2010).

Strategi Implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Cara pertama yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap-tahap, karena SAP berbasis akrual ini dilakukan secara bertahap dengan berdampingan dengan penyiapan sumber daya manusianya (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan langsung oleh kementerian atau lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus enerapkan SAP berbasis akrual. Penerapan penuh di semua kementerian atau lembaga pada tahun 2015.

- b. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara sekaligus karena SAP berbasis akrual secara sekaligus di seluruh kementerian atau lembaga. Berikut ini Perkembangan Strategi penerapan SAP berbasis akrual secara Bertahap :

Tabel 3

Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual secara Bertahap

2010	1. Mengembangkan <i>Framework</i> Akuntansi Berbasis Akrual. 2. Penerbitan SAP Berbasis Akrual. 3. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual
2011	1. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail <i>requirement</i>) 2. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi 3. Pengembangan Kapasitas SDM
2012	1. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) 2. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013	1. Ploting beberapa Kementerian/Lembaga (KL) dan Bendahara Umum Negara (BUN) 2. <i>Review</i> , Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK 3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014	1. <i>Pararel Run</i> dan Konsolidasi seluruh LK 2. <i>Review</i> , Evaluasi dan konsolidasi seluruh LK 3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	1. Implementasi penuh 2. Pengembangan Kapsitas SDM (lanjutan)

Sumber : KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP

Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus merujuk pada ketentuan-ketentuan Pemerintah, dalam hal ini, Peraturan Pemerintah No. 71 pada 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Meningkatkan Penggantian Peraturan Pemerintah 2 / 2005, termasuk *Acere's Cash Establishment* untuk standar akuntansi pemerintah. Mencapai lima Anggaran Pemerintah Daerah pada 2013 menggunakan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah pada 2 /2005. Perbedaan dasar dalam Peraturan Pemerintah No. 71 pada tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 berada dalam transaksi dan jenis laporan keuangan.

Menurut peraturan Republik Indonesia No. 71 pada tahun 2010 pada standar akuntansi pemerintah (Pasal 1: 1), standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi terkait dengan pelatihan dan penawaran dan tingkat informasi keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah harus digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan kepada Komite Independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), SAP telah dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Standar Akuntansi Terperinci di Pemerintah dalam Laporan Keuangannya.

Keuangan untuk menciptakan tata kelola yang baik Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk yang merupakan aspek penting yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam pelaporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah sangat perlu dikembangkan untuk meningkatkan praktik akuntansi keuangan dalam pengaturan organisasi pemerintah (Midiastuty, Puspa & Machfoedz, 2003).

Standar akuntansi pemerintahan digunakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan SAP yang berlaku di Indonesia, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh karena itu, dampak peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah akan terletak pada Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (Febrian, 2005). Dibawah ini ada delapan prinsip yang digunakan pada akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah : (a) Basis Akuntansi, (b) Prinsip nilai perolehan, (c) Prinsip Realisasi, (d) Prinsip substansi mengungguli formalitas, (e) Prinsip periodisitas, (f) Prinsip konsistensi, (g) Prinsip pengungkapan penuh, (h) Prinsip pengajaran wajar.

Laporan Keuangan

Menurut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010) laporan keuangan adalah pernyataan tempat atau posisi dalam keuangan dan transaksi atau hasil keuangan yang dilakukan oleh entitas pelaporan terstruktur. Laporan keuangan Pemerintah tidak disampaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna, tetapi untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan.

Pengertian lain dari laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disusun atau disajikan dalam berbagai cara, misalnya, laporan arus kas atau laporan arus kas, catatan dan laporan lainnya serta penjelasan. dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan (IAI, 2007).

Dengan diterbitkannya PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia, tujuan penyampaian laporan keuangan secara keseluruhan adalah untuk menyampaikan informasi tentang status atau lokasi keuangan, kinerja keuangan, dan kinerja keuangan pembukuan, surplus anggaran, kas aliran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas. Laporan keuangan lebih banyak digunakan untuk membandingkan pendapatan, pengeluaran, transfer dan hibah dengan anggaran yang telah ditentukan, menilai posisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelapor, serta membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan akan berguna jika laporan keuangan memenuhi standar kualitatif. (Gitman, 2002). Menurut (Mardiasmo, 2004) secara umum tujuan dan fungsi pelaporan keuangan sektor publik adalah (1) Kepatuhan dan penyelenggaraan, (2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, (3) Perencanaan dan informasi otorisasi, (4) Kelangsungan organisasi, (5) Hubungan masyarakat, (6) Sumber fakta dan gambaran.

Peranan dan Tujuan Laporan keuangan

Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah siap menghadirkan informasi terkait tentang semua transaksi dan posisi keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah selama periode referensi (Munawir, 2010). Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan implementasi pendapatan dan pengeluaran untuk penggunaan anggaran dengan peraturan dan penilaian kondisi keuangan, evaluasi efektif dan efektivitas otoritas lokal dan berkontribusi pada tekad keunggulan saya untuk ketentuan peraturan (Munawir, 2010).

Tujuan Laporan Keuangan

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyampaikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan saat menilai akuntabilitas dan saat membuat ketentuan ekonomi, sosial dan politik yang baik dengan (1) memberikan informasi apakah biaya seluruh pengeluaran sudah untuk menerima periode yang sedang berjalan, (2) apakah sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan ataupun di tentukan pada peraturan perundang-undangan dengan memperoleh sumber daya ekonomi dan posisinya, (3) tentang kegiatan pemerintah daerah dengan hasil yang diperoleh dari segi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan. (4) tentang cara menangani pemerintah daerah yang sangat lengkap tentang semua kegiatan dan memenuhi kebutuhan uang mereka. (5) tentang keuangan pemerintah daerah dan sumber pendapatan bersyarat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pendapatan pajak dan pinjaman. (6) mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, baik yang meningkat maupun yang menurun, sebagai akibat dari tindakan yang telah atau sedang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, ada beberapa bagian yang tertulis dalam suatu set laporan keuangan pokok yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sitorus, Kalangi, & Walandouw, 2015) tentang Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dengan



menggunakan analisis kualitatif menunjukkan bahwa DPPKBMD selaku pengelola keuangan daerah Kota Tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP berbasis akrual, Selain itu peran DPPKBMD sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki. Sebaiknya pimpinan Kota Tomohon menyiapkan SDM yang tepat dibidang akuntansi agar hambatan - hambatan yang terjadi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dapat diminimalisir.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Langelo, Saerang & Alexander, 2015) tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung dengan menggunakan analisis kualitatif menunjukkan bahwa hasil penelitian pada pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

(Niu, Karamoy & Tangkuman, 2014) melaksanakan penelitian tentang Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu dengan menggunakan analisis deskriptif menunjukkan bahwa hasil penelitian ini yaitu DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran sedangkan SAP berbasis akrual menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang *akuntabel* dan transparan.

(Ranuba, Pangemanan & Pinatik, 2015) meneliti tentang Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan dengan menggunakan metode kualitatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPKPA selaku pengelola keuangan daerah kabupaten minahasa selatan sudah siap terhadap penerapan SAP berbasis akrual, hanya saja peran DPKPA sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu SDM untuk pengelola keuangan yang ada di setiap SKPD-SKPD tidak memiliki pendidikan dasar dibidang akuntansi. Sebaiknya pimpinan pada Pemda menyiapkan Sumber Daya Manusia dibidang akuntansi di setiap SKPD. Agar hambatan - hambatan yang terjadi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dapat diminimalisir.

Kerangka Pemikiran

Keuangan daerah perlu dikelola secara tertib dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi, efektifitas dan ekonomi. Fakta bahwa keuangan sektor adalah subjek dalam akuntansi sektor publik (Pemerintah) di mana data akuntansi sektor publik digunakan untuk memberikan informasi tentang akuntabilitas, transparansi, transaksi bisnis, ekonomi dan keuangan yang terkait dengan pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya.

Ada kerangka pemikiran secara skematik yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota
Pematangsiantar



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah laporan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data internal, bersifat primer. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan dengan mengarah kepada Standar Akuntansi Pemerintah di pemerintah pusat maupun daerah.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang telah dijalankan dengan cara menelusuri dan mendapat data laporan keuangan yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Teknik Analisis Data dengan mengumpulkan data laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. Melakukan analisis laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP No 71 Tahun 2010) dengan fakta yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 Tahun 2007) Kepala Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada OPD. Laporan Keuangan OPD tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran ini menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dengan realisasinya dan serta perbandingannya dengan Tahun Anggaran sebelumnya, hal ini mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja pada tahun berjalan. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar, realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah

sebesar Rp. 66.350.000,- atau mencapai 66,35 % dari total yang dianggarkan. PAD tidak tercapai dikarenakan rendahnya nilai pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar Tahun 2021 dimana kebanyakan penyewa alat berat adalah kontraktor di Kota Pematangsiantar. Disamping itu, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki juga kurang memadai dan tidak bisa dioptimalkan lagi. Realisasi belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 50.153.036.129,00 atau mencapai 94,85% dari total yang dianggarkan. Hal - hal yang mendasari tingkat ketercapaian mencapai 94,85 % adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 5.630.150.935,00
Belanja Barang dan Jasa : Rp. 14.624.179.042,00
Belanja Modal : Rp. 29.898.706.152,00

Tabel 4

Laporan Realisasi Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	100.000.000,00	66.350.000,00	(33.650.000,00)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1 1	Pendapatan Pajak Daerah			
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000,00	66.350.000,00	(33.650.000,00)
1 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1 2	PENDAPATAN TRANSFER			
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum			
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus			
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus (DID)			
1 2 2 2	Dana Penyesuaian			
1 2 3	Transfer Pemerintah Provinsi			
1 2 3 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
1 2 3 2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
1 3 1	Pendapatan Hibah			
1 3 2	Pendapatan Dana Hibah			
1 3 3	Pendapatan lainnya			
	Jumlah			
2	BELANJA			
2 1	BELANJA OPERASI			
2 1 1	Belanja Pegawai	5.862.734.733,00	5.630.150.935,00	(232.583.798,00)
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	15.776.164.841,00	14.624.179.042,00	(1.151.985.799,00)
2 1 3	Belanja Bunga			
2 1 4	Belanja Subsidi			
2 1 5	Belanja Hibah			
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial			
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan			
2 2	BELANJA MODAL			
2 2 1	Belanja Tanah			
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	380.607.400,00	365.712.000,00	(14.895.400,00)
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.099.968.773,00	998.981.550,00	(100.987.223,00)
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.757.113.767,00	28.534.012.602,00	(1.223.101.165,00)
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2 2 6	Belanja Aset Lainnya			
2 3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2 3 1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah			

NOMOR URUT		URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	
2	4	TRANSFER			
2	4	1 TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA			
2	4	1 1 Bagi Hasil Pajak			
2	4	1 2 Bagi Hasil Retribusi			
2	4	1 3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
		Jumlah			
		SURFLUS/DEFISIT			
3		PEMBIAYAAN			
3	1	PENERIMAAN DAERAH			
3	1	1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3	1	2 Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3	1	4 Penerimaan Pinjaman Daerah			
3	1	5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3	1	6 Penerimaan Piutang Daerah			
		Jumlah			
3	2	PENGELUARAN DAERAH			
3	2	1 Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3	2	3 Pembayaran Pokok Utang			
3	2	4 Pemberian Pinjaman Daerah			
		Jumlah			
		Pembiayaan Neto	52.876.589.514,00	50.153.036.129,00	(2.723.553.385,00)
3	3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	52.776.589.514,00	50.086.686.129,00	(2.689.903.385,00)

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar, realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 61.300.000,- atau mencapai 122,6 % dari total yang dianggarkan. PAD tidak tercapai karena masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan di Kota Pematangsiantar dan kurangnya sarana dan prasarana. Realisasi belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 67.996.338.497,61 atau mencapai 94,10% dari total yang dianggarkan. Hal-hal yang mendasari tingkat ketercapaian mencapai 94,10% adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 5.978.988.692,00
Belanja Barang : Rp. 7.795.277.951,00
Belanja Modal : Rp. 54.222.071.854,61

Tabel 5
Laporan Realisasi Anggaran 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	50.000.000,00	61.300.000,00	11.300.000,00
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah			
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah	50.000.000,00	61.300.000,00	11.300.000,00
1 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1 2	PENDAPATAN TRANSFER			
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum			
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus			
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
1 2 2 1	Dana Otonomi Khusus (DID)			
1 2 2 2	Dana Penyesuaian			
1 2 3	Transfer Pemerintah Provinsi			
1 2 3 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
1 2 3 2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
1 3 1	Pendapatan Hibah			
1 3 2	Pendapatan Dana Hibah			
1 3 3	Pendapatan lainnya			
	Jumlah			
2	BELANJA			
2 1	BELANJA OPERASI			
2 1 1	Belanja Pegawai	6.072.249.087,00	5.978.988.692,00	(93.260.395,00)
2 1 2	Belanja Barang	8.709.824.342,50	7.795.277.951,00	(914.546.391,50)
2 1 3	Belanja Bunga			
2 1 4	Belanja Subsidi			
2 1 5	Belanja Hibah			
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial			
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan			
2 2	BELANJA MODAL			
2 2 1	Belanja Tanah			
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	445.990.000,00	443.113.500,00	(2.876.500,00)
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	499.630.000,00	499.254.000,00	(376.000,00)
2 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.533.320.912,61	53.279.704.354,61	(3.253.616.558,00)
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
2 2 6	Belanja Aset Lainnya			
2 3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2 3 1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah			

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
2 4	TRANSFER			
2 4 1	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA			
2 4 1 1	Bagi Hasil Pajak			
2 4 1 2	Bagi Hasil Retribusi			
2 4 1 3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
	Jumlah			
	SURFLUS/DEFISIT			
3	PEMBIAYAAN			
3 1	PENERIMAAN DAERAH			
3 1 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah			
3 2	PENGELUARAN DAERAH			
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang			
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah			
	Pembiayaan Neto	72.261.014.342,11	67.996.338.497,61	(4.264.675.844,50)
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	72.211.014.342,11	67.935.038.497,61	(4.275.975.844,50)

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar.

Penjelasan : Realisasi Anggaran di tahun 2021 yang telah di anggarkan mengalami penurunan di bandingkan di Anggaran tahun 2020. Menurut dari PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Realisasi Anggaran sudah sesuai dengan PP No71 tahun 2010 yang sebagaimana pos - pos Realisasi Anggaran tersebut ada di bawah ini.

1. Neraca

Laporan Neraca PUPR Kota Pematangsiantar menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dengan sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi neraca disusun oleh entitas - entitas akuntansi yang kemudian digabung oleh entitas pelaporan. Berikut ini tabel laporan neraca.



Tabel 6
Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO (1)	URAIAN (2)	NILAI (Rp)	
		TAHUN 2021 (3)	TAHUN 2020 (4)
A	ASET		
I	ASET LANCAR		
	1 Kas di Kas Daerah		
	2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	3 Kas di Bendahara Penerimaan		
	4 Investasi Jangka Pendek		
	5 Piutang Pajak		
	6 Piutang Retribusi		
	7 Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara		
	8 Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah		
	9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
	10 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
	11 Bagian Lancar Pinjaman kepada Lembaga Internasional		
	12 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	13 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		
	14 Piutang Lainnya	44.844.000,00	
	15 Persediaan	394.450,00	
	JUMLAH ASET LANCAR	45.238.450,00	0
II	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	2 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		
	3 Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
	4 Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
	5 Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Otonom		
	6 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan		
	7 Investasi Permanen Lainnya		
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
III	ASET TETAP		
	1 Tanah		
	2 Peralatan dan Mesin	365.712.000,00	443.113.500,00
	3 Gedung dan Bangunan	998.981.550,00	499.254.000,00
	4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.534.012.602,00	53.279.704.354,61
	5 Aset Tetap Lainnya		
	6 Konstruksi dalam Pengerjaan	395.519.000,00	15.419.268.677,90
	7 Akumulasi Penyusutan		
	JUMLAH ASET TETAP	30.294.225.152,00	69.641.340.532,51
IV	DANA CADANGAN		
	1 Dana Cadangan		
	JUMLAH DANA CADANGAN		
V	ASET LAINNYA		
	1 Tagihan Penjualan Angsuran		
	2 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)		1.931.126.538,43
	3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)		
	4 Aset Tak Berwujud		
	5 Aset Lain-lain		
	JUMLAH ASET LAINNYA	-	1.931.126.538,43
	JUMLAH ASET	30.294.225.152,00	71.572.467.070,94

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
B	KEWAJIBAN		
I	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	1 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	2 Hutang Bunga		
	3 Hutang Pajak		
	4 Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang		
	5 Hutang kepada Pemda otonom Lainnya		
	6 Pendapatan Diterima Dimuka		
	7 Hutang Jangka Pendek Lainnya	2.289.280.367,50	5.387.611.698,40
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.289.280.367,50	5.387.611.698,40
II	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	1 Hutang Kepada Pemerintah Pusat		
	2 Hutang Kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya		
	3 Pinjaman Luar Negeri		
	4 Pinjaman Dalam Negeri		
	5 Hutang Jangka Panjang Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.289.280.367,50	5.387.611.698,40
C	EKUITAS DANA		
I	EKUITAS DANA LANCAR		
	1 Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2.689.903.385,00	4.275.975.844,50
	2 Pendapatan Yang Ditangguhkan		
	3 Cadangan Piutang		
	4 Cadangan Persediaan		
	5 Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang J. Pendek	2.289.280.367,50	5.387.611.698,40
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	4.979.183.752,50	9.663.587.542,90
II	EKUITAS DANA INVESTASI		
	1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		
	2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap	30.294.225.152,00	71.572.467.070,94
	Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain		
	4 Dana yang disediakan untuk Pembayaran Hutang J. Panjang		
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	30.294.225.152,00	71.572.467.070,94
III	EKUITAS DANA CADANGAN		
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		
	JUMLAH EKUITAS DANA	35.273.408.904,50	81.236.054.613,84
	JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA	35.273.408.904,50	81.236.054.613,84

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

Penjelasan :

Menurut dari PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Neraca sudah sesuai dengan PP No71 tahun 2010 yang sebagaimana pos - pos Neraca tersebut ada di bawah ini.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas PUPR Kota Pematangsiantar menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan Laporan Operasional, beban, transfer, dan pos - pos luar biasa.

Tabel 7
Laporan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEGIATAN OPERASIONAL		
A	PENDAPATAN OPERASIONAL		
	1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	66.350.000,00	61.300.000,00
B	BEBAN OPERASIONAL		
	1 Beban Pegawai	5.630.150.935,00	151.179.000,00
	2 Beban Persediaan	109.605.566,00	3.153.762.875,00
	3 Beban Jasa	2.736.165.667,00	2.435.679.367,00
	4 Beban Pemeliharaan	11.483.532.100,00	1.874.244.876,00
	5 Beban Perjalanan Dinas	294.875.709,00	251.566.333,00
	6 Beban Penyusutan dan Amortisasi		
C	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	20.187.979.977,000	7.805.132.451,000

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar

Penjelasan:

Menurut dari PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Laporan Operasional sudah sesuai dengan PP No71 tahun 2010 yang sebagaimana pos-pos Laporan Operasional tersebut ada di bawah ini.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas PUPR Kota Pematangsiantar menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 8
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	
		TAHUN 2021	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
	EKUITAS AWAL		
	SURPLUS (DEFISIT) LO	20.187.979.977,00	7.805.132.451,00
	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		
	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		
	EKUITAS AKHIR	20.187.979.977,00	7.805.132.451,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar.

Menurut dari PP No 71 tahun 2010 laporan keuangan dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Laporan Perubahan Ekuitas sudah sesuai dengan PP No71 tahun 2010 yang sebagaimana pos - pos Laporan Perubahan Ekuitas tersebut ada di bawah ini.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*), sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar yang berasal dari dana APBD dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 52.876.589.514,00. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

b. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Secara umum realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar sebesar Rp 66.350.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 66,35%. Pendapatan tersebut diperoleh dari Retribusi Daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi mencakup Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 5.862.734.733,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 5.630.150.935,00 atau sebesar 96,03%. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 15.776.164.841,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 14.624.179.042,00 atau sebesar 92,70%. Belanja Modal diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan - kegiatan dan program. Pada Tahun. Anggaran 2021, belanja modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 31.237.689.940,00 dan terealisasi sebesar Rp 29.898.706.152,00 atau 95,71% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9

Target dan Realisasi Belanja Langsung TA 2021

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.607.400,00	365.712.000,00	96,09
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.099.968.773,00	998.981.550,00	90,82
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.757.113.767,00	28.534.012.602,00	95,89
	Jumlah	31.237.689.940,00	29.898.706.152,00	95,71

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar.

c. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar selama tahun 2021 antara lain disebabkan :

- Selisih harga antara Standar Saruan Harga Pemerintah dengan realisasi belanja;
- Kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas;
- Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia;
- Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat;

e) Jadwal penyusunan P.APBD Kota Pematangsiantar yang terlambat dari semestinya.

d. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah (retribusi pemakaian kekayaan daerah alat berat). Penerimaan Retribusi Daerah selama periode ini adalah sebesar Rp. 66.350.000,00 atau 66,35% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 5.050.000,00 atau 7,61%.

2. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip - prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan - kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Kelompok dan Jenis Belanja

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5= (4/3)x100%
	BELANJA OPERASI			
511	Belanja Pegawai	Rp. 5.862.734.733,00	Rp. 5.630.150.935,00	96,03%
512	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 15.776.164.841,00	Rp. 14.624.179.042,00	92,70 %
	Jumlah	Rp. 21.638.899.574,00	Rp. 20.254.329.977,00	93,60%
	BELANJA MODAL			
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 380.607.400,00	Rp. 365.712.000,00	96,09 %
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 1.099.968.773,00	Rp. 998.981.550,00	90,82 %
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 29.757.113.767,00	Rp. 28.534.012.602,00	95,89 %
	Jumlah	Rp. 31.237.689.940,00	Rp. 29.898.706.152,00	95,71 %
	TOTAL	Rp. 52.876.589.514,00	Rp. 50.153.036.129,00	94,85%

Sumber: Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar.

e. Penjelasan atas Pos - Pos Neraca

1. Persediaan

Persediaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2021 ini tercatat sebesar Rp. 394.450,00. Kondisi ini berbeda dengan keadaan Persediaan Tahun Anggaran 2020 dimana tidak ada barang persediaan.

2. Aset Tetap

a) Tanah

Nilai aset tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada Akhir Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan nilai akhir Tahun Anggaran 2020 yang dicatat dengan nilai sebesar Rp. 720.306.807.783,00.

b) Peralatan dan Mesin.

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada akhir Tahun Anggaran 2021 dicatat sebesar Rp. 365.712.000,00. Hal ini

dicatat lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang dicatat sebesar Rp. 443.113.500,00.

c) Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada akhir Tahun Anggaran 2021 dicatat sebesar Rp. 998.981.550,00. Hal ini dicatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang dicatat dengan nilai sebesar Rp. 249.486.000,00.

d) Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Nilai Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada akhir Tahun Anggaran 2021 dicatat sebesar Rp. 28.534.012.602,00. Hal ini dicatat lebih rendah dibandingkan dengan akhir Tahun Anggaran 2020 yang dicatat sebesar Rp. 53.279.704.354,61.

e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada Akhir Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan nilai akhir Tahun Anggaran 2020 yang dicatat dengan nilai sebesar Rp. 3.500.000,-

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2021 ini dicatat sebesar Rp. 395.519.000,00. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp. 990.114.690,00.

g. Kewajiban

Kewajiban pada Tahun Anggaran 2021 ini dicatat sebesar Rp. 2.289.280.367,50. Jumlah ini mengalami penurunan sangat signifikan jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp. 5.387.611.698,40.

Pembahasan

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010

Dibawah ini adalah data yang telah di terapkan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar menurut PP No 71 tahun 2010 blum sepenuhnya siap, hal ini dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 11

Jenis Laporan Keuangan

No	Jenis Laporan Keuangan	Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Anggaran	✓	
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih		✓
3	Neraca	✓	
4	Laporan Operasional	✓	
5	Laporan Arus Kas		✓
6	Laporan Perubahan Ekuitas	✓	
7	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	

Berdasarkan tabel di atas laporan keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar tidak menyediakan laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang spesifik seperti laporan - laporan yang di atas melainkan langsung tercatat di Laporan Realisasi Anggaran di akhir yaitu SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Selain itu juga Laporan Arus Kas juga tidak di lampirkan di laporan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar, karena Kasubag Penyusun Program dan Keuangan mengatakan kalau laporan Arus Kas tidak di lampirkan di laporan Keuangan tahunan melainkan langsung di catat di Buku Kas Umum (BKU).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Realisasi Anggaran menyajikan laporan realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Didalam laporan realisasi



anggaran pendapatan dan belanja terdapat pos-pos sebagai berikut: pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, transfer dan pengeluaran daerah. Laporan Realisasi Anggaran Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

2. Neraca

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Neraca menyajikan informasi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir anggaran 2021. Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah mengkalifikasikan asetnya dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya serta telah mengklasifikasikan kewajibannya dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah membandingkan antara neraca tahun 2021 dengan tahun anggaran 2020. Pos - pos dari neraca Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

3. Laporan Operasional

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Laporan Operasional menyajikan pos-pos yaitu: Pendapatan LO, beban, surplus / defisit dari kegiatan operasional. Laporan Operasional Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos - pos yaitu: ekuitas awal, surplus / defisit - LO pada periode yang bersangkutan, koreksi - koreksi yang langsung menambah atau menurunkan ekuitas dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan PP No71 tahun 2010.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data laporan keuangan dari Dinas PUPR Kota Pematangsiantar bagian dari CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi yang harus diterapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pernyataan - pernyataan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual. Catatan atas Laporan Keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian tentang laporan keuangan Dinas PUPR Kota Pematangsiantar yang berupa realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang di lakukan oleh Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah namun sementara itu masi ada laporan keuangan yang belum di sajikan di laporan keuangan tahunan seperti laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas karena perlu di tambahkan agar lengkap dan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.

Kepada Dinas PUPR Kota Pematangsiantar sebaiknya melengkapi Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu PP No 71 tahun 2021 agar dengan adanya SAP juga akan terwujud *good governance*, yang dapat melaksanakan tugas administrasinya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran. Perlu dilakukan perekrutan sumberdaya manusia (SDM) di bidang akuntansi yang mempunyai spesialis dan kemampuan untuk membuat penyajian laporan keuangan, serta melakukan seminar dan pelatihan-pelatihan teknis untuk pegawai (SDM) agar bisa lebih memahami lagi mengenai penerapan PP No71 tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Erlina, Damanik, E. O. P. ., & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 79–96. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.127>
- Gitman, L. (2002). *Principles of Managerial Finance* (10th ed.). In Pearson.
- Harahap, S. S. (2009). *Teorit Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumk Aksara. In Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iramani dan Erie Febrian. (2005). Financial Value Added: Suatu Paradigma dalam Pengukuran Kinerja dan Nilai Tambah Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2010). PP Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 413.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Lubis, S. M. Y. (2019). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mardiasmo. (2004). Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah. In *Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah* (p. 3).
- Midiastuty, Pranata Puspa; Machfoedz, M. (2003). Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance Dan Indikasi Manajemen Laba. *SNA* 6, 24.
- Munawir, S. (2010). *Analisis laporan Keuangan Edisi keempat*. Yogyakarta: Liberty.
- Naibaho, Puteri Hoasi Perpetua. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat." (2018).
- Nasution, N. I. (2021). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Pematangsiantar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Nasution, D. A. D., & Barus, M. D. B. (2019). *MONOGRAF: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Niu, Fitria Ayu Lestari, Herman Karamoy, and Steven Tangkuman. "Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2.4 (2014).
- Nordiawan, Dedy dan Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Niu, Fitria Ayu Lestari, Herman Karamoy, and Steven Tangkuman. "Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2.4 (2014).
- Ranuba, Erlita DS, Sifrid Pangemanan, and Sherly Pinatik. "Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3.1 (2015).
- Rukhmana, T., Darwis, D., IP, S., Alatas, A. R., SE, M., Tarigan, W. J., ... & S ST, M. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika
- Saragi, R. U., Eva Sriwiyanti, & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

-
- Kabupaten Simalungun. Jurnal Ilmiah Accusi, 3(2), 132–149.
<https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.176>
- Sitorus, S., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. NO. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9-20
- Ulya, C., & Astuti, E. B. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal). *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2).
- Yunita, R. A. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua Sebagai Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

**ANALISIS MODAL KERJA DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA
PT XL AXIATA, Tbk YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

vitry_tarigan@yahoo.com

Marintan Saragih, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

marintan86.srg@gmail.com

Sri Martina, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

srिमartina999@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan modal kerja yang diukur melalui tingkat perputaran modal kerja, tingkat perputaran kas, tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang dalam meningkatkan profitabilitas? Tujuan penelitian ini ini untuk mengetahui pengelolaan modal kerja yang diukur melalui tingkat perputaran modal kerja, tingkat perputaran kas, tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang dalam meningkatkan profitabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan (*Annual report*) PT XL AXIATA Tbk yang dipublikasikan. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan modal kerja dan profitabilitas perusahaan di kategorikan dalam kondisi kurang baik, tetapi perlu adanya peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan rasio perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja dan *Return On Investment* belum memenuhi standar rasio rata - rata industri.

Kata kunci : Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, Return On Investment.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is how is the management of working capital measured through the level of working capital turnover, the level of cash turnover, the level of inventory turnover, the level of accounts receivable turnover in increasing profitability? The purpose of this study is to determine the management of working capital as measured through the level of working capital turnover, the level of cash turnover, the level of inventory turnover, the level of accounts receivable turnover in increasing profitability. The data used in this study is the financial report (Annual report) of PT. Lippo Cikarang Tbk published. The data analysis technique used is descriptive. The results of this study stated that the working capital and profitability of the company were categorized as not in good condition, but there was a need for improvement. This is indicated by the results of the calculation of the ratio of cash turnover, accounts receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover and Return On Investment do not meet the industry average ratio standard.

Keywords: Working Capital Turnover, Cash Turnover, Accounts Receivable Turnover, Inventory Turnover, Return On Investment.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan memiliki tujuan yang sama dari suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaan atau kesejahteraan pemilik, mempertahankan kelangsungan hidup dan mengupayakan untuk dapat berkembang. Keuntungan atau laba merupakan yang paling penting untuk



kelangsungan hidup perusahaan. Semakin tinggi perusahaan dalam pencapaian memperoleh laba semakin kuat perusahaan dalam menghadapi persaingan dimasa yang mendatang. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu disebut dengan Profitabilitas.

Penelitian ini menggunakan perusahaan jasa telepon dasar karena perkembangannya yang begitu pesat dan semakin besar menunjukkan tanda-tanda positif, sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembangan yang tinggi bagi investor dalam berinvestasi. Selain itu perusahaan penyedia layanan telepon dasar merupakan perusahaan dengan prospek yang cukup baik mengingat semakin pesatnya pertumbuhan pendapatan masyarakat. Semakin banyak investor yang berinvestasi maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT.XL AXIATA Tbk yang mencatat pendapatan sebesar Rp 447 miliar,

Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Atau dengan kata lain modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya (Kasmir 2018). Pengelolaan modal kerja yang tepat akan berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional ini akan berpengaruh pada pendapatan yang nantinya dikurangi dengan beban pokok penjualan dan beban operasional atau beban lainnya yang akan diperoleh profitabilitas perusahaan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Modal Kerja

Menurut (Kasmir, 2018) modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Atau dengan kata lain modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Biasanya modal kerja digunakan untuk beberapa kali kegiatan dalam satu periode.

Metode Menentukan Modal Kerja

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan harus dihitung secara cermat, sehingga mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya. Dalam praktiknya besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan sangat tergantung dari dua hal, yaitu (Kasmir, 2018) :

1. Besar kecilnya operasi pokok/penjualan, artinya makin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan modal juga makin besar, demikian pula sebaliknya apabila operasi pokok kecil, maka modal kerja juga besar.
2. Kecepatan perputaran modal kerja, artinya makin cepet berputar modal kerja maka kebutuhan modal kerja juga relatif besar, demikian pula sebaliknya makin lambat perputaran modal kerja maka kebutuhan modal kerja juga relatif kecil.

Kebutuhan modal kerja dihitung dengan cara metode saldo rata-rata adalah dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan perputaran modal kerja. Berikut ini rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Besarnya modal kerja} = \frac{\text{penjualan bersih}}{\text{perputaran modal kerja}}$$

Rumus yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja :

$$\text{Perputaran modal kerja} = \frac{\text{penjualan bersih}}{\text{modal kerja rata - rata}}$$

Atau

$$\text{Perputaran modal kerja} = \frac{\text{penjualan bersih}}{\text{modal kerja}}$$

Profitabilitas

Menurut (Hery, 2016) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

1. Hasil Pengembalian Investasi (Return On Investment)

Hasil pengembalian investasi adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. Hasil pengembalian investasi yang bernilai positif menunjukkan keuntungan, sedangkan jika bernilai negatif menunjukkan kerugian.

Hasil pengembalian investasi berperan penting untuk memberikan informasi mengenai ukuran keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi, sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Selain dapat memberikan informasi tentang profitabilitas, ROI juga dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, produksi, hingga penjualan dalam perusahaan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas investasi :

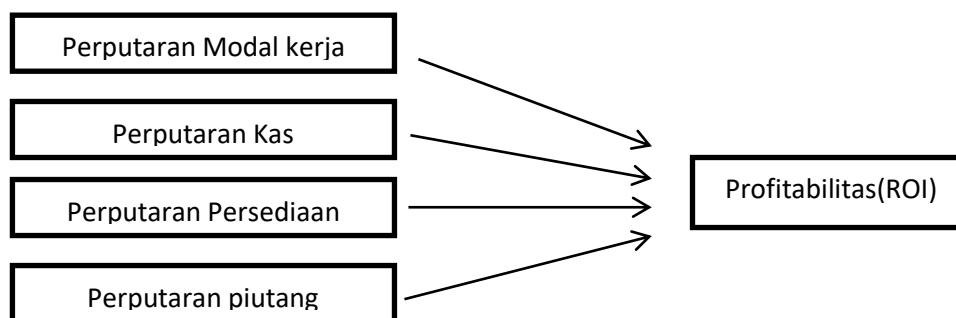
$$\text{Hasil Pengembalian Investasi} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asets}}$$

Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiono, 2013) Setelah sintesa atau kesimpulan sementara apat dirumuskan maka selanjutnya disusun kerangka berfikir. Kerangka berfikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berfikir yang assosiatif/hubungan maupun komperatif / perbandingan. Kerangka pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan factor - faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.

Variabel dalam penelitian ini adalah ROI, perputaran kas, perputaran persediaan dan perputaran piutang. Kerangka teoritis dibuat untuk memudahkan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya.

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis

III. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang go public di BEI periode 2017 - 2021. Karena penelitian ini menyangkut perusahaan *public*, maka data yang digunakan adalah laporan keuangan (*Annual report*) PT.XL AXIATA Tbk yang dipublikasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu dengan menjelaskan tabel - tabel dan angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Nilai Modal Kerja Bersih dan Penjualan Bersih Tahun 2017 - 2021

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Modal Kerja Bersih (Rp)	Penjualan Bersih (Rp)
2017	3.661.704.025.836	1.530.034.755.092	2.131.669.270.744	1.792.376.641.870
2018	4.283.677.477.706	1.140.995.759.536	3.142.681.718.170	2.035.065.102.622
2019	4.584.789.803.654	922.152.443.756	3.662.637.359.898	1.484.560.416.872
2020	10.052.058.000.000	1.743.341.000.000	8.308.717.000.000	1.457.524.000.000
2021	5.852.962.000.000	982.490.000.000	4.870.472.000.000	2.124.392.000.000

Sumber: Laporan Keuangan PT XL AXIATA,Tbk Tahun 2017 - 2021.

Tabel 2

Hasil Perhitungan Perputaran Modal Kerja Tahun 2017 sampai 2021

Tahun	Perputaran Modal Kerja	Baik / Kurang Baik
2017	0,841 kali	Kurang Baik
2018	0,647 kali	Kurang Baik
2019	0,405 kali	Kurang Baik
2020	0,175 kali	Kurang Baik
2021	0,436 kali	Kurang Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Tabel 3

Perkembangan Nilai Pendapatan dan Persediaan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Pendapatan (Rp)	Persediaan (Rp)
2017	1.792.376.641.870	2.882.167.964.180
2018	2.120.553.079.169	2.764.560.724.663
2019	1.544.898.127.282	2.843.763.737.370
2020	1.501.178.000.000	7.968.491.000.000
2021	2.209.581.000.000	3.967.168.000.000

Sumber: Laporan Keuangan PT XL AXIATA, Tbk Tahun 2017 - 2021

Tabel 4

Hasil Perhitungan Perputaran Kas Tahun 2017 sampai 2021

Tahun	Perputaran Kas	Baik / Kurang Baik
2017	0,621 kali	Kurang Baik
2018	0,767 kali	Kurang Baik

2019	0,543 kali	Kurang Baik
2020	0,188 kali	Kurang Baik
2021	0,556 kali	Kurang Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Tabel 5

Perkembangan Nilai Pendapatan dan Piutang Usaha Tahun 2017 - 2021

Tahun	Pendapatan (Rp)	Piutang Usaha (Rp)
2017	1.792.376.641.870	65.539.228.311
2018	2.120.553.079.169	209.660.603.616
2019	1.544.898.127.282	185.285.395.625
2020	1.501.178.000.000	248.008.000.000
2021	2.209.581.000.000	295.251.000.000

Sumber: Laporan Keuangan PT XL AXIATA, Tbk Tahun 2017 - 2021

Tabel 6

Hasil Perhitungan Perputaran Piutang Tahun 2017 sampai 2021

Tahun	Perputaran Piutang	Baik / Kurang Baik
2017	27 kali	Baik
2018	10.11 kali	Kurang Baik
2019	8.33 kali	Kurang Baik
2020	6.05 kali	Kurang Baik
2021	7.48 kali	Kurang Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Tabel 7

Nilai Harga Pokok Penjualan dan Persediaan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Harga Pokok Penjualan (Rp)	Persediaan (Rp)
2017	735.380.351.408	2.882.167.964.180
2018	922.629.750.742	2.764.560.724.663
2019	773.298.127.082	2.843.763.737.370
2020	823.825.000.000	7.968.491.000.000
2021	869.943.000.000	3.967.168.000.000

Sumber: Laporan Keuangan PT XL AXIATA, Tbk tahun 2017 - 2021

Tabel 8

Hasil Perhitungan Perputaran Persediaan tahun 2017 sampai 2021

Tahun	Perputaran Persediaan	Baik / Kurang Baik
2017	0,25kali	Kurang Baik
2018	0,33 kali	Kurang Baik
2019	0,27 kali	Kurang Baik
2020	0,10 kali	Kurang Baik
2021	0,21 kali	Kurang Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Tabel 9

Nilai Laba Bersih dan Total Aset Tahun 2017-2021

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Total Aset (Rp)
2017	844.123.258.897	4.309.824.234.265
2018	914.989.279.214	5.476.757.336.509
2019	539.794.979.877	5.563.153.184.505
2020	368.440.000.000	12.378.227.000.000
2021	2.220.722.000.000	8.589.827.000.000

Sumber: Laporan Keuangan PT XL AXIATA, Tbk Tahun 2017 - 2021

Tabel 10

Hasil Perhitungan *Return On Investment* tahun 2017 sampai 2021

Tahun	<i>Return On Investment</i>	Baik / Kurang Baik
2017	19%	Kurang Baik
2018	17%	Kurang Baik
2019	9,7%	Kurang Baik
2020	2,98%	Kurang Baik
2021	25%	Kurang Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Tabel 11

Hasil Pengukuran Rasio Modal Kerja dan Profitabilitas (ROI)
Tahun 2017 - 2021

Tahun	Perputaran Modal Kerja Bersih	Perputaran Kas	Perputaran Piutang	Perputaran Persediaan	ROI
2017	0,841 kali	0,621 kali	27 kali	0,25kali	19%
2018	0,647 kali	0,767 kali	10.11 kali	0,33 kali	17%
2019	0,405 kali	0,543 kali	8.33 kali	0,27 kali	9,7%
2020	0,175 kali	0,188 kali	6.05 kali	0,10 kali	2,98%
2021	0,436 kali	0,556 kali	7.48 kali	0,21 kali	25%

Pembahasan

Hasil penelitian ini menyatakan modal kerja dan profitabilitas perusahaan di kategorikan dalam kondisi kurang baik, tetapi perlu adanya peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan rasio perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja dan *Return On Investment*. Nilai dari pengukuran rasio tersebut menunjukkan penurunan kinerja setiap tahunnya dan belum memenuhi standar rasio rata - rata industri atau masih dibawah rasio rata - rata industri

Penilaian *Return On Investment* (ROI) ditinjau dengan cara menganalisis pengelolaan modal kerja dan pengelolaan modal kerja dapat dikatakan kurang baik. Standar umum atau rata-rata industri untuk rasio ini adalah 5,08 % dan pada periode 2017 - 2021 ROI masih berada di bawah angka tersebut. Penurunan yang terjadi masih di bawah standar umum industri. Penurunan ROI diakibatkan salah satunya adalah perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan yang masih berada di bawah standar umum rata - rata industri. Meskipun telah ditingkatkan di tiap tahunnya, Perputaran Modal kerja masih belum mampu mencapai angka standar industri. Perputaran persediaan yang kurang efektif dan efisien mempengaruhi perputaran aktiva menjadi fluktuatif dan penjualan kurang maksimal sehingga laba yang diperoleh juga tidak maksimal. Untuk

meningkatkan efisiensi dalam Pengelolaan Modal Kerja, Terutama Modal Kerja yang diinvestasikan dalam Persediaan. Peningkatan perputaran persediaan dapat dilakukan dengan cara mengurangi produksi yang berlebihan dan meningkatkan penjualan sehingga tidak banyak persediaan yang menumpuk di gudang.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dengan menggunakan analisis rasio terhadap laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 perusahaan PT.XL AXIATA Tbk dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis modal kerja yang diukur melalui tingkat perputaran modal kerja, kas, piutang, persediaan, dapat disimpulkan bahwa modal kerja yang dimiliki perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya dan masih dibawah standar rasio rata - rata industry. Penurunan modal kerja disebabkan karena jumlah kewajiban lancar yang besar yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan usaha mereka dan penagihan piutang dan persediaan semakin lama.
2. Berdasarkan analisis profitabilitas dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan masih kurang baik karena standar rasio rata - rata industri. Penurunan disebabkan kenaikan jumlah beban pokok penjualan dan kurang tepatnya pengelolaan modal kerja serta diikuti tingkat perputaran piutang yang kurang efisien.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas peneliti mempunyai saran untuk PT.XL AXIATA Tbk sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan khususnya perputaran modal kerja PT.XL AXIATA Tbk maka hendaknya perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan keseluruhan aset di dalam penjualan dalam menghasilkan modal kerja, agar terjadi percepatan perputaran modal kerja yang maksimal, sehingga profitabilitas yang dihasilkan dapat lebih tinggi lagi.
2. Dapat menggunakan dan mengalokasikan modal kerja sesuai dengan kebutuhan serta mengusahakan agar modal kerja yang digunakan tidak berlebihan atau bahkan kekurangan.
3. Untuk meningkatkan Profitabilitas PT XL AXIATA, Tbk sebaiknya jangan menumpuk persediaan barang.

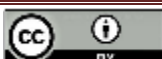
DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, I. M., Purba, D. S., & Sinaga, M. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2020). *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.341>
- Desiani, N. M., Iskandar, Y., & Faruk, M. (2019). Pengaruh Likuiditas Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas (Suatu Studi Pada PT XL Axiata Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2017). *Business Management and Entrepreneurship Journal*, 1(3), 74-90.
- Febriansyah, J., Ananta, D., & Saragih, R. J. P. (2022). Pengaruh Nilai Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Food And Beverage Di Bursa Efek Indonesia Saham LQ45 Periode 2012-2021 . *Manajemen : Jurnal Ekonomi*, 4(1), 68 – <https://doi.org/10.36985/manajemen.v4i1.356>
- Harianja, N. V., Saragih, L., & Tarigan, W. J. (2022). Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Likuiditas Dan Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sub Sektor Bank Milik Asing Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2018 - 2021). *Manajemen : Jurnal Ekonomi*, 4(2), 109–117. <https://doi.org/10.36985/manajemen.v4i2.448>
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo PT Gramedia Widiasarana
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group



- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Depok : PT RajaGrafindo Persada
- Lisa Andriani, Djuli Sjafei Purba, & Damanik, E. O. P. (2021). Pengaruh Struktur Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terhutang (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Priode 2018 - 2020). *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 124–131. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.131>
- Martono dan Agus Harjito, 2014. *Manajemen Keuangan*. Edisi kedua. Ekonisia, Yogyakarta.
- Mahaitin H Sinaga. (2020). Pengaruh Financial Leverage Terhadap Initial Return Pada Perusahaan Yang Melakukan Inital Public Offering Di Bursa Efek. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 2(2), 96 – 113. <https://doi.org/10.36985/accusi.v2i2.352>
- Nababan, S. S., Girsang, R. M., & Tarigan, W. J. (2022). Prediksi Pertumbuhan Laba Perusahaan Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), 182-192
- Reimeinda, V. (2016). Analisis Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Industri Telekomunikasi Di Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Salam, Firdaus. 2017. *Analisis Modal Kerja Untuk Menilai Profitabilitas Pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Sawir, Agnes. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sinaga, M. H., Tarigan, W. J., & Saragih, M. (2022). Pengukuran Kinerja Portofolio Investasi Dengan Menggunakan Indeks Sharpe Pada Emiten Sektor Transportasi Dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Selama Masa Pandemic Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3541-3552
- Shiddigie, H. A., & Priyanto, S. (2021). Pengaruh manajemen modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 1(1), 106-112.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sunyoto, Danang. 2013. *Analisis Laporan Keuangan untuk Bisnis*. Cetakan pertama. Jakarta : PT. Buku Seru
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Edisi kedua. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Tarigan, W. J., & Purba, D. S. (2020). Pengaruh Likuiditas Terhadap Perubahan Struktur Modal Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 2(2), 81-95

www.idx.co.id



ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PANOMBEIAN KABUPATEN SIMALUNGUN

¹Marintan Saragih, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

marintan86.srg@gmail.com

²Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

vitry_tarigan@yahoo.com

³Bagudek Tumanggor, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

bagudektumanggor67@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian Kabupaten Simalungun dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Tahap Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian Kabupaten Simalungun sudah berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, Tahap Transparansi Kampung Buatan II belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, karena belum ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the conformity of Accountability and Transparency in Financial Management in Panombeian Village, Simalungun Regency with Permendagri No. 113 of 2014. The types and sources of data used are primary and secondary data. The method used is descriptive qualitative by comparing existing practices and theories, then a conclusion is drawn. The results of this study are that the Administration, Reporting and Accountability Stages of Financial Management in Panombeian Village, Simalungun Regency are guided by Permendagri No. 113 of 2014. However, The Transparency Stage of Artificial Villages II is not in accordance with Permendagri No 113 of 2014, because there is no information on the announcement board or information board regarding the amount of expenditure and income in carrying out village financial management activities.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management

I. PENDAHULUAN

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan

berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari

Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo, 2012). Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. (Dwijayanto, 2015) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang akurat dengan mudah.

Oleh karena itu, peran serta pihak - pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa.

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan “bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.” Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah Kampung Buatan II. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa Panombeian karena desa Panombeian baru menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2017. Maka, pada tahun 2017 terjadi perubahan dari pembukuan ke Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan IAI dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih Akuntabel dan Transparan.

Permasalahan yang ditemui peneliti diantaranya yaitu prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya, karena dalam tahap ini belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah desa Panombeian. Alasan peneliti melakukan penelitian di desa Panombeian karena Desa Panombeian menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada tahun 2017. Maka, pada tahun 2017 terjadi perubahan dari pembukuan ke Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama dengan IAI dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih Akuntabel dan Transparan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.” Selain itu, dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan - kegiatan yang dibiayai dana desa.

Masalah lainnya yang sering dihadapi seperti keterlambatan anggaran dari pusat yang sering terjadi di awal tahun yang menyebabkan penghasilan tetap untuk pembayaran gaji perangkat desa, listrik dan biaya operasional mengalami keterlambatan. Selain itu, program yang telah direncanakan

oleh Pemerintah Desa tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

II. KAJIAN TEORI

Undang – undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, “desa adalah desa dan adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul dan hak dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yang dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Muindro, 2013), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk bertanggungjawab menyajikan, melaporkan serta memberikan informasi mengenai segala aktifitas dan kegiatan, pihak pemeberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Permendagri No. 113 tahun 2014, disebutkan dalam Bab V Pasal 20 s/d 42 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa”.

Perencanaan

Pasal 20 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengenai Perencanaan yaitu:

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahunberkenaan disusun oleh Sekretaris desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh sekretaris desakepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untukdibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambatbulan oktober tahun berjalan.
- 5) Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersamadisampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tighari sejak disepakati untuk di evaluasi.

Pelaksanaan

Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24, mengenai Pelaksanaan yaitu:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kasdesa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnyamaka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten / kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sah.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa tertera dalam Permendagri No. 113 tahun2014 Pasal 35, yaitu :

- 1) Bendahara Desa melakukan penatausahaan.
- 2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup bukusetiap akhir bulan secara tertib wajib dlakukan oleh Bendahara Desa.
- 3) Pertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desadan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan

Mengenai Pelaporan, diatur dalam Permendagri 113 tahun 2014 Pasal 37yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berupa Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan realisasi APBDes merupakan laporan semester pertama.



- 3) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhirbulan Juli tahun berikutnya.
- 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban

Mengenai Pertanggungjawaban diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 38, yaitu:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun berkenaan, Format Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan serta format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa :

- 1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- 2) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan pada bupati melalui camat dan siampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan public. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara – cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya Nasirah, 2016 dalam (Arista, 2017).

Pada saat pelaksanaan kegiatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dibentuknya tim pelaksana kegiatan desa yang terdiri dari kepala seksi, sekretaris, bendahara dan melibatkan unsur masyarakat. Kemudian tim mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada sekretaris desa untuk diverifikasi yang dilengkapi RAB, bukti pertanggungjawaban belanja dan buku kas pelaksanaan.

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Terdapat 3 jenis buku kas di desa, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa hal yang harus dilakukan dan menjadi indikator dalam penelitian ini, yakni:

Tabel 1
Tahap Penatausahaan

No.	Indikator
1	Bendahara Desa harus melakukan penatusahaan
2	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib.
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan dilakukan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena



menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tabel 2

Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2	Laporan realisasi APBDesa merupakan laporan semester pertama.
3	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester 1 disampaikan pada akhir bulan Juli.
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, “kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas”, diantaranya format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Tabel 3

Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang public yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Tabel 4

Indikator Transparansi

No.	Indikator
1	Pembukuan Kas Masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat.
2	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3	Laporan realisasi disampaikan kepada Bupati melalui camat.

III. METODE PENELITIAN

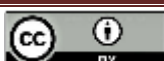
Lokasi Penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Panombeian Kabupaten Simalungun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1) Data primer

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kampung Buatn II.

2) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa dokumen petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa seperti Perubahan Anggaran dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Laporan kekayaan Milik Kampung, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan



Realisasi tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa Panombeian, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi total 3098 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki - laki berjumlah 1514 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1584 jiwa.

Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi oleh ketua RT di lingkungan masing-masing. Didapatkan data seperti yang ada ditabel berikut ini :

Tabel 5

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki - laki	1514	49%
2	Perempuan	1584	51%
	Jumlah	3098	100%

Tabel 6

Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase (%)
1	00 - 05 Th	238	6,8
2	06 - 10 Th	239	7,1
3	11 – 15 Th	236	6,9
4	16 – 20 Th	294	8,8
5	21 – 25 Th	250	7,5
6	26 – 30 Th	250	7,5
7	31 – 35 Th	227	6,6
8	36 – 40 Th	262	7,7
9	41 – 45 Th	246	7,3
10	46 – 50 Th	254	7,5
11	51 – 55 Th	214	6,4
12	56 – 60 Th	215	6,4
13	61 Tahun ke atas	173	5,2

Sumber : Monografi Desa Panombeian Tahun 2021

Dari total jumlah penduduk Desa Panombeian, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia > 60 Tahun, merupakan jumlah 5,2 % usia tahun 6,8 %.

Tabel 7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Usia	Jumlah	Presentase %
1	Tamat Taman Kanak - Kanak	62	1,8
2	Taman Sekolah Dasar	1.469	54
3	Tamat SMP	950	28,5
4	Tamat SMA	369	11,07
5	Tamat Perguruan Tinggi	150	4,5
	Jumlah	2.634	100%

Sumber : Monografi Desa Panombeian Tahun 2021

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Kampung Buatn II



kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 54 % dan pendidikan menengah SMP 28,5% dan SMA 11,07 %, sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 4,5 %.

Tabel 8

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1	Pegawai Negeri Sipil	91	10,0
2	TNI	1	0,1
3	Karyawan Swasta	95	13,9
4	Wiraswasta/pedagang	125	15,1
5	Tani	280	35,6
6	Pertukangan	30	4,6
7	Buruh tani	88	10,8
8	Nelayan	35	5,4
9	Pemulung	1	0,1
10	Jasa	25	3,0

Sumber : Monografi Desa Panombeian 2021

Berdasarkan tabulasi data tersebut teridentifikasi, di Desa Panombeian jumlah penduduk kehidupannya bergantung di sektor pertanian dan peternakan 35,6 % dari total jumlah penduduk.

Tabel 9

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase %
1	Islam	3072	97,2
2	Katolik	-	-
3	Protestan	4	0,2
4	Budha	22	2,6
5	Hindu	-	-
	Jumlah	3.098	100%

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Panombeian yang beragama islam mendominasi dengan jumlah penduduk 97,2 % dari total 3098 jumlah penduduk. Pemeluk agama Budha 2,6 % dan Protestan 0,2 %.

Tabel 10

Indikator Penatausahaan

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), TidakSesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Bendahara desa melakukan penatausahaan	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	S
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sertamelakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertibwajib dilakukan oleh Bendahara Desa.	Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	S

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban.	S
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Kampung.	S

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank / transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara.

Tabel 11
Indikator Pelaporan

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati / Walikota oleh Kepala Desa berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhirtahun.	Laporan semester I dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	S
2. Laporan semester 1 adalah laporan realisasi APBDes.	Laporan realisasi semester I berupa APBDes.	S
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester 1 disampaikan pada akhir bulan Juli.	Laporan semester I dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.	S
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya.	S

Berdasarkan hasil wawancara Laporan Realisasi Semester Pertama berupa Laporan realisasi APBDes sudah dilaporkan, namun dengan keterbatasan akses dokumen peneliti hanya mendapatkan dokumen mengenai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) saja.

Tabel 12
Indikator Pertanggungjawaban

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun oleh kepala Desa.	S
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.	S

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkandengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah ditetapkan dengan peraturan desa.	S
---	---	---

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan semua laporan pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Panombeian telah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pertanggungjawaban telah *Accountable*. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas - luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil - hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kerani / Sekretaris Desa, secara umum perangkat desa belum sepenuhnya transparan mengenai nominal sumber dana. Karena pada tahun 2017 belum terdapat papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan. Pada Pertengahan Tahun 2018 baru terdapat papan informasi mengenai dana desa.

Tabel 13
Indikator Transparansi

Indikator	Hasil wawancara	Keterangan Sesuai(S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT)
1. Pembukuan Kas masuk dan keluar dapat diakses oleh masyarakat.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan oleh bendahara, hanya belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat karena belum terdapat papan pengumuman.	TS
2. Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Secara tertulis laporan realisasi sudah diinformasikan kepada masyarakat, tetapi belum terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman.	TS
3. Laporan Realisasi disampaikan kepada Bupati melalui Camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD telah disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa.	S

Berdasarkan hasil wawancara Tahap Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada Desa Panombeian Kabupaten Simalungun, kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta tidak ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis, akan tetapi tidak terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman. Seharusnya informasi mengenai keuangan desa, kas masuk dan keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 dan 2, yaitu “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain : (a) papan pengumuman; (b) radio informasi; dan (c) media informasi lainnya”.

Sekretaris desa mengatakan bahwa tidak adanya papan informasi dikarenakan kurangnya

bimbingan teknis oleh pemerintah setempat. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan kuantitas serta lebih banyak diberikan praktek pengelolaan keuangan desa berdasar Permendagri No 113 tahun 2014 disemua tahapan.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa *tidak transparency* karena belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

V. KESIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014. Namun, dalam tahapan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Karena belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengena jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Panombeian *tidak transparency*.

Penelitian ini hanya membahas secara teknik pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini hanya menyajikan perbandingan kesesuaian undang - undang dengan aplikasi di lapangan. sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya serta proses pengendaliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Putu. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. eJournal, Vol : 8No 2
- Butar – Butar, R., & Purba, E. (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. Jurnal Ekuilnomi, 4(1), 14 - 26
- Dwijayanto, Agus. 2015. Reformasi Birokasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edowai, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mardiasmo. 2012. Otonomi dan Keuangan Daerah. www.kajianpustaka.com
- Manik, N., Adam, A., & Isnaini, I. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Padang Bolak. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 675-684.
- Nahrudin, Zulfan. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. IV No. 2
- Ndruru, T. T., Panjaitan, P. D., & Tumanggor, B. (2022). Analisis Pendapatan Dan Konsumsi Masyarakat Nagori Silau Malaha Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020 – 2021. Jurnal Ekuilnomi, 4(2), 130-144
- Nurlinda. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 1
- Peraturan Bupati Siak Nomor 201. 2017. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
- Permendagri Nomor 113. 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Qurtubi, A. L. (2020). Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra



Wacana Media.

- Saragi, R. U., Eva Sriwiyanti, & Vitryani Tarigan. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP. 71/2010) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 132–149. <https://doi.org/10.36985/jia.v3i2.176>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDPTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718-734.
- Sinaga, M. H., & Tarigan, W. J. (2021). Implementasi SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan PERMEN KUKM RI NO. 13/PER/M. KUKM/IX/2015. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 11(2), 211-224
- Sinaga, A. R. L., Sihombing, M., & Humaizi, H. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kodon-Kodon Kecamatan Merek Kabupaten Karo. *Perspektif*, 11(3), 1209-1218.
- Simanjuntak, M., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 743-749.
- Umami, Risyah, dkk. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *eJournal*, Volume 6 Edisi 11
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9-20
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., & Sinaga, M. H. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ecogen*, 6(1), 14-25
- Tarigan, W. J., Rustam Effendi, S. E., Nurul Alfiyah, S. E., Akun, M., Rihfenti Ernayani, S. E., Fauzi, M. E., ... & SE, M. S. (2023). Pengenalan Dasar Auditing. *Cendikia Mulia Mandiri*.
- Widiyanti, Aristi. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). *Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Widjaja. 2013. Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wulan, Cici. 2018. Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. *eJournal FEB*, Volume 1 Edisi 1

**SOCIAL MEDIA PERFORMANCE AND EVALUATION: AN APPROACH TO
BUSINESS ANALYTICS CONCEPT****Genesis Sembiring Depari, Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Medan**

email : genesis.sembiring@uph.edu

Adat Muli Peranginangin, STIE Surya Nusantara

email : adatperanginangin09@gmail.com

Albert Owen, Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Medan**Felix Emmanuel, Tanny Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Medan****Luis Jonatan, Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Medan****Winnie Lauren, Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan Medan***ABSTRACT*

The growth of the internet has resulted in the digitalization of data, which has led to the emergence of big data opportunities. Significant amounts of digital data leave traces of what customers see, read, do, and judge, as well as information about their interests and preferences, resulting in a large amount of data that may be mined for learning experiences. Data mining, statistical algorithms, and machine learning approaches are used in descriptive, predictive, and prescriptive analytics to analyze, forecast, and optimize what is the most take effect, future trends, events, and behaviors based on various data types. A decision support system is widely demanded in tackling this problem, especially in understanding the interactions based on the type, and time from the Facebook post about branding data sets. This work attempts to offer descriptive, predictive, and prescriptive analytics to determine whether a post is worth paying for and promoting. This study is sought for deeper observations of posts on Facebook that get a lot of interaction and loyal users by the best algorithm compared with naive Bayes and decision tree which is using Random Forest with 90.35 % accuracy.

Keywords : Business Analytics, Random Forest, Support Vector Machine, Naive Bayes, Decision Tree, Data Mining.

I. INTRODUCTION

In the current era, the development of social media in all over the world is very rapid, various information can be received through social media. In this technology era, a new trend of using Social Media or Social Networking Sites (SNSs) has been recently highlighted (Kamnoetsin, 2015). The current use of social media is very concerning because many social media users prioritize social media over other needs. It's as if electronic goods and quotas are primary needs at this time.

Internet access and usage in the world has been proliferating year by year, with approximately 1.11 billion users in 2007, 1.67 billion in 2009, and 1.97 billion in 2010 (Xanthidis, 2008) Social media is a medium for socializing with each other and done online which allows humans to interact with each other without being limited by space and time. One of the social media that is widely used in Thailand is Facebook.

Facebook is a platform that own by Meta first, which is an American social media and online social networking website (Kraus ,2020). Mark Zuckerberg and a group of Harvard College students founded Facebook in 2004. Because of the widespread usage of social media, social media marketing has become one of the most important aspects of global marketing. The majority of 94 percent of enterprises in the globe use social media for marketing objectives, and demonstrating this (Basri, 2017).



Companies quickly recognized the power of using Internet-based social networks to influence clients, and they began implementing social media marketing communication into their business plans. Measuring the impact of advertising is a crucial component of a global social media strategy (Lariscy et al., 2009). Several research have looked into the relationship between online articles on social networks and their impact as measured by user interactions. When opting to interact via social media and adjusting the marketing of products and services, a system that can forecast the impact of specific published posts can be a huge help. Advertising managers may make informed decisions on the receptiveness of the posts they produced, aligning efforts to maximize the impact of posts while taking advantage of the predictions and using prescriptive analysis. Furthermore, it has been established that social media publications are strongly linked to brand building (Edosomwan et al., 2011). As a result, the prediction tool described in this research could help managers make better judgments about marketing awareness.

Data mining is a fascinating method for obtaining predictive knowledge from unstructured data (Turban, 2011). Its usage in social media has been investigated, particularly for evaluating market trends based on user input (Trainor, 2014). The majority of the research, on the other hand, concentrated on a reactive examination of what people are saying on social media, with an emphasis on acquiring information from various network groups or even personal posts (e.g., Bianchi and Andrews, 2015). We concentrated on forecasting the impact of individual postings being published on a social media network company's page. Several variables linked to consumer visualizations and interactions are used to assess the impact. The predicted knowledge discovered can help managers decide whether or not to publish each post.

II. LITERATURE REVIEW

Business Analytics

Business analytics is a revolution that cannot be overlooked. Business analytics is all about extracting value from data. Rather than being referred to as the "sludge of the digital era," data is now referred to be "the new oil." While data may be used for a variety of objectives, including spotting new opportunities, identifying market niches, and generating new products and services, it is infamously amorphous and difficult to value extract (Acito, 2014).

Self - service business analytics tools, artificial intelligence (AI), and cloud data management software have enabled basically everybody (regardless of skill level) to analyze and visualize patterns in real time, spot company problems, and make informed business decisions in the recent decade. Computer scientists are no longer the only ones who can perform business analysis. Finance, manufacturing, healthcare, sales, marketing, supply chain, and operations are just a few of the industries that use it. Business analytics is required if you want to gain insights from your data.

Business analytics skills are now taught in several degree programs and are a significant aspect of many of them. Students in business learn to apply their knowledge in real - world scenarios such as corporate operations, where they identify essential Key performance metrics and use a data - driven approach.

Three Domain of Analytics

Descriptive Analytics

Descriptive analysis is one of the most complex, adaptable, and commonly utilized methods In the field of sensory analysis. Many strategies have been created throughout the years to satisfy various purposes and uses, each with its own set of benefits and drawbacks. Flavour profiling, texture profiling, the SpectrumTM Method, and quantitative descriptive analysis are examples of traditional methodologies. Because of the intensive training necessary, these take longer and cost more money, but the data supplied is more thorough and detailed. Free Choice Profiling, Flash Profiling, sorting, projective mapping, and Polarised Sensory Positioning are some of the more recent approaches.

These are easier to use because they don't require any training, but the data processing is more complicated and the findings are less thorough. There are other completely qualitative methods, such as Tick – All – That - Apply and open questioning, to quantify temporal changes in products, such as

continuous Time-Intensity and Temporal Dominance of Sensation. Many businesses utilize their own, custom-made descriptive ways (Kemp, 2018).

- Mean

The average of a group of scores is called the mean. Add up the points and divide by the total number of points. When population samples are tiny, the mean is susceptible to extreme scores.

$$\text{Mean } (m) = \text{sum of the terms} / \text{numbers of terms}$$

- Median

The median is the point where half of the scores are higher and half are lower. Medians are less sensitive to high scores and, especially for smaller sample numbers, are probably a better indicator of where the middle of the class is performing.

$$\text{N is odd; Median} = \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$$

$$\text{Or, when N is Even; Median} = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)^n + \left(\frac{n}{2}+1\right)^n}{2}$$

- Standard Deviation

In statistics, the standard deviation (SD) is a widely used measure of variability. It depicts the degree of deviation from the average (mean). A low standard deviation (SD) suggests that the data points are near to the mean.

$$\text{Standard Deviation } (\sigma) = \sqrt{\sum (x_i - \mu)^2 / N}$$

Predictive Analytics

Predictive analytics is a set of business intelligence (BI) technologies that uncovers relationships and patterns within large volumes of data that can be used to predict behavior and events. Unlike other BI technologies, predictive analytics is forward-looking, using past events to anticipate the future (Eckerson, 2007).

- *Random Forest*

One of the most efficient categorization algorithms is the Random Forest (RF) algorithm. It attracts scholars from several fields due to its inherent multidisciplinary nature. The goal of this research is to see how well the RF method performs with multispectral satellite photos of various spatial resolutions and scene features (Lin, 2017).

- There are some advantages in using Random Forest:

1. Random forest can solve both classification and regression issues and provide reasonable estimation in both cases.
2. One of the most appealing features of Random Forest is its ability to handle big data sets with higher dimensionality. It is one of the dimensionality reduction methods since it can handle hundreds of input variables and identify the most significant variables. In addition, the model outputs the importance of each variable, which is a very useful feature.
3. It has a good strategy for predicting missing data and keeps its accuracy even when a lot of data is missing.

- Disadvantages using Random Forest Algorithm:

1. It performs well in classification, but not in regression, as it does not provide precise continuous nature prediction. In the case of regression, it cannot forecast beyond the range of the training data, and it is possible that they would overfit noisy data sets.
2. For statistical modelers, random forest can feel like a black box method because we have very little control over what the model does. At the very least, you can experiment with different parameters and random seeds.

- *Naive Bayes*

One of the most often used data mining techniques is Naive Bayes. Its efficiency stems from the assumption of attribute independence, which, in many real-world data sets, may be violated.

Many approaches have been used to alleviate the assumption, with attribute selection being one of the most important. Traditional approaches to attribute selection in naïve Bayes, on the other hand, have a high computational overhead (Chen, 2020).

A naïve Bayes classifier is an algorithm that classifies things using Bayes' theorem. Naïve Bayes classifiers are based on the assumption of substantial, or naïve, independence between data point properties. Spam filters, text analysis, and medical diagnosis are all common applications of naïve Bayes classifiers.

A classification system utilizing probability and statistical approaches devised by an English scientist named Thomas Bayes that predicts future possibilities based on previous experience is known as Naïve Bayes (Saleh, 2015).

The training and classification processes are the two stages of the Naïve Bayes classification method. Naïve Bayes is a classification method that uses a limited amount of training data to determine the predicted parameters required for classification. In most complex real - world scenarios, Naïve Bayes also outperforms expectations (Saleh, 2015).

○ Some of Naive Bayes Advantages are:

1. This algorithm is fast and can help you save a lot of time.
2. For multi-class prediction issues, Naive Bayes is a good choice.
3. If the premise of feature independence remains true, it can outperform other models while using far less training data.
4. Categorical input variables are more suited to Naive Bayes than numerical input variables.

○ The Disadvantages of Naive Bayes are:

1. In Naive Bayes, all predictors (or features) are assumed to be independent, which is rarely the case in real life. This limits the algorithm's usability in real-world scenarios.
2. The 'zero-frequency problem' occurs when an algorithm assigns zero probability to a categorical variable whose category in the test data set was not present in the training dataset. To get over this problem, you should employ a smoothing approach.
3. You shouldn't take its probability outputs seriously because its estimations can be off in some instances.

- *Decision Tree*

Decision Tree algorithm is designed for identifying massive data sets and streaming data and runs in a distributed setting. It has been proved to be as accurate as a traditional decision tree classifier while also being scalable for streaming data processing on numerous CPUs. These conclusions are backed up by a thorough examination of the algorithm's accuracy (Ben - Haim. 2010).

○ The Advantages in Using Decision tree algorithm:

1. Are easy to comprehend and interpret. After a quick explanation, people can understand decision tree models.
2. Have value even if there isn't a lot of hard data. Experts' descriptions of a situation (its choices, probabilities, and costs) and their preferences for outcomes might yield important insights.
3. Assist in determining the worst, best, and expected outcomes for various circumstances.

○ Disadvantages using decision tree:

1. They're unstable, which means that a slight change in the data can result in a significant change in the structure of the best decision tree.
2. They are frequently insufficiently accurate. With same data, several alternative predictors do better. A random forest of decision trees can be used to replace a single decision tree, however a random forest is not as straightforward to comprehend as a single decision tree.
3. Information gain in decision trees is biased in favor of qualities with more levels when data includes categorical variables with differing numbers of levels.

Prescriptive Analytics

Prescriptive Analysis combines insights from previous social media analysis results to determine which action to take in a current problem or decision, using a variety of statistical

techniques such as predictive analytical modelling, which is machine learning and data mining analyzing to make predictions about future or unknown events such as consumers' interest in total interactions based on its type. Prescriptive analytics, on the other hand, tells users which activities are most likely to yield the greatest benefit when the expected event occurs. The algorithm can produce a good response based on the individual's genetic makeup. Prescriptive analytics is built on AI approaches like machine learning, which refers to the ability of unassisted computer systems to perceive, adapt, and learn (Fiet, 2007).

Facebook

Facebook is a two - syllable word derived from the words face and bookbut that does not mean the face in a book or a book is in the form of a face. So, to put it simply, the word Facebook means advance book. Facebook, on the other hand, is a social networking site where users can not only display their looks and information, but also communicate with other users from all over the world.

In 2004, Facebook was created exclusively for Harvard University students. The following year, Facebook launched a service for schoolchildren to join. Facebook only opened membership to everyone in 2006, so people can now access it from anywhere and at any time. Facebook is a platform that people can express their feeling in it with post picture, video, and link, or giving reaction into another people picture or videos all around the world.

Data Mining

Data mining is a series of processes to explore added value in the form of information that has not been known manually from a database (Vulandari, 2017).

According to Suyanto data mining is an activity that includes the collection and use of historical data to find regularities, patterns, or relationships in large data sets (Suyanto, 2017). The output of this data mining can be used to improve decision making in the future.

Meanwhile, according to (Muzakir and Wulandari, 2016) Data Mining is a process of looking for an interesting pattern or information in selected data using certain techniques or methods.

Cross Validation

Cross Validation (CV) is a statistical approach for evaluating the performance of a model or algorithm in which the data is divided into two parts, which is learning process data and validation or evaluation data.

Cross validation is the process of separating a dataset into two portions, one of which is used as training data and the other as testing data. Some studies split the data into ten sections, with 90 percent being utilized for training and the remaining ten for assessment. This procedure is performed up to ten times until all data records have been incorporated into the testing data. 10 fold cross validation is another name for this procedure. 10 folds cross validation is widely used by researchers because it is proven to produce a more stable algorithm performance.

Rapid Miner

Rapid Miner is a data science software platform built by the same-named firm that combines data preparation, machine learning, deep learning, text mining, and predictive analytics into a single environment. It is utilized for commercial and business purposes.

Rapid Miner is a GUI (Graphical User Interface) display software produced by Dr. Markus Hofmann of the Blanchardstown Institute of Technology and Ralf Klinkenberg of rapid-i.com to make it easier for users to use. Rapid Miner is open source software that was produced with Java programs and is licensed under the GNU Public License. It can be executed on any operating system. Rapid Miner does not require any particular coding abilities because all of the necessary features are already included. Rapid Miner is a program that focuses on data mining. Bayesian Models, Modeling, Tree Induction, Neural Networks, and other models are among the many and comprehensive models available.

III. DATA AND METHODOLOGY
Table 1. Data Description

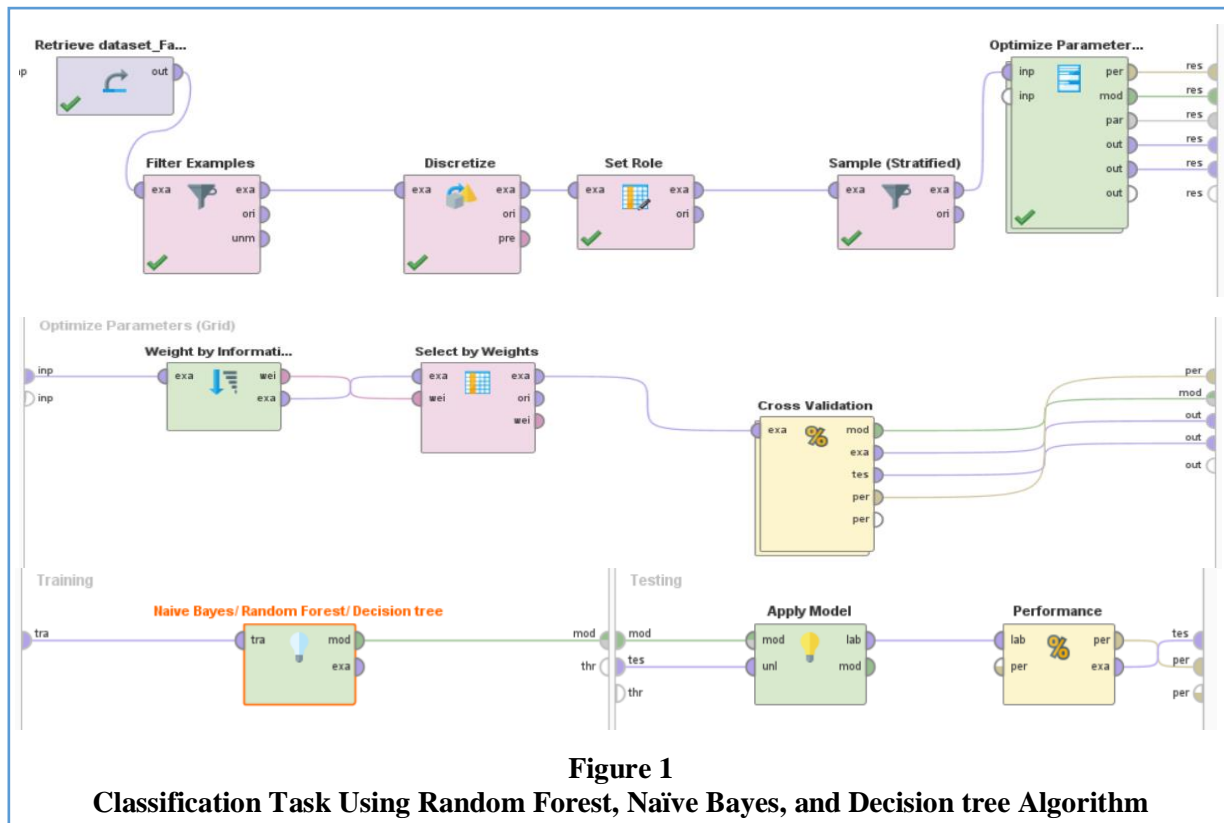
Variable	Descriptions	Role
Type	The type of the post (Photos, Video, Link, or status)	Independent Variable
Page total like	The total of like in one post	Independent Variable
Total Interactions	Total of Intereactions in that post (the sum of total like, comment, and share)	Dependent Variable
Category	Manual content characterization: action (special offers and contests), product (direct advertisement, explicit brand content), and inspiration (non-explicit brand related content).	Independent Variable
Post Month	Month the post was published (January, February, March, ..., December).	Independent Variable
Post Hour	Hour the post was published (0, 1, 2, 3, 4, ..., 23).	Independent Variable
Post Weekday	Weekday the post was published (Sunday, Monday, ..., Saturday).	Independent Variable
Paid	If the company paid to Facebook for advertising (yes, no).	Independent Variable
Lifetime post total reach	he number of people who saw a page post (unique users). Impressions are the number of times a post from a page is displayed, whether the post is clicked or not. People may see multiple	Independent Variable
Lifetime post total impressions	Impressions of the same post. For example, someone might see a Page update in News Feed once, and then a second time if a friend shares it.	Independent Variable
Lifetime engaged users	The number of people who clicked anywhere in a post (unique users).	Independent Variable
Lifetime post consumers	The number of people who clicked anywhere in a post.	Independent Variable
Lifetime post consumptions	The number of clicks anywhere in a post.	Independent Variable
Lifetime post impressions by people who have liked a page	Total number of impressions just from people who have liked a page	Independent Variable
Lifetime post reach by people who like a page	The number of people who saw a page post because they have liked that page (unique users).	Independent Variable
Lifetime people who have liked a page and engaged with a post	The number of people who have liked a Page and clicked anywhere in a post (Unique users).	Independent Variable
Comments	Number of comments on the publication	Independent Variable
Share	Number of times the publication was shared	Independent Variable
Likes	Number of likes on the publication	Independent Variable

Data collection

The data set was retrieved from UCI Machine Learning Repository that currently maintains 622 data sets as a service to the machine learning community which consists of data science, engineering, business, and games. To avoid any trends for a specific campaign, special day, user profile, or time, the dataset is structured so that each session is a unique user over the course of a year.



Rapid Miner Studio Educational 9.10.001 was used in this study. We compare three algorithms in this study to discover the best method for dealing with number interaction in facebook data that is predicting social media performance metrics and evaluation of the impact on brand building prediction datasets by comparing: Naïve Bayes, Random Forest, and Decision Tree.



- **Random Forest.**

We utilize the Optimize Parameter (Grid) operator to run subprocesses for all of the parameter value combinations we've chosen, and then send the best results to the parameter set port. The Random Forest Operator is the operator that will be optimized. Number of Trees is the optimal Random Forest parameter, with a Min Range of 0.05, a Max Range of 10, and a Step 20 of 20. Random Forest.apply pruning and Random Forest.minimal gain are two examples of selected parameters.

To avoid the problem of overfitting, a 10 - fold cross - validation strategy was adopted. The learner is validated using the cross validation operator. The nested operator Cross Validation is a nested operator. This operator is divided into two sub - processes: training and testing. The trained model is then put to the test. During the second phase, the performance is evaluated (Arunadevi, 2018)

- **Naïve Bayes**

Sentiment Analysis Of Social Media Datasets That Works Extraction of subjective information from textual data is required when using Naïve Bayesian Classification. Based on its knowledge of word polarity, a normal human may quickly interpret the sentiment of a document written in natural language. (Gurkhe, 2014). But, the goal of this project is to train a machine to extract classes (low interaction, medium engagement, and high interaction) from different types of Facebook posts.

Because we are comparing between the algorithm, then we also use optimize parameters (Grid) operator in this naïve bayes algorithm, with the laplace_correction, and with 10 folds cross validation with automatic sampling type, because it is proven to produce a more stable algorithm performance.

• **Decision Tree**

In this decision tree, we use Decision Tree.apply_pruning, and Decision Tree.minimal_gain with cross validation 10 folds. All of these three algorithm is using Sample (Stratified) to make the process of the data quicker due to there are 500 data in the dataset.

Prescriptive Analytics

To achieve a goal, prescriptive analytics generates specific action recommendations. To put it another way, they create a link between pure analysis and actual optimization. We see two sorts of prescriptive analytics systems in general: (1) recommender systems that use data mining approaches, and (2) expert systems that use rule-based, case-based, and model-based reasoning techniques. (Gröger, 2014).

In this Prescriptive Analytics, we use firstly use Filter example to filter the missing value into is not missing, because some attributes in our data set have missing values, which was missing in the paid, like, and share attributes.

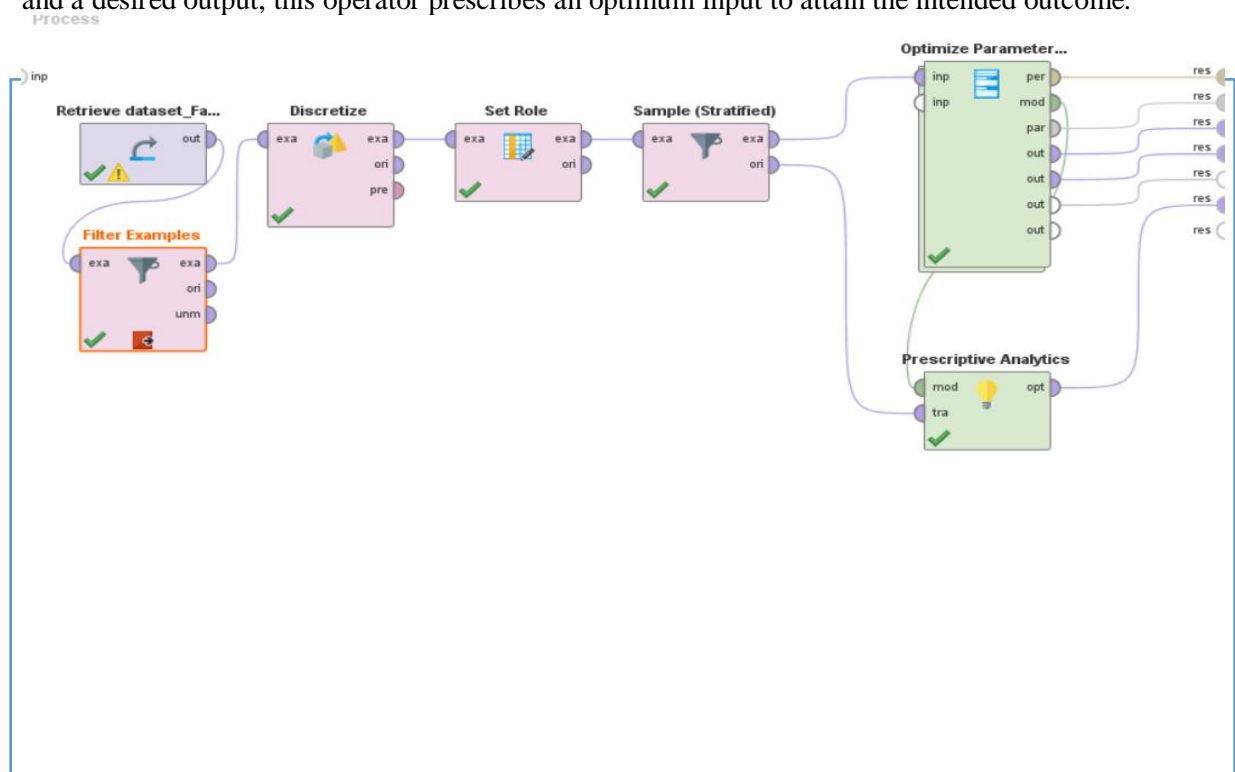
To make the classes (Low, Medium, and High Interactions) we need discretize to grouping the data, so that the dataset is easier to read and understand. After using Discretize, we need an attributes to become label in order to be able to process data to the next stage and the attributes that we choose to become label is Total Interactions with the “set role” attributes.

After finish setting the set role, we continue to add sample (stratified). From an ExampleSet, this operator builds a stratified sample. Stratified sampling creates random subgroups and assures that the subsets' class distribution matches that of the entire ExampleSet. This operator can't be used with data sets that don't have a label or that have a numerical label. The sample size can be chosen both in absolute and relative terms.

The stratified sampling creates random subgroups and ensures that the subsets' class distribution matches that of the entire ExampleSet. In the case of a binominal classification, for example, stratified sampling creates random subsets with about equal proportions of the two values of class labels in each subset.

To optimize the data, we use optimize parameters which inside it, we add Cross Validation with 5 number of folds and stratified sampling type. In the training side, we use naive bayes algorithm, and for the Testing side, we use Apply model, and Performance. Cross validation is the process of separating a dataset into two portions, one of which is used as training data and the other as testing data, so that the training side is using Naive Bayes algorithm, and the testing side is using Apply Model and Performance.

Because it is prescriptive analytics model, then it needs to use prescriptive analytics operator. A model is used in predictive modeling to predict an outcome given an input. Starting with a model and a desired output, this operator prescribes an optimum input to attain the intended outcome.



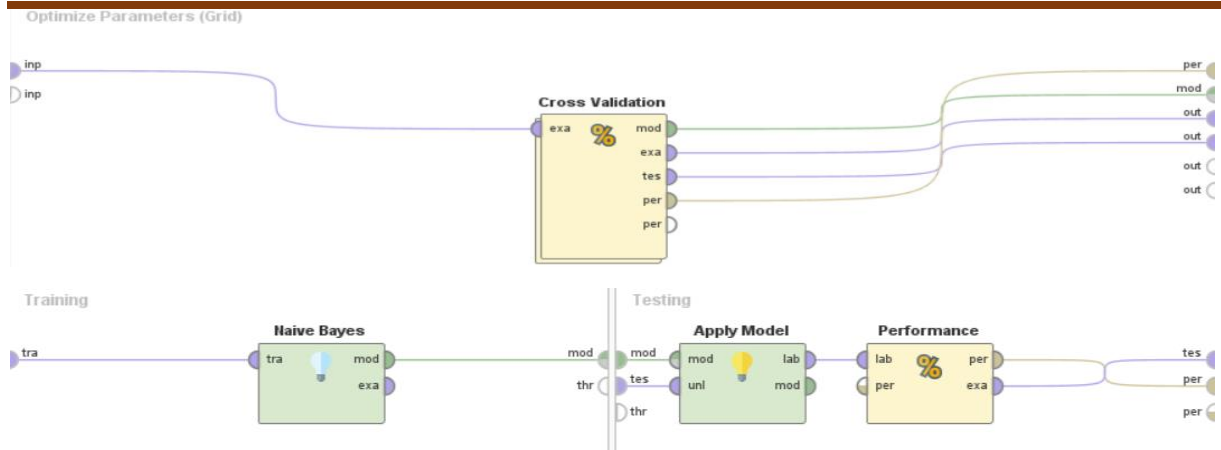
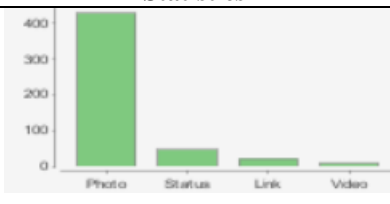


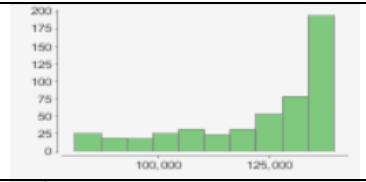
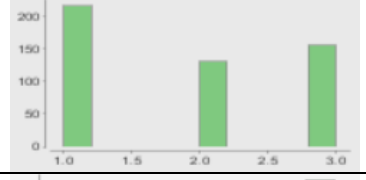
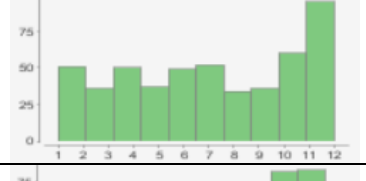
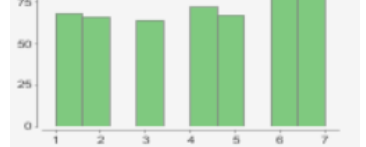
Figure 2
Classification Task Using Prescriptive Optimization

IV. RESULT AND DISCUSSION

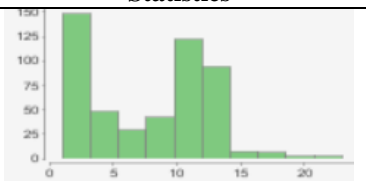

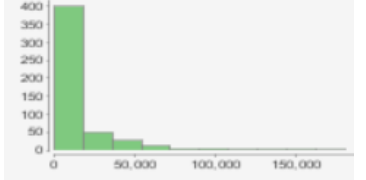

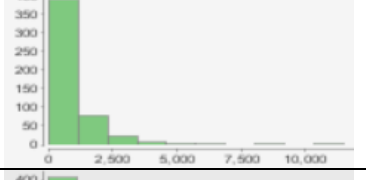
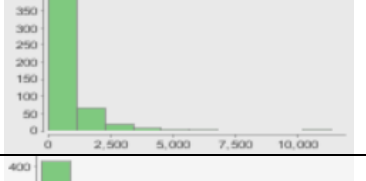
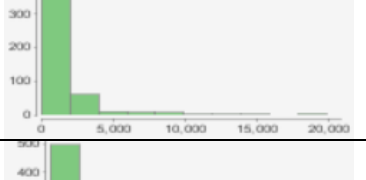

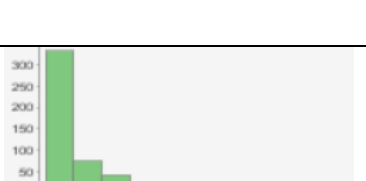
a. Descriptive Analytics:

Table 2 Descriptive Analytics Table

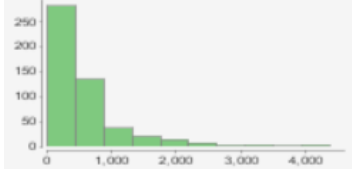
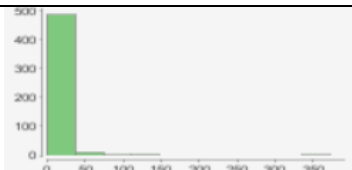
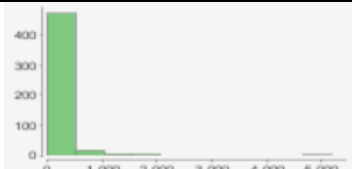
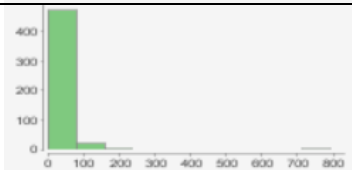
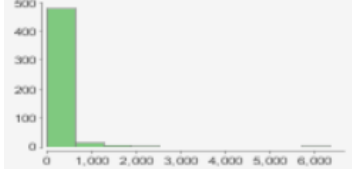
Name	Type	Least	Most	Values	Statistics
Type	Nominal	Video(7)	Photo(426)	Photos(426), Status(45), Link(22), Video(7)	

Name	Type	Min	Max	Average	Deviation	Statistics
Page total likes	Integer	81370.0	139441.0	123194.176	16272.813 214464477	
Category	Integer	1	3	1.88	0.8526746 790050889	
Post Month	Integer	1	12	7.038	3.3079360 455975397	
Post Weekday	Integer	1	7	4.15	2.0307012 323308324	



Name	Type	Min	Max	Average	Deviation	Statistics
Post Hour	Integer	1	23	7.84	4.3685889 18435395	
Paid	Integer	0	1	0.278557114 2284569	0.4487388 868806484	
Lifetime Post Total Reach	Integer	238.0	180480.0	13903.36	22740.787 889562573	
Lifetime Post Total Impressions	Integer	570.0	1110282.0	29585.948	76803.246 66965121	
Lifetime Engaged Users	Integer	9.0	11452.0	920.344	985.01663 60069362	
Lifetime Post Consumers	Integer	9.0	11328.0	798.772	882.50501 31372763	
Lifetime Post Consumptions	Integer	9.0	19779.0	1415.13	2000.5941 184441942	
Lifetime Post Impressions by people who have liked your Page	Integer	567.0	1107833.0	16766.376	59791.023 73072534	
Lifetime Post reach by people who like	Integer	236.0	51456.0	6585.488	7682.0094 05283343	



Name	Type	Min	Max	Average	Deviation	Statistics
your Page						
Lifetime People who have liked your Page and engaged with your post	Integer	9.0	4376.0	609.986	612.72561 81769623	
comment	Integer	0	372.0	7.482	21.180909 75089953	
Like	Integer	0	5172.0	177.9458917 8356713	323.39874 15906344	
Share	Integer	0	790.0	27.26612903 2258064	42.613292 15892268	
Total Interactions	Integer	0	6334.0	212.12	380.23311 80316835	

Above this descriptive Analytics, we can see that the total interaction in the post is reach 6334 (sum of likes, share, and comments) which the total interactions the most is got from the photo types of post, because we can see that the photo value (426) is significantly higher than the others (Status (45), Link (22), and the Video (7)). In the next step, with the predictive and prescriptive analytics can determine the prediction of total interactions in the future. These descriptive analytics are easier to use because they don't require any training, but the data processing is more complicated and the findings are less thorough.

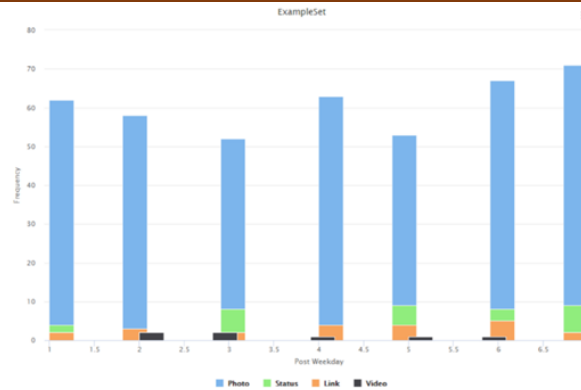


Figure 3. Statistics of Type of Post in weekdays

For the Post Weekday graphic show that from Monday until Sunday the type of Photo was the highest one for the total interaction with each result, above 60 at Monday, above 50 almost to 60 at Tuesday, above 50 at Wednesday, above 60 at Thursday, above 50 at Friday, above 60 at Saturday and 70 at Sunday. So we can conclude that photo have the most interaction in the Sunday.

Next for the Status Type the Post Weekday that the highest is at Friday, followed by Sunday, Wednesday, Saturday and Monday for the lowest one.

The Link Type show result with Saturday is the highest followed by, Thursday, Friday, Tuesday, Monday, Wednesday and the lowest is Sunday.

And for the Video Type Tuesday and Wednesday was the highest one followed by Thursday, Friday and Saturday was the lowest one.

b. Predictive Analytics

Naive Bayes

Table View Plot View

accuracy: 87.24% +/- 6.41% (micro average: 87.21%)

	true Low interaction	true Medium interaction	true High interaction	class precision
pred. Low interaction	108	22	0	83.08%
pred. Medium interaction	12	135	4	89.40%
pred. High interaction	0	0	16	100.00%
class recall	90.00%	85.99%	80.00%	

Figure 4. Confusion Matrix of Naive Bayes

The result from Naive Bayes show that the accuracy is 87.24% with the pred. low interaction is 108 with the class precision 83.08%, pred. Medium interaction is 135 with class precision 89.40% and pred. High interaction is 16 with the class precision 100%. And for the each class recall is show with the result 90% (true Low interaction), 85.99% (true Medium interaction), and 80% (true High interaction).

Random Forest

accuracy: 90.35% +/- 4.31% (micro average: 90.37%)

	true Low interaction	true Medium interaction	true High interaction	class precision
pred. Low interaction	121	24	0	83.45%
pred. Medium interaction	0	134	5	96.40%
pred. High interaction	0	0	17	100.00%
class recall	100.00%	84.81%	77.27%	

Figure 5. Confusion Matrix of Random Forest

From Random Forest , the accuracy was the highest one with the 90.35% accuracy. The result from we using Random Forest is that the pred. Low interaction is 121 with class precision 83.45% and the class recall true Low interaction is 100%, pred. Medium interaction is 134 with class precision 96.4% and the class recall for the true Medium interaction is 84.81% , and pred. High interaction is 17 , the class precision is 100% and the class recall for the true High interaction is 77.27%.

Decision tree:

accuracy: 90.05% +/- 9.25% (micro average: 90.03%)

	true Low interaction	true Medium interaction	true High interaction	class precision
pred. Low interaction	120	24	0	83.33%
pred. Medium interaction	1	134	5	95.71%
pred. High interaction	0	0	17	100.00%
class recall	99.17%	84.81%	77.27%	

Figure 6. Confusion Matrix of Decison Tree

And the last we was using Decision tree with the accuracy 90.5% with the pred. Low interaction is 120 with the class precision 83.33%, pred. Medium interaction is 134 with class precision 95.71% and pred. High interaction is 17 with class precision 100%. For the each class recall result is 99.17% for the true Low interaction, 84.81% for the true Medium interaction and 77.27% for the High interaction.

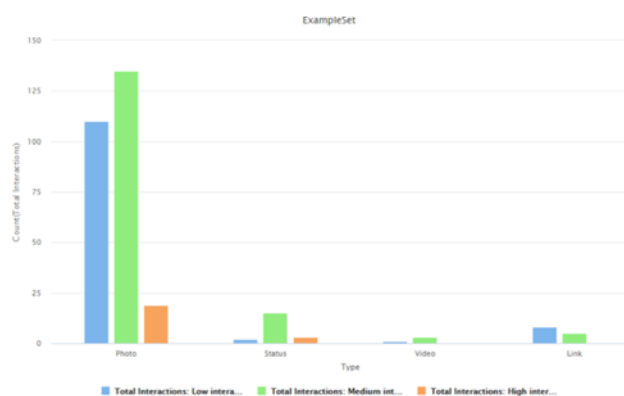


Figure 7. Statistics of Total interactions by Type of Post

The graphic show that the most highest of the Total Interactions photo is Medium Interaction that over than 125, the second highest Total Interaction is the Low Interaction that over 100 and the lowest Total Interaction is High interaction with under 25.

For the Total Interactions of status the highest one was the Medium Interaction , and the lowest is High interaction and Low interaction, but the Low interaction is more lower than the High interaction, so we can say that the Medium interaction was the highest one for the status Total Interactions, the second was High interaction and the lowest was Low Interaction.

The video type of the total interactions that more highest one is the Medium Interaction and the lowest one was the Low Interaction.

And for the type Link , the Total Interactions that the highest one is Low interaction and Medium Interactions is the lowest one.

Prescriptive Analytics:

- From the prescriptive analysis, we can see the result as shown below:

Row No.	prediction(T...	confidence(...	confidence(...	confidence(...	Category	Post Weekd...	Post Month	like
1	High Interacti...	0	0	1	2	5	9	424
Page total li...	Lifetime Peo...	Paid	Post Hour	Lifetime Eng...	Lifetime Post Impressions by people who have liked your Page			
116499	412	0	6	34	68553			
Type	Lifetime Post Consumptions	Lifetime Post Total Impressions		Lifetime Post Total Rea...	comment	share		
photo	-435	-27488		11549	16	53		
Lifetime Pos...	Lifetime Post reach by people who like your Page							
853	9478							

This is the result of prescriptive analytics by using the process shown in the Chapter 3 Figure 2. As we stated above that the attributes that we analyze for prediction is the total interactions , and the type that we analyze is Photo. As we can see from the result stated above, it shows that the total interaction prediction is HIGH with the confidence level of high has the highest value compared to the low and mid, which is 1 while the low and medium values are 0. The category that get high interaction is Product (direct advertisement, explicit brand content) with the photo type of post. Meanwhile, the post hour is at 6.AM, with the page total like is 116499, and the lifetime engaged users is 34.

V. CONCLUSION

This study which uses the business analytics concept, is able to predict how users interact on Facebook with several post categories such as action, product, and inspiration categories, and post types such as photos, statuses, videos, and links. The total interaction on Facebook has 20 variables. We also use the information gain ratio to apply dimensionality reduction. Naive Bayes, Random Forest, and Decision Tree are the algorithms we use. The results of the comparison of the three algorithms that we use show that Random Forest is the algorithm with the highest accuracy, which is 90.35 %. Besides, 3 business analytic domains are utilized, such as descriptive - analytic, predictive analytic, and perspective analytic. The Algorithms used in predictive analytics include Random forest, Naive Boyes, and Decision trees.

By using the business analytic concept that utilizing *rapid miner* software, it provides robust and cost-friendly analytical computation processes in predicting total interactions on Facebook and also determines predictions about how users interact on Facebook with several post categories such as action, product, and inspiration categories.

This can make it easier for an analyst to determine whether a post is worth paying for and promoting. This data is sought for deeper observations of posts on Facebook that get a lot of interaction and loyal users. However, the weighting results showed only minor variances in value among the 20 attributes we used. More daily data could provide a broader and more complete picture. As a result, using a larger and more complicated dataset in future research may uncover further secret, useful, and hidden information in Dataset Facebook.

REFERENCES

- Acito, F., & Khatri, V. (2014). Business analytics: Why now and what next?. *Business Horizons*, 57(5), 565-570.



- Al-Aidaroods, K. M., Bakar, A. A., & Othman, Z. (2010, March). Naive Bayes variants in classification learning. In 2010 International Conference on Information Retrieval & Knowledge Management (CAMP) (pp. 276-281). IEEE.
- Arunadevi, D. J., Ramya, S., & Raja, M. R. (2018). A study of classification algorithms using Rapidminer. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 119(12), 15977-15988.
- Basri, W. S., & Siam, M. R. (2017). Maximizing the social media potential for small businesses and startups: A conceptual study. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(2), 241-245.
- Ben-Haim, Y., & Tom-Tov, E. (2010). A Streaming Parallel Decision Tree Algorithm. *Journal of Machine Learning Research*, 11(2).
- Bianchi, C., & Andrews, L. (2015). Investigating marketing managers' perspectives on social media in Chile. *Journal of Business Research*, 68(12), 2552–2559.
- Chen, S., Webb, G. I., Liu, L., & Ma, X. (2020). A novel selective naïve Bayes algorithm. *Knowledge-Based Systems*, 192, 105361.
- Eckerson, W. W. (2007). Predictive analytics. Extending the Value of Your Data Warehousing Investment. TDWI Best Practices Report, 1, 1-36.
- Edosomwan, S., Prakasan, S. K., Kouame, D., Watson, J., & Seymour, T. (2011). The history of social media and its impact on business. *Journal of Applied Management and Entrepreneurship*, 16(3), 79–91.
- Fiet, J. O. (2007). A prescriptive analysis of search and discovery. *Journal of Management Studies*, 44(4), 592-611.
- Friedman, J. H., Kohavi, R., & Yun, Y. (1996, August). Lazy decision trees. In *AAAI/IAAI*, Vol. 1 (pp. 717-724).
- Griffiths, M., & McLean, R. (2015). Unleashing corporate communications via social media: A UK study of brand management and conversations with customers. *Journal of Customer Behaviour*, 14(2), 147–162
- Gröger, C., Schwarz, H., & Mitschang, B. (2014, May). Prescriptive analytics for recommendation-based business process optimization. In *International Conference on Business Information Systems* (pp. 25-37). Springer, Cham.
- Gurkhe, D., Pal, N., & Bhatia, R. (2014). Effective sentiment analysis of social media datasets using Naïve Bayesian classification. *International Journal of Computer Applications*, 975(8887), 99.
- Habibi, M. R., Laroche, M., & Richard, M. O. (2014). The roles of brand community and community engagement in building brand trust on social media. *Computers in Human Behavior*, 37, 152–161.
- Kemp, S. E., Ng, M., Hollowood, T., & Hort, J. (2018). Introduction to Descriptive Analysis. *Descriptive Analysis in Sensory Evaluation*, 1-39.
- Kraus, S., Kanbach, D. K., Krysta, P. M., Steinhoff, M. M., & Tomini, N. (2022). Facebook and the creation of the metaverse: Radical business model innovation or incremental transformation. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*.
- Lariscy, R.W., Avery, E. J., Sweetser, K. D., & Howes, P. (2009). Monitoring public opinion in cyberspace: How corporate public relations is facing the challenge. *Public Relations Journal*, 3(4), 1–17.
- Lin, W., Wu, Z., Lin, L., Wen, A., & Li, J. (2017). An ensemble random forest algorithm for insurance big data analysis. *Ieee access*, 5, 16568-16575.
- Trainor, K. J., Andzulis, J. M., Rapp, A., & Agnihotri, R. (2014). Social media technology usage and customer relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM. *Journal of Business Research*, 67(6), 1201–1208.1016/j.jbusres.2013.05.002.
- Turban, E., Sharda, R., Delen, D., & Efraim, T. (2011). *Decision support and business intelligence systems* (9th ed.). Pearson.
- Xanthidis, D., & Nicholas, D. (2004, December). Evaluating internet usage and ecommerce growth in Greece. In *Aslib Proceedings*. Emerald Group Publishing Limited.

STUDI KELAYAKAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN LELE DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN

¹Djuli Sjafei Purba, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

²Rosita Manawari Girsang, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

³Djahotman Purba, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

⁴Sri Martina, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

⁵Ratih, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

Email : djulipurba484@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha pembudidayaan ikan lele ditinjau dari aspek keuangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data keuangan selama 3 bulan untuk pembesaran ikan lele sebanyak 3.000 ekor. Data keuangan mulai dari biaya pembelian bibit, biaya pemeliharaan, biaya panen. Dari hasil analisis dengan menggunakan perhitungan laba rugi. Berdasarkan data, untuk pembudidayaan ikan lele sebanyak 3.000 ekor, dibutuhkan biaya selama 3 bulan yaitu 16.465.000. Bibit 3.000 ekor tersebut pada saat panen mencapai 300 kg dengan harga jual sebesar Rp 15.000 per kg, sehingga didapat penjualan sebesar 45.000.000,-. Dari hasil penjualan dikurang biaya maka didapat laba usaha sebesar 28.535.000,- Dan untuk menjaga kestabilan kas, maka perlu disusun arus kas. Berdasarkan data arus kas, kas pada awal usaha 30.000.000, dan kas pada akhir tahun (bulan ke 12) adalah sebesar 75.140.000,-

Kata Kunci : Studi Kelayakan, Arus Kas, Laba Rugi

ABSTRACT

This study aims to determine the feasibility of catfish farming in terms of financial aspects. This type of research is quantitative descriptive. The data used is financial data for 3 months for growing 3,000 catfish. Financial data starting from the cost of purchasing seeds, aintenance costs, harvest costs. From the results of the analysis using the calculation of profit and loss. Based on the data, for the cultivation of 3,000 catfish, it takes 3 months, namely 16,465,000. At the time of harvest, the 3,000 seeds reached 300 kg with a selling price of IDR 15,000 per kg, so that sales of IDR 45,000,000 were obtained. From the sales results minus the costs, an operating profit of 28,535,000 is obtained. And to maintain cash stability, it is necessary to arrange cash flows. Based on cash flow data, cash at the beginning of the business was 30,000,000, and cash at the end of the year (12th month) was 75,140,000

Keyword : Feasibility study, Cash flow, Profit and loss

I. Pendahuluan

Budidaya ikan lele merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan karena semakin meningkatnya permintaan baik untuk dikonsumsi maupun untuk industri pengolahan. Selain harganya yang terbilang murah, ikan lele juga memiliki manfaat dengan kandungan gizi yang cukup tinggi dan juga merupakan ikan air tawar yang mudah dikembangbiakan serta pertumbuhannya yang cepat. Budidaya ikan lele sangat diminati para peternak karena pangsa pasarnya yang terus menerus berkembang. Selain itu, pemeliharaan ikan lele yang terbilang mudah serta gizi dari ikan lele yg cukup tinggi sehingga memiliki peminat yang meningkat serta penjualannya yang mudah.

Usaha pada sektor perikanan khususnya usaha pembesaran ikan lele masih banyak diminati sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian para pembudidaya. Dalam menjalankan usaha



perikanan ini, tentunya para pembudidaya mempunyai tujuan tertentu yaitu bagaimana cara agar usaha pembesaran ikan yang dilakukan akan mendatangkan keuntungan yang maksimal dengan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Tentunya para pembudidaya akan berusaha untuk menggunakan sumberdaya yang dimiliki dengan sebaik mungkin agar memperoleh keuntungan dengan sebesar – besarnya. Berwirausaha pada sektor perikanan merupakan suatu usaha yang menjanjikan. Karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah perairan yang luas. Maka dari itu, usaha pada sektor perikanan cukup menjanjikan serta memiliki potensi yang cukup besar untuk lebih dikembangkan

Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang memiliki banyak peminat dan jumlah konsumsi yang semakin hari semakin meningkat. Ikan lele memiliki rasa yang cukup gurih sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lauk untuk acara pesta pernikahan, serta restoran. Dengan tingginya kebutuhan konsumsi ikan lele, maka dari itu usaha pemebesaran ikan dapat dijadikan sebagai salah satu peluang usaha dalam meningkatkan pendapatan. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang diminati untuk kegiatan budidaya karena memiliki pangsa pasar yang tinggi, gizi yang cukup tinggi pula, serta pemeliharaannya yang terbilang mudah. Kegiatan pemeliharaan akan berhasil jika memperhatikan indukan, pemberian pakan yang cukup, kualitas air yang sesuai, serta aspek reproduksi induk. Reproduksi induk yang baik dapat menghasilkan benih yang sehat. Benih yang baik dapat dilihat dari pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan tersebut

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi cukup besar untuk melakukan pengembangan budidaya ikan air tawar. Salah satu komoditas ikan air tawar yang sangat potensial adalah ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ikan ini sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia. Budidaya ikan lele berkembang pesat dikarenakan dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas, pemasarannya relatif mudah, dan modal yang dibutuhkan relatif rendah (Effendie, 2003 dalam Isa, 2014).

Maligas Bayu adalah salah satu daerah di Kabupaten Simalungun yang berpotensi untuk meningkatkan produksi ikan lele karena memiliki pangsa pasar dan peminat yang tinggi. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas merupakan suatu usaha budidaya ikan yang bergerak dalam membudidayakan berbagai jenis ikan, salah satunya ikan lele. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas merupakan kelompok usaha pembudidayaan ikan dibawah naungan Dinas Perikanan yang dikelola oleh Bapak Muhammad Susanto. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas ini sudah berjalan selama 8 tahun. Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas yang terletak di Desa Maligas Bayu (Simalungun) yang sudah cukup lama berjalan dan sangat berkembang. Kolam yang digunakan untuk usaha pembesaran ikan merupakan kolam bioflok (terpal). Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengembangkan komoditas lele. Studi kelayakan usaha perlu dilakukan bagi pemula usaha lele maupun yang sudah berjalan untuk memberi informasi mengenai cara pembudidayaan ikan lele

Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012), penanaman modal dalam suatu usaha, baik untuk usaha baru maupun perluasan usaha yang sudah ada, biasanya disesuaikan dengan tujuan dan bentuk badan usahanya. Salah satu tujuan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas didirikan adalah mencari keuntungan, dalam arti seluruh aktivitas Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas ditujukan untuk mencari keuntungan semata. Yang terpenting adalah usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat pada masyarakat luas. Agar tujuan POKDAKAN tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka apapun tujuan POKDAKAN (baik profit, sosial maupun gabungan dari keduanya profit dan sosial), hendaknya apabila ingin melakukan investasi sebaiknya didahului dengan suatu studi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi yang akan ditanam layak atau tidak untuk dijalankan atau dengan kata lain jika usaha tersebut di jalankan akan memberikan suatu manfaat atau tidak.

Salah satu tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengidentifikasi masalah dimasa yang akan datang, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin

dicapai dalam suatu investasi. Jadi dengan adanya studi kelayakan bisnis minimal dapat memberikan pedoman atau arahan kepada usaha yang akan dijalankan nantinya. Studi Kelayakan Bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. (Kasmir & Jakfar, 2012).

II. KAJIAN TEORI

Studi Kelayakan Usaha

Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012), Studi Kelayakan merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data data informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Menurut (Ma'ruf, 2017), Studi Kelayakan Usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Mempelajari secara mendalam berarti, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi, selanjutnya diukur, dihitung dan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu. Atau dapat pula dikatakan mempelajari dan meneliti secara sungguh-sungguh segala macam data dan informasi yang berkenaan dengan suatu kegiatan usaha.

Menurut (Suliyanto, 2010), Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar dari semua pihak dibandingkan dari dampak negative yang ditimbulkan. Menurut (Akhmad et al, 2020), Studi kelayakan merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek atau usaha (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil, sedangkan proyek memiliki arti pendirian suatu usaha baru atau pengenalan suatu barang atau jasa kedalam produk mix yang sudah ada. Keberhasilan bagi pihak yang mementingkan profit maupun pihak non profit dapat berbeda.

Menurut (Suad & Suarsono, 2014), Yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek bisnis (biasanya merupakan proyek bisnis investasi) dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa ditafsirkan sedikit berbeda - beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengertikan dalam artian yang lebih luas. Artian yang lebih terbatas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah, atau lembaga non profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relative. Mungkin diperetimbangkan berbagai faktor seperti manfaat bagi masyarakat luas yang bisa berwujud penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumberdaya yang berlimpah ditempat tersebut, dan sebagainya.

Menurut (Yacob, 2010), Studi kelayakan bisnis atau sering disebut dengan feasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (benefit), baik dalam arti financial benefit maupun dalam arti social benefit. Berdasarkan pada uraian ini, layak atau tidaknya suatu usaha atau proyek dapat dilihat dari segi pandangan dan penilaian yang diberikan terhadap proyek atau usaha tersebut. Studi kelayakan bisnis lebih mengutamakan kelayakan dari suatu gagasan usaha dilihat dari pengusaha secara individu. Berdasarkan pada uraian ini, baik studi kelayakan maupun evaluasi proyek sama-sama bertujuan untuk menilai kelayakan suatu gagasan usaha atau proyek dan hasil dari penilaian kelayakan ini merupakan suatu pertimbangan apakah usaha atau proyek tersebut diterima atau ditolak dan sebagai perbedaan diantara kedua analisis ini dapat dilihat dari segi ruang lingkup pembahasan serta metode penilaian yang dilakukan. Menurut (Suad & Suwarsono, 2014), Tujuan dari studi kelayakan yaitu untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan.

Aspek - Aspek Studi Kelayakan Usaha

Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012), Saat melakukan studi kelayakan ada banyak aspek yang harus di teliti, diukur, dan dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan studi untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Menurut (Suad & Suwarsono, 2014), Untuk melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek - aspek apa yang akan dipelajari. Walaupun belum ada kesepakatan tentang aspek apa saja yang perlu diteliti, tetapi umumnya penelitian akan dilakukan terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum, serta aspek ekonomi Negara. Tergantung pada besar kecilnya dana yang tertanam dalam investasi tersebut, maka terkadang juga ditambah studi tentang dampak sosial.

Secara umum, aspek - aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan adalah sebagai berikut :

a. Aspek Pasar dan Pemasaran

Menurut (Johan, 2011), Aspek pasar adalah dimana permintaan ada dan penawaran hadir untuk memenuhinya. Permintaan ada karena adanya sebuah kebutuhan konsumen yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Aspek pemasaran dalam studi kelayakan akan mengkaji struktur produk atau jasa yang telah ada dipasar serta rencana produk atau jasa yang akan ditawarkan. Menurut (Jumingan, 2014), Aspek pasar dapat diperlakukan sebagai orang yang memiliki keinginan untuk dipenuhi dan didukung oleh daya beli. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk dipenuhi, baik berupa barang maupun jasa.

b. Aspek Teknis

Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012), Dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Kemudian penentuan lay - out gedung, mesin, dan peralatan serta lay - out ruangan sampai kepada usaha perluasan selanjutnya. Menurut (Yacob, 2010), Aspek teknis dibahas setelah usaha atau proyek tersebut dinilai layak dari aspek pemasaran. Faktor - faktor yang perlu diuraikan adalah yang menyangkut lokasi usaha atau proyek yang direncanakan, sumber bahan baku, jenis teknologi yang digunakan, kapasitas produksi, jenis dan jumlah investasi yang diperlukan disamping membuat rencana produksi selama umur ekonomis proyek atau usaha.

c. Aspek Manajemen dan Organisasi

Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012), Aspek manajemen dan organisasi dinilai dari para pengelola usaha dan struktur organisasi yang sudah ada. Usaha yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan dengan sungguh – sungguh. Menurut (Yacob, 2010), Dalam aspek manajemen dan organisasi, yang perlu diuraikan adalah bentuk kegiatan dan cara pengelolaan dari gagasan usaha atau proyek yang direncanakan secara efisien. Apabila bentuk dan system pengelolaan telah dapat ditentukan secara teknis (jenis pekerjaan yang diperlukan) dan berdasarkan pada kegiatan usaha, disusun bentuk struktur organisasi yang cocok dan sesuai untuk menjalankan kegiatan tersebut. Berdasarkan pada struktur organisasi yang ditetapkan, kemudian ditentukan jumlah tenaga kerja serta keahlian yang diperlukan.

d. Aspek Ekonomi dan Sosial

Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012), Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika usaha ini dijalankan. Pengaruh ini terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonomi tertentu, peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja dipabrik atau masyarakat diluar lokasi usaha. Demikian pula dengan dampak sosial yang ada seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, dan sarana ibadah. Menurut (Akhmad et al, 2020), Aspek ekonomi dan sosial merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan atau usaha, khususnya dibidang perekonomian masyarakat tempatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif dari berbagai pihak.

e. Aspek Legalitas (Hukum)



Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012), Aspek ini membahas masalah tentang kelengkapan mengenai dokumen suatu usaha yang dikelola oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang menjalankan usaha. Masalah kelengkapan dokumen proyek atau usaha mulai dari bentuk badan usaha sampai izin - izin yang dimiliki. Kelengkapan dokumen dinilai sangat penting, karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila dikemudian hari timbul masalah. Kelengkapan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak - pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut.

f. Aspek Keuangan

Menurut Kasmir & Jakfar (2012:16), Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya - biaya apa saja yang dikeluarkan dan seberapa besar biaya - biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika usaha dijalankan. Penelitian ini meliputi seberapa lama investasi (modal) yang ditanamkan akan kembali. Kemudian dari mana saja sumber pembiayaan bisnis tersebut dan bagaimana tingkat suku bunga yang berlaku, sehingga apabila dihitung dengan formula penilaian investasi sangat menguntungkan. Metode penilaian yang bisa digunakan nantinya adalah dengan *Payback Period*, *Net Present Value*, *Internal Rate of Return*, *Profitability Indeks*, *Break Event Point* serta dengan rasio - rasio keuangan lainnya. Investasi dalam berbagai usaha memerlukan modal (uang). Modal untuk membiayai usaha adalah modal utama dan modal kerja.

Usaha Ikan Lele

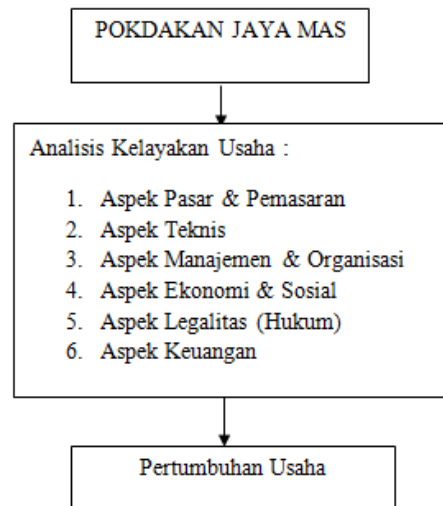
Menurut (Alex, 2020), Ikan lele (*Clarias*) adalah ikan yang hidup di air tawar. Ikan ini mempunyai ciri - ciri khas dengan tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang serta memiliki sejenis kumis yang panjang, mencuat dari sekitar mulutnya, tidak bersisik, dengan sirip punggung yang panjang. Kepalanya keras menulang dibagian atas, dengan mata yang kecil dan mulut lebar yang terletak diujung moncong, dilengkapi dengan empat pasang sungut peraba yang amat berguna untuk bergerak di air yang gelap. Menurut (Pratiwi, 2015), Ikan lele adalah salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar, ikan ini sangat muda dikenali dan termasuk dalam marga *clarias*. Ikan lele termasuk hewan bertulang belakang (*vertebrata*) yang hidup di air. Ikan lele di klasifikasikan ke dalam Filum *Chordata* dengan karakteristik memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen terlarut dari air dan memiliki sirip untuk berenang.

Menurut (Alex, 2020), Pembuatan lahan budidaya berupa kolam. Bahan untuk kolam berupa bak tempok atau terpal. Kolam dibuat dibuat berbentuk bulat dengan pintu pengeluaran dibagian tengah. Lahan yang digunakan bisa milik pribadi dan juga sewa, jika menginginkan keuntungan maksimal, tentu saja harus menggunakan lahan pribadi. Menurut (Alex, 2020), Penebaran benih kedalam kolam baru dapat dilakukan setelah dipastikan kolam benar - benar telah siap untuk digunakan. Dalam pemilihan benih pun tidak boleh asal. Harus memilih benih lele unggul yang lebih sulit terserang penyakit, sehat, dan lebih besar. Menurut (Kaleka, 2020), Pakan yang diberikan harus merupakan pakan yang berkualitas dan dalam jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan pertumbuhan ikan. Dalam pemberian pakan harus menggunakan takaran yang tepat dan tidak berlebihan.

Menurut (Kaleka, 2020), Ikan lele sudah dapat dipanen setelah 3 bulan semenjak penebaran benih ikan lele. Biasanya lele dipanen dihitung berdasarkan jumlah (ekor) per kg. Dan dalam waktu pemanenan 3 bulan terdapat 8 - 10 ekor ikan lele. Menurut (Kaleka, 2020), Berdasarkan morfologi ikan lele hidup dan berkembangbiak di air tawar. Ikan lele mudah dikenal karena adanya sunggut yang menyembul dari daerah sekitar mulutnya, tubuhnya licin karena berlendir, tidak bersisik, dan pipih memanjang. Pada bagian kepala terdapat mulut dengan ujung memoncong yang dilengkapi 4 buah sunggut dan kumis.

Dalam mulut lele terdapat gigi berupa permukaan yang kasar dibagian mulut depan dan pada bagian kepala dekat sunggut terdapat alat peraba dan penciuman. Ikan lele merupakan salah satu ikan favorit masyarakat saat ini, sehingga banyak yang membudidayakannya mulai dari segmen pembenihan, maupun pembesaran. Pokdakan Jaya Mas merupakan pokdakan yang bergerak di segmen

pembesaran ikan lele dengan lama usaha sekitar 5 tahun. Perlunya analisis kelayakan pada usaha budidaya ikan lele dimana meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial, aspek hukum dan keuangan.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu analisis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut (Elfis, 2011), adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, aspek legalitas (hukum) serta aspek keuangan. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul - betul representatif (mewakili).

Variabel dan Parameter Penelitian

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua variabel yang ada didalam kerangka berfikir. Berikut ini dijelaskan variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1

Variabel Operasional

Variabel	Pengertian	Indikator
Pokdakan Jaya Mas	Kelompok Pembudidaya Ikan adalah kumpulan budidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.	a. Tumbuhnya kesadaran kelompok b. Kemandirian kelompok c. Respon positif terhadap aplikasi teknologi d. Kemauan bekerjasama.
Studi Kelayakan Usaha	Menurut (Kasmir & Jakfar, 2012), Studi Kelayakan merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh - sungguh data	a. Profit margin (persentase dari laba berbanding dengan omset, yang mana semakin besar profit margin maka akan semakin bagus keuntungan yang diterima). b. Tingkat pengembalian (berapa

	data informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu.	<p>uang yang dihasilkan dalam bentuk persentase atas modal yang ditanamkan.</p> <p>c. BEP (titik impas yang dimana seluruh biaya dapat ditutupi dari omset sehingga profitnya nol.</p> <p>d. Payback Periode (dalam jangka waktu berapa lama modal bisa kembali).</p>
Pertumbuhan Usaha	Pertumbuhan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.	<p>a. Pertumbuhan produksi</p> <p>b. Pertumbuhan penjualan/pertumbuhan pendapatan</p> <p>c. peretumbuhan laba.</p>

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Pemilihan teknik analisis data tidak dapat ditentukan dengan sesuka hati peneliti. Demikian dapat disimpulkan, pengambilan teknik analisis data yaitu dengan cara mencatat terlebih dahulu hasil dilapangan, mengumpulkan data dengan mendahulukan wawancara dan observasi kelapangan, serta membandingkan data di tempat dengan teori.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas ini menekuni usaha pembesaran ikan lele sangkuriang. Memiliki 10 kolam untuk usaha pembesaran lele. Ikan lele di Pokdakan Jaya Mas dipanen setiap 3 bulan sekali dan pemberian pakan disetiap kolam dilakukan 3 kali jugadalam sehari. Ikan lele disini sangat terawat, terlihat dari ikan nya yang sangat lincah. Pengelola hanya membutuhkan ember, timbangan serta tangguk (alat bantu untuk pengambilan ikan) untuk peralatan di Pokdakan Jaya Mas ini. Semua ikan lele disini diberi pakan pellet dan sangat di pantau perkembangan ikan lelenya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ikan lele di Pokdakan sangat sehat dan terawatt.

Perkembangan Usaha Ikan Lele Berdasarkan Data

a. Data Mengenai Pemasaran (Produksi)

Ikan lele di Pokdakan Jaya Mas di panen dalam waktu 3 bulan sekali dan dipasarkan di pekan-pekan sekitar dan terkadang di perumahan masyarakat. Tetapi dari pihak rumah makan juga memesan ikan lele disini. Jadi setiap 3 bulan masa pemanenan ikan lele habis terjual di pekan - pekan sekitar, diperumahan masyarakat serta di rumah makan. Berikut data mengenai pemasaran ikan lele di masa pemanenan per 3 bulan :

Tabel 2
Data Pemasaran

Masa Panen	Dipasarkan
3 bulan sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekan - pekan sekitar 2. Perumahan Masyarakat 3. Rumah makan

b. Data Mengenai Biaya

Dalam usaha pembesaran ikan di Pokdakan Jaya Mas, biaya yang keluar di setiap bulan hanya untuk biaya pakan saja. Selebihnya biaya keluar hanya pada bulan pertama untuk memulai usaha saja. Dan biaya yang keluar di bulan pertama saat untuk memulai usaha meliputi biaya bibit, biaya pakan, dan biaya kolam terpal saja. Berikut data biaya pada Pokdakan Jaya Mas yang meliputi :

Tabel 3
Data Mengenai Biaya



Bulan	Biaya Untuk	Harga	Biaya 1 Kolam	Biaya 10 Kolam
1	Bibit 3000 Ekor	Rp 150	Rp 450.000	Rp 4.500.000
	Pakan 50kg	Rp 9.800	Rp 490.000	Rp 4.900.000
	Kolam Terpal	Rp1.500.000	Rp 1.500.000	Rp15.000.000
2	Pakan 50kg	Rp 9.800	Rp 490.000	Rp4.900.000
3	Pakan 50kg	Rp 9.800	Rp 490.000	Rp4.900.000
	Karyawan			Rp6.000.000
Total Biaya Selama 3 Bulan				Rp 40.200.000

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa biaya - biaya itulah yang muncul pada usaha Kelompok Pembudidaya Ikan Jaya Mas yang di kelola oleh Bapak Susanto dan beralamatkan dengan di Maligas Bayu. Biaya terbesar yang dikeluarkan oleh usaha pembesaran ikan lele ini hanyalah pada bulan pertama dimana usaha itu mulai dijalankan. Untuk bulan selanjutnya tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk usaha pembesaran ikan lele ini.

c. Data Mengenai Penjualan

Ikan lele yang dihasilkan dari Kelompok Pembudidaya Ikan Jaya Mas ini hanya akan di pasarkan setelah 3 bulan dari memulainya usaha. Karena masa panen di Kelompok Pembudidaya Ikan ini disini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dan biasanya setiap pemanenan ikan akan habis terjual karena sudah adanya pemesanan dari pihak-pihak terkait. Tetapi sebelum masa panen tiba Kelompok Pembudidaya Ikan Jaya Mas ini juga akan melakukan penawaran ke kota-kota tertentu untuk mendapatkan penjualan yang lebih cepat dan maksimal. Sehingga tidak menimbulkan kerugian ataupun penanaman modal yang terlalu lama apabila setelah masa panen belum habis terjual. Dan sampai sejauh ini, hasil panen ikan lele dari Kelompok Pembudidaya Ikan selalu habis terjual.

Berikut akan dijelaskan mengenai penjualan dari hasil panen ikan lele dari Kelompok Pembudidaya Ikan Jaya Mas. Adapun tabelnya meliputi sebagai berikut :

Tabel 4
Data Penjualan

Masa Pemanenan	Hasil Panen	Penjualan
3 bulan	100%	Rumah Makan 35% Pekan - Pekan Sekitar 35% Perumahan Masyarakat 30%
Total Penjualan		100%

Maka itulah data mengenai penjualan pada Kelompok Pembudidaya Ikan Jaya Mas di Maligas Bayu

d. Data Mengenai Karyawan

Dalam menjalankan usaha pembesaran ikan lele di Kelompok Pembudidaya Ikan Jaya Mas, Bapak Susanto dibantu oleh 1 orang karyawan tetapnya yang rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat usaha. Dengan bantuan dari 1 pekerja saja sudah sangat membantu dan sangat dirasa cukup bagi Bapak Susanto. Karyawan ini merupakan pekerja tetap dari beberapa tahun lalu dan sudah termasuk orang kepercayaan bagi Bapak Susanto. Dan sampai saat ini pengelola belum membutuhkan karyawan lagi untuk membantunya dalam menjalankan usahanya. Berikut penjelasan mengenai data pegawai pada Kelompok Pembudidaya Ikan Jaya Mas di Maligas Bayu.

Nama : Sukadi
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Umur : 32 Tahun
 Tahun Kerja : 2013 Sampai sekarang

e. Data Mengenai Lahan

Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas ini didirikan dipinggir jalan lintas menuju desa Maligas Bayu, memiliki lahan seluas 400m atau 20x20m. Memiliki 10 kolam



pembesaran ikan lele dengan masing - masing kolam memiliki ukuran 3x3m. Tempatnya sangat sejuk dan strategis, berdekatan dengan irigasi sehingga memudahkan pengaliran untuk kolam. Dan disini dibangun gudang untuk tempat ketersediaan makanan serta pondok kecil untuk istirahat. Dengan letak lokasi dipinggir jalan sehingga memudahkan para konsumen yang ingin membeli ikan secara langsung ke lokasi usaha.

Aspek - Aspek Kelayakan Usaha Ikan Lele

a. Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar dikatakan layak apabila memiliki peluang pasar, dimana permintaan lebih tinggi dari pada penawaran. Pada usaha pembesaran ikan lele pada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Jaya Mas aspek pasar yang dikaji mengenai permintaan pasar lele konsumsi dan penawaran produksi yang dihasilkan. Untuk penawaran yang dilakukan Pokdakan Jaya Mas dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan. Dan sampai saat ini Pokdakan Jaya Mas memasarkan hanya di pecan - pekan sekitar Maligas Bayu, sekitar perumahan masyarakat dan juga konsumen yang datang langsung ke lokasi usaha untuk pembelian partai besar maupun partai kecil.

1. Permintaan

Potensi pasar ikan lele di maligas bayu untuk saat ini cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya peminat pengonsumsi ikan lele yang memiliki banyak vitamin dan juga sumber protein.

2. Penawaran

Penawaran ikan lele dari Pokdakan Jaya Mas tergantung pada hasil panen. Proses pemeliharaan benih lele hingga panen membutuhkan waktu 3 bulan. Pokdakan Jaya Mas memiliki 10 kolam pembesaran yang masing-masing memiliki ukuran 3x3 m.

3. Strategi Pemasaran

Pada usaha pembesaran lele di Pokdakan Jaya Mas strategi bauran pemasarannya masih sederhana. Adapun bauran pemasaran yang diterapkan meliputi :

a. Strategi Produk

Pokdakan Jaya Mas menghasilkan produk berupa ikan lele konsumsi. Karena menghasilkan produk ikan konsumsi, maka hasil panennya berupa ikan lele yang memiliki ukuran 8 - 10 ekor setiap satu kilogram nya. Makanan yang diberikan berupa pelet yang membuat daging lele tidak terlalu amis dan gurih.

b. Strategi Harga

Harga ikan lele yang dihasilkan dari Pokdakan Jaya Mas hanya Rp 15.000/kg dengan ukuran 8 - 10 ekor ikan. Strategi penetapan harga sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan posisi produk yang di tawarkan di pasar.

Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran pada Pokdakan Jaya Mas sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pembesaran ikan lele yang dilakukan oleh Pokdakan Jaya Mas layak di jalankan dan dapat dikembangkan lagi.

b. Aspek Teknis

Aspek teknis ini mencakup lokasi usaha dan luas produksi. Berikut penjelasan mengenai aspek teknis pada Pokdakan Jaya Mas yang meliputi :

1. Lokasi Usaha

Lokasi usaha meliputi :

a. Ketersediaan Air

Ketersediaan air pada Pokdakan Jaya Mas yaitu dari pengaliran irigasi yang letaknya tidak jauh dari lokasi kolam.

b. Ketersediaan Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan serta dibutuhkan oleh Pokdakan Jaya Mas adalah benih dan pakan. Benih lele di peroleh dari UPR (Unit Pembenuhan Rakyat) di Maligas Bayu. Untuk pakan berupa pelet, Pokdakan Jaya Mas membeli langsung dari pabrik ikan.

c. Tenaga Kerja



Pokdakan Jaya Mas hanya dikelola oleh 1 karyawan. Karena pemilik juga ikut serta dalam pengelolaan Pokdakan serta pengawasan dan administrasi juga dikelola oleh pemilik. Jadi Pokdakan hanya membutuhkan 1 orang karyawan saja.

d. Fasilitas Transportasi

Lokasi usaha Pokdakan terletak diperkampungan. Terdapat fasilitas roda empat berupa mobil pick up untuk membawa hasil panen lokasi pemasaran.

2. Luas Produksi

Pokdakan Jaya Mas memiliki luas 20x20 m. Memiliki 10 kolam dan masing-masing kolam memiliki ukuran 3x3 m. Memiliki gudang dan tempat tinggal disekitar kolam. Berdasarkan aspek teknis pada Pokdakan Jaya Mas sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pembesaran ikan lele system bioflok yang dilakukan oleh Pokdakan Jaya Mas layak di jalankan.

b. Aspek Manajemen dan Organisasi

Pokdakan Jaya Mas memiliki manajemen dan organisasi yang formal. Usaha ini di kelola oleh Bapak Susanto dan 1 karyawannya. Dimana Bapak Susanto ikut serta dalam pengelolaan budidaya yang juga meliputi bidang keuangan, pengawasan serta penyedia dana dari usaha Pokdakan tersebut. Berdasarkan aspek manajemen dan organisai pada Pokdakan Jaya Mas sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pembesaran ikan lele yang dilakukan oleh Pokdakan Jaya Mas layak di jalankan. Dengan jumlah karyawan yang sedikit dapat memudahkan pengelola dalam melakukan pengawasan dengan mudah.

c. Aspek Ekonomi dan Sosial

Dalam aspek ini, untuk melihat seberapa besar usaha yang dijalankan memberikan dampak bagi pengusaha maupun masyarakat sekitar. Adapun dampak yang ditimbulkan dari berdirinya usaha tersebut merupakan dampak positif maupun dampak negatif. Usaha pembesaran ikan lele pada Pokdakan Jaya Mas tidak memberikan dampak negatif pada kondisi perekonomian masyarakat sekitar tempat usaha. Justru Pokdakan Jaya Mas memberikan dampak positif, karena memberikan lapangan kerja dan bagi pengelola dapat meningkatkan pendapatan.

Dari hasil pengamatan serta informasi yang didapat dari Pokdakan Jaya Mas, maka usaha pembesaran ikan lele pada Pokdakan Jaya Mas layak untuk dijalankan karena tidak menimbulkan dampak negatife pada lingkungan sekitar usaha.

d. Aspek Legalitas (Hukum)

Aspek ini membahas mengenai kelengkapan dokumen suatu usaha yang dikelola oleh perorangan maupun sekelompok orang yang menjalankan usaha. Pokdakan Jaya Mas ini formal, karena memiliki surat-surat izin yang sah dari Dinas Perikanan. Adapun modal serta biaya yang muncul seluruhnya berasal dari Bapak Susanto selaku pemilik usaha. Dan keuntungan serta kerugian usaha juga ditanggung sendiri oleh Bapak Susanto. Berdasarkan aspek legalitas (hukum) pada Pokdakan Jaya Mas serta hasil wawancara sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha pembesaran ikan lele yang dilakukan oleh Pokdakan Jaya Mas layak untuk dikembangkan.

e. Aspek Keuangan

Aspek ini membahas mengenai biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dan seberapa besar biaya - biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika usaha dijalankan. Adapun perincian keuangan (modal) pada usaha pembesaran ikan lele di Pokdakan Jaya Mas selama 3 bulan (sampai panen) meliputi :

Tabel 5
Perincian Modal

	Jumlah Perkolam	Harga Satuan	Harga per 10 kolam
Bibit Ikan lele	3000 ekor	Rp 150	Rp 4.500.000
Pakan Ikan	150 kg	Rp 9.800/kg	Rp14.700.000
Kolam Terpal	1	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000
Pekerja	1 orang		Rp 6.000.000
	Total		Rp 40.200.000

Adapun perincian hasil rata - rata pada usaha pembesaran ikan lele di Pokdakan Jaya Mas selama 3 bulan (sampai panen) meliputi :

Tabel 6
Perincian Hasil

	Jumlah (kg/kolam)	Harga Jual	Total Per 10 Kolam
Ikan Lele	300	Rp 15000/Kg	Rp 45.000.000
Modal			Rp 40.200.000
Total			Rp 4.800.000

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari aspek keuangan pada Pokdakan Jaya mas layak di jalankan dan dikembangkan. Karena memiliki keuntungan. Keuntungan akan lebih banyak di dapatkan setelah masa pemanenan 3 bulan pertama, karena pada 3 bulan selanjutnya tidak lagi ada biaya pengeluaran untuk kolam terpal. Karena untuk 3 bulan kedepan setelah pemanenan pertama hanya membutuhkan modal yaitu bibit, pakan, serta gaji karyawan saja. Karena kolam terpal dapat bertahan selama \pm 5 tahun dan bisa mencapai 20 kali pemanenan.

1) Arus Kas

Tabel 7
Arus Kas

KETERANGAN												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SALDO KAS AWAL	30,000,000	6,935,000	3,370,000	41,285,000	18,220,000	14,655,000	52,570,000	29,505,000	25,940,000	63,855,000	40,790,000	37,225,000
KAS MASUK												
1 Penjualan lele 300 kg x 10 kolam @ 15.000,-			45,000,000			45,000,000			45,000,000			45,000,000
2 Modal sendiri	18,000,000											
3 Pinjaman	12,000,000											
Jumlah Kas Masuk	30,000,000	6,935,000	48,370,000	41,285,000	18,220,000	59,655,000	52,570,000	29,505,000	70,940,000	63,855,000	40,790,000	82,225,000
KAS KELUAR												
1 Pembuatan Kolam terpal 10kolam @ 1.500.000	15,000,000			15,000,000			15,000,000			15,000,000		
2 Bibit 3.000 ekor / kolam @ 150 x 10 kolam	4,500,000			4,500,000			4,500,000			4,500,000		
3 Pakan 50 kg @ Rp 9.800 /per kolam x 10 kolam	1,500,000	1,500,000	1,900,000	1,500,000	1,500,000	1,900,000	1,500,000	1,500,000	1,900,000	1,500,000	1,500,000	1,900,000
4 Biaya obat-obatan	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
5 Pegawai 1 orang x 2.000.000,-/bulan x 3 bulan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
6 Biaya listrik	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
7 Bayar pokokpinjaman (sekali 3 bulan)			3,000,000			3,000,000			3,000,000			3,000,000
8 Bayar biaya bunga 12% per tahun (sekali 3 bulan)	0		120,000	0		120,000	0		120,000	0		120,000
Jumlah Kas Keluar	23,065,000	3,565,000	7,085,000	23,065,000	3,565,000	7,085,000	23,065,000	3,565,000	7,085,000	23,065,000	3,565,000	7,085,000
Saldo Kas	6,935,000	3,370,000	41,285,000	18,220,000	14,655,000	52,570,000	29,505,000	25,940,000	63,855,000	40,790,000	37,225,000	75,140,000

2) Laporan Laba Rugi

Tabel 8
Laporan Laba Rugi

Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A Penjualan lele 300 kg x 10 kolam @ 15.000,-	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
B Biaya-biaya				
1 Bibit 3.000 ekor / kolam @ 150 x 10 kolam	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
2 Pakan 50 kg @ Rp 9.800 /per kolam x 10 kolam	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
3 Biaya obat-obatan	75,000	75,000	75,000	75,000
4 Pegawai 1 orang x 2.000.000,- /bulan x 3 bulan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
5 Biaya listrik	120,000	120,000	120,000	120,000
6 Bayar biaya bunga 12% per tahun (sekali 3 bulan)	120,000	120,000	120,000	120,000
7 Biaya Penyusutan Kolam	750,000	750,000	750,000	750,000
Jumlah Biaya	16,465,000	16,465,000	16,465,000	16,465,000
Laba	28,535,000	28,535,000	28,535,000	28,535,000

Berdasarkan Laporan Laba Rugi, setiap triwulan didapatkan laba sebesar 28.535.000, yaitu pengurangan pendapatan sebesar Rp 45.000.000,- terhadap biaya yaitu sebesar Rp 16.465.000,-

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan studi kelayakan didapat beberapa kesimpulan yaitu :

- 1) Modal usaha pada awal tahun untuk pembudidayaan 3000 ekor bibit lele dibutuhkan modal usaha sebesar Rp 30.000.000,-
- 2) Modal tersebut digunakan untuk pembelian bibit ikan lele, pembuatan 10 (sepuluh) buah kolam terpal, dan biaya pemeliharaan dari mulai penanaman hingga panen.
- 3) Setiap panen dengan masa waktu pembudidayaan selama 3 (tiga) bulan didapat laba sebesar 28.535.000,-
- 4) Usaha pembudidayaan ikan lele dengan bibit sebanyak 3000 ekor membutuhkan 10 (sepuluh) kolam terpal dengan modal awal sebesar 30.000.000,- dapat dilakukan

Saran

Berdasarkan hasil studi kelayakan usaha, disampaikan beberapa saran yaitu :

- 1) Studi kelayakan usaha dilakukan dengan perhitungan pembudidayaan dengan kondisi 3000 ekor bibit, 10 kolam terpal, harga pakan sebesar 9.800 per kg dengan jumlah produksi sebanyak 300 kg dengan jual adalah 15.000,- per kg. Untuk itu memulai usaha, terlebih dahulu, dilakukan studi kelayakan untuk mengetahui apakah usaha layak dikerjakan, karena setiap saat kondisi dapat berubah-ubah.
- 2) Peternak budidaya ikan lele menggunakan hasil studi kelayakan ini sebagai acuan dalam pembudidayaan ikan lele.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulllah, Ma'ruf. 2017. "Studi Kelayakan Bisnis". Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Akhmad dkk. 2020. "Studi Kelayakan Bisnis". Purwokerto: UM Purwokerto Press.
- Ayuningsasi, A. A. K., & Mahayanthi, I. G. A. D. Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Pembesaran Ikan Lele di Kota Denpasar dari Kriteria Undiscounted. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(1), 44521.
- Elvis dan Parulian. 2011. "Metode Penelitian". Medan: Universitas HKBP Nomensen.
http://repository.utu.ac.id/499/1/BAB%20I_V.pdf
- Johan, Suwinto. 2011. "Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jumingan. 2014. "Studi Kelayakan Bisnis". Jakarta: PT Bumi Aksara"
- Kaleka, Norbertaus. 2020. "Budidaya Ikan di Pekarangan". Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kasmir dan Jakfar. 2012. "Studi Kelayakan Bisnis". edisi revisi. Jakarta: Kencana.



- Leli, S., & Usmiar, U. (2021). Analisis Kelayakan Usaha Budi Daya Ikan Lele Unit Pembenuhan Rakyat Dari Aspek Finansial. *Menara Ekonom*, 7(1), 1-7.
- Mahyudin, I., Mahreda, E. S., Mustika, R., & Febrianty, I. (2014). Analisis kelayakan dan sensitivitas harga input pada usaha budidaya ikan lele dalam kolam terpal di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. *EnviroScientee*, 10(1), 9-17.
- Mistina, R. S., Maruanaya, Y., & Jacobus, S. I. (2022). Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Lele Sangkurriang (*Clarias sp.*) Di Kabupaten Nabire. *Tabura: Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 4(2), 17-21.
- Morwarin, L. T. (2019). Studi Kelayakan Keuangan Budidaya Ikan Lele Dumbo Studi Kasus Di Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Nasarudin, I. Y. (2013). Analisis kelayakan ekonomi dan keuangan Usaha ikan lele asap di Pekanbaru. *Etikonomi*, 12(2).
- Pratiwi, Inarita. 2018. "Usaha Pembibitan Ikan 9 Jenis Ikan Unggulan". Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Rosalina, D. (2014). Analisis kelayakan usaha budidaya ikan lele di kolam terpal di Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah. *Maspari Journal: Marine Science Research*, 6(1), 20-24.
- S, Alex. 2020. "Aneka Lele di Aneka Media Pemeliharaan". Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Simatupang, T. M. K., Elfitasari, T., & Susilowati, T. (2017). Analisa Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Lele (*clarias sp*) di Pokdakan Sido Makmur Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. *Journal of Aquaculture Management and Technology*, 6(4), 236-241.
- Sucipto, Agus. 2010. "Studi Kelayakan Bisnis". Malang: UIN-Maliki Press.
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif". Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, A. T., Chumaidiyah, E., & Pamoso, A. (2015). Analisis Kelayakan Usaha Pengembangan Budidaya Ikan Lele Untuk Perusahaan X Di Kabupaten Bandung. *eProceedings of Engineering*, 2(2).
- Suliyanto. 2010. "Studi Kelayakan Bisnis". Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Supriyanto, M., & Wiwoho, R. (2017). Studi kelayakan usaha dan strategi pengembangan usaha budidaya ikan lele Di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2(2).
- Syamsuri, S., & Alang, H. (2023). Analisis Potensi Ekonomi Dan Kelayakan Usaha Budidaya Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) Desa Tambuha Kecamatan Watunohu, Kolaka Utara. *Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian*, 48(1), 144-154.
- Tarigan, W. J., & Sinaga, M. H. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Untuk Mengevaluasi Perencanaan Strategis Dengan Menggunakan Balance Scorecard. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1194-1207
- Umar, Husein. 2010. "Studi Kelayakan Bisnis". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.